

PETA PENYEBARAN GERAKAN EKSTREMISME PASCA BERLAKUNYA PERPPU NOMOR 2/2017

**(Studi Kasus pada Universitas Hasanuddin Makassar,
Universitas Brawijaya Malang, dan Institut Teknologi
Sepuluh November Surabaya)**

Ahmad Zainul Hamdi

infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

2021

DAFTAR ISI

	Hal
I PENDAHULUAN	3
II TINJAUAN REGULASI	5
III UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	7
III.1 Kehidupan Organisasi Kemahasiswaan	9
III.2 Kebijakan Deadikalisasi	13
III.3 Kehidupan Kampus Pasca-UU Ormas	19
III.4 Penutup	29
IV UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG	29
IV.1 Kehidupan Organisasi Kemahasiswaan	30
IV.2 Kebijakan Deadikalisasi	33
IV.3 Kehidupan Kampus Pasca-UU Ormas	38
IV.4 Penutup	42
V INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER SURABAYA	42
V.1 Kehidupan Organisasi Kemahasiswaan	44
V.2 Kebijakan Deadikalisasi	55
V.3 Kehidupan Kampus Pasca-UU Ormas	58
V.4 Penutup	63
VI KESIMPULAN	63
Daftar Pustaka	63

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1	17
Gambar 2	23
Gambar 3	25
Gambar 4	26
Gambar 5	28
Gambar 6	36
Gambar 7	46
Gambar 8	48
Gambar 9	55
Gambar 10	56

I. PENDAHULUAN

Pada 10 Juli 2017, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Perppu ini merupakan aturan perubahan terhadap UU No.17/2013 tentang Organisasi Masyarakat. Perppu No. 2 ini dimaksudkan, salah satunya, untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur secara jelas dan komprehensif organisasi kemasyarakatan yang bertentangan atau menolak Pancasila dan UUD 1945. Jika sebelumnya, organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tidak bisa segera ditindak, karena tidak adanya payung hukum, dengan adanya Perppu ini, hal itu diharapkan tidak akan terjadi lagi.

Munculnya organisasi kemasyarakatan, khususnya yang berlandaskan ideologi agama, beberapa tahun terakhir membuat pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap organisasi-organisasi tersebut. Pasalnya, banyak di antara organisasi tersebut yang terbukti berafiliasi dengan jaringan teroris internasional (Islamic State of Iraq Suria–ISIS) dan melawan ideologi negara, Pancasila dan UUD 1945, dengan visinya yang ingin mendirikan negara agama (khilafah) yakni, HTI. Menyikapi fenomena tersebut, pada 10 Juli 2017, pemerintah mengeluarkan Perpu No. 02/2017 yang mengatur organisasi kemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan istilah Perppu Ormas. Salah satu tujuannya adalah untuk membuat produk hukum yang lebih ringkas karena undang-undang yang ada sebelumnya dianggap memiliki prosedur yang terlalu panjang. Sedangkan, melihat perkembangan kelompok-kelompok radikal tersebut yang semakin massif dan sudah menyebarkan pengaruhnya sebegitu jauh dalam kehidupan masyarakat, termasuk di lingkungan lembaga pemerintah dan kampus-kampus negeri yang mana para pejabat dan mahasiswanya telah terpapar, bahkan sebagian menjadi agen-agen penyebaran, ideologi mereka.

Terlepas dari pro kontra atas munculnya aturan ini, sebelum munculnya Perppu tersebut, di Indonesia memang marak bermunculan organisasi kemasyarakatan yang ditengarai sebagai organisasi radikal yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila. Organisasi-organisasi ini tidak hanya berkembang di masyarakat, tetapi juga tumbuh subur di kampus-kampus.

Sejauh kelompok ini dikaitkan dengan Islam, ada beberapa istilah yang sering digunakan, antara lain, Islam puritanis, Islam fundamentalis, Islam radikal atau Islam ekstrimisme, dan Islamisme. Khaled Aboe al-Fadl, misalnya, menyebut kelompok ini dengan istilah puritanisme, sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk kelompok Islam yang memiliki pandangan absolutism dan tanpa kompromi.¹ Sementara, tokoh lain menyebutkan dengan istilah ekstrimisme Islam atau Islam radikal. Kedua istilah terakhir ini merujuk pada kelompok islam yang pandangan dan sikap keagamaannya tidak moderat, intoleran, dan melakukan kekerasan pada kelompok yang dianggap tidak sehaluan. Al-Asymawi menegaskan, Islam ekstrem atau apa pun namanya menunjukkan adanya sikap dan praktik beragama yang ekstrem hingga sampai pada tingkat tindakan anarkis.²

¹Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft, Wrestling Islam From the Extremist* (San Fransisco: Harper San Fransisco, 2005).

² Said al-Ashmawi, *Against Islamic Extremism: the Writings of Muhammad Said al-Ashmawi* (Florida: University Press of Florida, 1998).

Istilah lain yang kerap digunakan dengan definisi yang senada adalah Islamisme. Islamisme sendiri lebih ditekankan pada keyakinan bahwa Islam adalah ideologi paling lengkap yang menjadi pedoman dalam segenap kehidupan manusia, baik sosial, politik, ekonomi, budaya dan bahkan seluruh kehidupan sehari-hari telah diatur secara rinci.³ Secara normatif pengertian ini terdengar wajar, hanya saja Islamisme terlalu memberi tekanan politik Islam yang lebih kuat, sehingga sering dikenal pula dengan Islam Politik. Perjuangan politik mereka diidentikkan dengan Islam yang sejati, sebaliknya yang berseberangan dengannya dianggap tindakan yang salah. Islamisme menganggap tindakannya selalu dilakukan dengan damai. Gerakan politik mereka untuk meleburkan Islam dan kekuasaan selalu dilakukan dengan cara-cara elegan dan tanpa kekerasan. Tetapi faktanya dalam beberapa gerakannya, untuk memuluskan pencapaian tujuan, juga menempuh jalan kekerasan.⁴

Ciri-ciri menonjol dari organisasi yang dianggap sebagai Islamisme ini, antara lain, pemaknaan literal monolitik terhadap teks kitab suci. Dalam beberapa hal kelompok ini cenderung eksklusif, intoleran, menganut militanisme dan pada tertentu bersikap ekstrem. Gerakan ini senantiasa berupaya membersihkan dan berjuang memurnikan agama dari paham demokrasi, pluralism, liberalism dan modernisme. Kaum ini memonopoli kebenaran atas tafsir agama dan karenanya menolak pluralitas pemaknaan kebenaran agama. Kebenaran tafsir agama adalah kebenaran yang menurut mereka benar. Di luar itu adalah kekeliruan, *dzulumaat (kegelapan)*, kesesatan bahkan kekafiran. Maksudnya pemaknaan teks tidak hanya secara harfiah, namun juga tertutup dalam melihat kompleksitas satu teks. Mereka menginginkan pemurnian Islam dengan slogan kembali kepada al-Qur'an dan hadis. Ada beberapa bagian dari kelompok menempuh gerakan-gerakan lewat politik kekuasaan untuk mewujudkan ambisinya.⁵

Beberapa karakter Islamisme di atas terlihat dalam pola gerakan kelompok salafi. Di antaranya yang menonjol adalah tekstual dan tertutup dalam memaknai ajaran agama, puritan (menginginkan pemurnian Islam), menolak paham-paham modernism dan dalam beberapa hal bersikap intoleran, dengan menyebut cara beragama kelompok lain bid'ah atau bahkan sesat.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat keberadaan dan dinamika kelompok-kelompok radikal, baik di kalangan dosen maupun mahasiswa, di tiga universitas: Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Brawijaya Malang, dan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. Peneliti berargumen bahwa keberagamaan selalu menyangkut faktor kognitif. Artinya, sebuah gerakan keagamaan, sekalipun ia bisa dipicu oleh faktor-faktor eksternal di luar dirinya, ia lahir dari kesadaran keagamaan tertentu. Berbeda dengan sifat kesadaran non-agama, kesadaran keagamaan seringkali melampaui pertimbangan rasionalitas-objektif karena ia diyakini sebagai kebenaran yang melampaui seluruh parameter kediniawian. Karena itu, kebijakan pelarangan atas suatu gerakan agama tidak

³Sheri Berman "Islamism, Revolution, and Civil Society," dalam *Perspectives on Politics* (2003).

⁴ Hizbut Tahrir (HT), kelompok Islamis yang selama ini mengklaim gerakannya sebagai gerakan damai, pernah melakukan percobaan kudeta kekuasaan di Jordan dengan cara kekerasan. Lihat Taji-Farouki, "Islamists and Threat of Jihad: Hizb al-Tahrir and al-Muhajiroun on Israel and Jews," dalam *Middle Eastern Studies*, 36: 4 (Oktober 2000).

⁵ Karen Armstrong, "What is Fundamentalism," dalam Makalah Seminar *Intolerance and Fundamnetalism*, 26 Januari 2005.

serta merta efektif karena gerakan itu merupakan perwujudan dari aspek keyakinan yang lebih dalam.

II. TINJAUAN REGULASI

Setidaknya, ada dua hal penting ketika membicarakan kebijakan deradikalisasi di perguruan tinggi jika dikaitkan dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. *Pertama*, Perppu ini sendiri harus bisa menjadi payung hukum dalam kebijakan deradikalisasi di perguruan tinggi. *Kedua*, Perppu ini harus bisa memberi arah kepada pihak pengambil kebijakan di perguruan tinggi dalam menghadapi gerakan radikalisme yang ada di kampus.

Di dalam konsiderannya, Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini sangat tegas menggarisbawahi keharusan setiap organisasi kemasyarakatan untuk tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Konstruksi pemahaman yang hendak dibangun adalah bahwa setiap organisasi kemasyarakatan yang bergerak di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi Negara dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Intinya, Perppu ini lahir karena negara harus bisa melakukan tindakan efektif dalam menghadapi organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dari sini sudah terbaca bahwa jika Perpu ini dijadikan sebagai alat untuk melakukan kebijakan deradikalisasi, ukuran pentingnya apakah sebuah organisasi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 atau tidak. Secara lebih jelas, pada pasal 59 ayat 4, terutama pada poin b dan c dinyatakan bahwa Ormas dilarang: "melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila."

Selain larangan atas gerakan separatisme dan pengembangan serta penyebaran ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, Perppu ini juga menggarisbawahi tentang kekerasan. Pada Pasal 59 ayat tiga dinyatakan bahwa "Ormas dilarang: (a) melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; (b) melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; (c) melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; (d) dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59 di atas, terutama poin c dan d memberi indikasi yang kuat tentang apa yang selama ini disebut sebagai Ormas radikal. Ormas radikal ditandai dengan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum dan fasilitas sosial, di mana tindakan tersebut tidak jarang dilakukan dengan alasan menegakkan hukum seakan mereka memiliki kewenangan sebagai penegak hukum.⁶

⁶ Penekanan unsur kekerasan untuk menandai sebuah Ormas radikal atau tidak, lihat Abdullah Saeed, "Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempts at a Classification", *The Muslim World*, Vol. 97 (Juli 2007), 398; Anselm Rink & Kunaal Sharma, "The Determinants of Religious Radicalization: Evidence from Kenya," *Journal of Conflict Resoution*, vol. 62, number 6 (2018), hal. 1231.

Sekalipun Perppu ini meliputi berbagai pengaturan Ormas yang berada dan beroperasi di dalam wilayah kedaulatan NKRI, namun konstruksi umumnya memperlihatkan dua hal yang dianggap sebagai ancaman, yaitu ketidaksesuaian antara Ormas dengan ideologi dan konstitusi negara serta perilaku kekerasan. Sekalipun Perppu ini tidak melulu terkait dengan Ormas keagamaan, namun jelas bahwa isu-isu nasional yang berputar di sekitar kelahirannya adalah terkait dengan maraknya Ormas keagamaan radikal. Kebijakan umum yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi maraknya Ormas keagamaan radikal adalah dengan program moderasi beragama dengan Kementerian agama sebagai *leading sector*-nya. Kebijakan moderasi beragama secara resmi masuk ke dalam RPJMN 2020-2024. Karena itu, konstruksi umum Perpu ini juga bisa disandingkan dengan rumusan kebijakan moderasi beragama oleh Kementerian Agama RI.

Dalam buku *Moderasi Beragama*, dinyatakan bahwa moderasi diperlukan karena tingginya konflik dan kekerasan dengan sentimen agama. Moderasi beragama merupakan strategi kebudayaan untuk merawat ke-Indonesia-an di tengah keragaman agama di mana sikap radikal akan berakibat pada kehancuran.⁷

Di dalam buku ini dinyatakan bahwa ada empat indikator moderasi beragama: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Komitmen kebangsaan merujuk pada komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya.

Toleransi merujuk pada sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dalam konteks toleransi inilah buku ini akhirnya sampai pada bahasan radikalisme yang didefinisikan sebagai “suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal dapat melakukan cara apa pun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka.”⁸ Komitmen kebangsaan dan toleransi akhirnya mau tidak mau sampai pada dua prinsip berikutnya: antikekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal.

Dalam konteks deradikalisasi di perguruan tinggi, terdapat Permenristek Dikti Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Sekalipun Peraturan Menteri ini tidak mencantumkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 dalam konsiderannya, namun jelas Permen ini menjadi bagian dari paket kebijakan deradikalisasi nasional. Tekanan dari peraturan ini adalah konsensus kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan Permen

⁷ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 5-10.

⁸ Ibid, 43-45.

itulah beberapa perguruan tinggi mengembangkan kebijakan deradikalisasi di kampus.⁹

Sementara di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bawah Kementerian Agama, dikembangkan kebijakan pelembagaan rumah moderasi beragama. Melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7272 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama, PTKI memiliki payung hukum untuk mengembangkan kebijakan deradikalisasi atau moderasi beragama.

Sebagaimana Keputusan Menristek Dikti tentang Pembinaan Ideologi Pancasila di perguruan tinggi di bawah lingkungan Kemenristekdikti, Keputusan Dirjen Pendis ini juga tidak menjadikan UU Ormas di dalam konsiderannya. Sekalipun demikian, kebijakan moderasi beragama di lingkungan PTKI adalah respon atas merebaknya organisasi dan gerakan keagamaan yang ekstrem, radikal, intoleran dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang mulai masuk ke dalam dunia kampus.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah sebuah regulasi yang mengikat kepada setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Dalam arti bahwa perguruan tinggi tidak boleh atas nama kebebasan akademik, misalnya, membiarkan organisasi yang secara hukum dilarang atau membiarkan paham dan/atau kegiatan organisasi yang dilarang secara hukum. Perpu Nomor 2 tahun 2017 adalah panduan terkait dengan organisasi kemasyarakatan baik secara kelembagaan maupun paham maupun kegiatan yang dilarang.

Sekalipun Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak memberi mandat secara khusus kepada perguruan tinggi, namun ada beberapa regulasi lain yang secara khusus memandatkan kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan kebijakan dan mengambil langkah yang bertujuan untuk mengukuhkan ideologi Pancasila dan menangkal berbagai paham dan gerakan radikal. Dua kementerian yang selama ini bisa dikatakan sebagai pengelola penting kegiatan pendidikan tinggi di Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk memastikan kampus tidak lagi menjadi wilayah pengembangan paham dan/atau kegiatan dari individu atau kelompok atau organisasi radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

III. UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

Salah seorang aktivis dari salah satu organisasi Islam pernah menyatakan bahwa Makassar adalah lahan subur bagi tumbuhnya kelompok-kelompok eksklusif-intoleran, bahkan radikal. Kelompok-kelompok Islamis seperti Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI awalnya berasal dari Makassar. Para

⁹ Misalnya, Universitas Negeri Surabaya mengembangkan kebijakan deradikalisasi di internal-kampus dengan mendasarkan kebijakannya pada Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Lihat Imam Marsudi, dkk. *Menangkal Radikalisme di Kampus* (Surabaya: Pusat Pembinaan Ideologi LPPM UNESA, 2019).

pelopor dan penggeraknya rata-rata berasal dari Universitas Hasanuddin (UNHAS).¹⁰ Kelompok salafi seperti Wahdah Islamiah dan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) banyak digerakkan oleh mantan aktivis UNHAS. Aziz Kahar Muzakkar, Azwar Hasan, Waspada Santing adalah beberapa nama mantan aktivis UNHAS yang menjadi pentolan di KPPSI.

Laporan penelitian Litbang Agama Makassar pada tahun 2015 menyebutkan bahwa diskursus keagamaan di beberapa kampus di Makassar, termasuk UNHAS, telah dikuasai kelompok Islam radikal. Mahasiswa, khususnya di fakultas eksakta, banyak terpicat dengan paham dan gerakan kelompok Islam radikal ini. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran paham keagamaan di kalangan mahasiswa di Makassar dari moderat ke arah fundamentalis.¹¹

Sebagaimana di tempat lain, kampus-kampus di Makassar juga menyaksikan tumbuhnya berbagai organisasi kemasyarakatan, terutama ormas keislaman, yang biasa disebut sebagai radikal sejak pasca-Reformasi 1998.¹² Sejak masa Reformasi, kelompok-kelompok yang ditengarai sebagai organisasi radikal bebas melakukan berbagai kegiatan di lingkungan kampus. Seminar, diskusi rutin, penerbitan buletin, penerbitan majalah, dan pengaderan di asrama mahasiswa massif dilakukan. Beberapa diskusi kelompok ini mengangkat tema-tema perubahan dasar negara dan bentuk negara dengan menawarkan Islam sebagai alternatifnya.

Setidaknya, ada dua kampus penting yang selama ini menjadi tumbuh kembangnya organisasi semacam ini, yaitu Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan Universitas Negeri Makassar (UNM). Di kedua kampus ini berkembang organisasi Gema Pembebasan, sayap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), juga berbagai organisasi Islam Salafi-Wahabi yang sangat eksklusif dan cenderung intoleran.¹³ Dalam konteks ini, bisa juga disebutkan munculnya berbagai study club Islam yang berbasis Lembaga Dakwah Kampus (LDK), misalnya, Komunitas Pencinta Al-Qur'an (KOMPAQ), Forum Studi Islam Ideologis (Fosidi), Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM), dan Lembaga Dakwah An-Nahl.¹⁴

Mengikuti tesis Fealy dan Bubalo tentang arus pertumbuhan Islamisme di Indonesia, setidaknya ada tiga kelompok Islamisme yang telah tumbuh dan berkembang di kampus-kampus Makassar, termasuk di UNHAS, yaitu Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimun, dan kelompok salafi.¹⁵ Yang belum jelas wujudnya di UNHAS adalah apa yang disebut sebagai kelompok jihadi yang merujuk pada kelompok yang melakukan berbagai tindakan kekerasan sebagai ekspresi

¹⁰ Wawancara Muhammad Idrus (Dosen UNM/Ketua IJABI Sulsel), pada tahun 2020 di Kampus Universitas Negeri Makassar.

¹¹ Syamsurijal, *Laporan Penelitian Pergeseran Paham Keagamaan Mahasiswa Muslim di Makassar* (Makassar: Litbang Agama Makassar, 2015).

¹² Syamsurijal, "From Moderatism to Fundamentalism: Portrait of Shifting the Religious Understanding of Makassar Islamic Students," dalam *JICSA*, Volume 07, Number 01 (June 2018); Syamsu Rizal, "Jaringan Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Makassar Sulawesi Selatan," dalam Syafii Mufid (ed), *Perkembangan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat-Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011).

¹³ Syamsurijal, "From Moderatism to Fundamentalism".

¹⁴ Ato Makmuralto, *Lembaga Dakwah Kampus Keindonesiaan; Kiprah dan Pemikiran LKIMB UNM* (Makassar: LKIMB UNM, 2016).

¹⁵ Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2007).

memperjuangkan kepentingan Islam melawan musuh-musuhnya.¹⁶ Jihad adalah konsep penting yang memotivasi kelompok ini. Mereka memahami konsep jihad sebagai tindakan teror dan kekerasan dalam perang global antara kebaikan (Islam) dan keburukan (Barat/non-Islam).¹⁷

Kelompok jihadi atau juga biasa disebut secara lengkap sebagai salafi-jihadi ini juga memiliki paham keislaman yang sangat skriptualis serta mudah sekali memberi label sesat, bid'ah dan kafir terhadap aliran yang tidak sehaluan. Terhadap kelompok yang dianggapnya sesat atau kafir, baik sesama Muslim maupun yang non-Muslim, kelompok ini tidak segan-segan melakukan kekerasan, bahkan menghalalkan darahnya.¹⁸

Rujukan kelompok jihadi ini adalah buku-buku jihad yang ditulis sendiri oleh tokoh-tokoh mereka. Salah satunya adalah, Muhammad Abd al-Salam Faraj, komandan *Islamis al-Jihad*. Ia menulis satu buku kecil berjudul *al-Faridah al-Ghaibah* (Kewajiban yang Terabaikan). Kewajiban yang terabaikan yang dimaksud itu adalah jihad. Faraj menyebutkan: "*Abandoning Jihad is the cause of the humiliation and division in which Muslims live today.*" Buku rujukan kelompok jihadi ini secara umum adalah propaganda untuk membunuh kelompok yang dianggapnya musuh Islam.¹⁹

Salafi jihadi sejauh ini belum ditemukan di UNHAS, tetapi pengagum dari mereka telah ada bibitnya. Bibitnya bermula dari kelompok Islam yang memaknai ajaran agama secara politis, yang kemudian disebut sebagai Islam politik.

III.1 Kehidupan Organisasi Kemahasiswaan

Sebelum keluarnya Perppu No.2/2017, dalam lingkungan kampus di Makassar belum ada kebijakan khusus dalam menangani kelompok yang ditengarai radikal. Kelompok-kelompok ini bisa berkembang dan menikmati kebebasan akademik yang ada di dalam kampus. Bahkan di UNHAS sendiri, salah satu kelompok salafi diberi kepercayaan untuk mengelola masjid kampus. Kelompok salafi juga menguasai kepengurusan Lembaga Dakwah Kampus. Tindak tanduk mereka yang dianggap baik, jarang memprotes kebijakan kampus dan rajin ibadah, menjadi salah satu alasan pejabat kampus memercayakan pengelolaan masjid dan Lembaga Dakwah Kampus. Sementara itu, di Fakultas Teknik, Gema Pembebasan berkembang pesat. Organisasi yang merupakan sayap HTI di lingkungan mahasiswa ini bahkan pertama kali terbentuk di UNHAS Makassar. Dari sinilah kemudian Gema Pembebasan diresmikan oleh HTI sebagai sayap HTI di lingkungan mahasiswa di Indonesia.

Pada dasarnya mayoritas mahasiswa UNHAS lebih tertarik dengan organisasi intrakampus. Memang, sejak dulu organisasi ekstra kampus

¹⁶ Abdullah Saeed, "Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempts at a Classification", *The Muslim World*, Vol. 97 (Juli 2007), 399.

¹⁷ Juergensmeyer menjelaskan motif terdalam dari aksi-aksi teror keagamaan dengan istilah *cosmic war*, di mana pelaku teror selalu meyakini bahwa mereka berada dalam sebuah perang semesta antara kebaikan melawan kejahatan. Lihat Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2000)..

¹⁸ Thomas Heghammer, "Jihadis-Salafis or Revolutionaries?" dalam Roel Metjer (ed), *Global Salafism: Islam's New Religion Movement* (London: Hurst & Co Publisher, 2009).

¹⁹ Jihanes Jansen JG, *The Neglected Duty: The Creed of Sadat's Assassins and Islamic Resurgence in the Middle East* (New York: Macmillan Publishing Company, 1986).

mahasiswa muslim semacam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) telah ada, tetapi tidak menjadi organisasi yang menonjol. Sementara organisasi lain, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), malah tidak terdengar gaungnya. Organisasi-organisasi Islam yang mewakili kelompok moderat ini tidak dianggap sebagai organisasi yang memerjuangkan ideologi Islam. Mahasiswa yang memiliki kecenderungan dan girah “memperjuangkan” ideologi Islam memilih untuk mengikuti organisasi Islam atau membentuk kelompok-kelompok Islam yang kental dengan identitas keislaman. Dari sini, berkembanglah kelompok salafi dengan identitas keislaman yang sangat kental. Kelompok ini memasuki Lembaga Dakwah Kampus, masjid kampus, baik masjid pusat maupun masjid fakultas. Mulai berkembang juga HTI yang menawarkan sistem khilafah Islam sebagai pengganti dari NKRI yang berasaskan Pancasila. HTI tumbuh subur di fakultas-fakultas eksakta.

Rata-rata mahasiswa UNHAS berlatar belakang sekolah umum. Mereka ini minim bersentuhan dengan khazanah pengetahuan keislaman secara lebih luas. Mereka sebelumnya adalah siswa-siswa biasa yang hanya paham tentang dasar-dasar Islam, khususnya yang terkait dengan urusan ibadah. Bahkan di antara mereka ada yang masih belum bisa membaca Alquran, belum memahami dengan baik tata cara berwudu, dan tidak terlalu hafal tata cara salat berikut doa-doanya. Jangan ditanya lagi soal bagaimana pemahaman mereka mengenai hubungan Islam dan negara, sisi itu pastilah gelap.

Sisi inilah yang dieksploitasi dengan sangat baik oleh kelompok-kelompok Islamis. Mereka memulai memengaruhi mahasiswa baru dengan melakukan pendampingan atau asistensi pengetahuan agama. Kelompok Islamis ini dengan sukarela mengajar dasar-dasar agama, mengajar mengaji, mengajarkan tata cara salat, dan mengajarkan berbagai macam doa-doa. Selanjutnya, setelah proses ini berjalan, ideologi dari paham keagamaan mereka mulai ditancapkan.

Organisasi Islamis yang muncul di kampus UNHAS antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

Salafi dan Mahasiswa Pencinta Masjid/Musallah (MPM)

Salafi telah masuk di UNHAS sejak tahun 90-an. Pada mulanya berkembang di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran.²⁰ Seiring dengan proses kaderisasi yang dilakukan, kelompok salafi ini mulai menguasai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di berbagai fakultas. Ada sekitar sebelas Lembaga Dakwah yang dikuasai oleh kelompok salafi ini, termasuk di antaranya Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) yang menjadi Lembaga Dakwah tingkat universitas.

Ada dua kelompok salafi yang berkembang di UNHAS, yaitu Salafi as-Sunnah dan Salafi Wahdah Islamiah. Kedua kelompok ini masing-masing memiliki jamaahnya di UNHAS. Belakangan yang masih terus melakukan pengaderan dan gencar melakukan pengajian di kampus UNHAS adalah kelompok salafi Wahdah Islamiah. Sementara salafi lainnya, meski masih ada, tidak lagi tampak menonjol. Salah satu yang menyebabkan hal itu karena salafi Wahdah Islamiah ini didukung oleh beberapa alumni UNHAS yang juga adalah para pentolan di Wahdah

²⁰ Wardiah Hamid, “Eksistensi Komunitas Salafi di Makassar,” dalam *Jurnal Pusaka*, Vol. 2, No. 1 (2014).

Islamiah. Para alumni itulah yang memengaruhi para pejabat kampus agar Wahdah Islamiah bisa melakukan berbagai kegiatan keagamaan di kampus.

Wahdah Islamiah menguasai beberapa Lembaga Dakwah di fakultas dan juga masuk di organisasi Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM). MPM ini sebenarnya telah ada sejak tahun 80-an. Kala itu kelompok salafi belum berkembang di UNHAS. Pada era 80-an yang menguasai MPM itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang cenderung berpaham Syiah atau setidaknya mengidolakan sosok Ayatollah Khomeini. Tetapi belakangan MPM ini justru diambil alih oleh Wahdah Islamiah.

Wahdah Islamiah sendiri secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai bagian dari salafi. Dalam peta gerakan keislaman global, salafi telah menjadi satu bentuk gerakan keagamaan tertentu dengan kecenderungan ajaran yang skriptualis dan dogmatis. Al-Ayubi memberikan penjelasan bahwa salafi adalah kelompok Islam yang ajarannya bersifat dogmatis, skriptualis, dan cenderung intoleran terhadap pemahaman kelompok lain yang berbeda.²¹

Wahdah Islamiah dibentuk oleh Fathul Muin Daeng Maggading, seorang tokoh Muhammadiyah yang merasa kecewa karena Muhammadiyah dianggap mulai melemah dalam gerakan pemurnian tauhid dan Islam. Awalnya organisasi ini bernama Fathul Muin, sesuai dengan nama pendirinya. Balakangan berubah menjadi Wahdah Islamiah.

Karakter salafi semakin melekat di tubuh Wahdah Islamiah, karena beberapa kader-kadernya dikirim belajar ke LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) dan ke Arab Saudi. LIPIA adalah salah satu lembaga penting dalam penyebaran ideologi Salafisme-Wahabi di Indonesia.²² Wahdah Islamiah memiliki jaringan kuat dengan Arab Saudi hingga menjadi salah satu penerima dana Yayasan Haramain.

Wahdah Islamiah adalah salah satu organisasi yang tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, tetapi para tokohnya aktif dalam merespons perkembangan politik tanah air. Beberapa tokoh Wahdah Islamiah juga adalah penggerak Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan. Pada saat aksi 212, tokoh-tokoh Wahdah Islamiah menjadi penggeraknya, di antaranya adalah Zaitun Rasmin. Di Makassar sendiri anggota Wahdah banyak yang ikut serta dalam aksi 212 di Monas Jakarta. Di samping itu, Wahdah Islamiah juga menjadi salah satu pelopor yang mengorganisasi aksi 212 di Makassar bagi umat Islam yang tidak bisa datang langsung ke Jakarta.

Wahdah Islamiah dikenal sebagai kelompok yang anti-tasawuf, tarekat, dan berbagai praktik keislaman tradisional (maulid, isra mi'raj, ziarah kubur, dll). Dalam beberapa seminar dan diskusi yang digelar, Wahdah Islamiah memandang tasawuf sebagai bid'ah. Wahdah Islamiah adalah kelompok penting yang menolak tarekat Naqshabandiah di Bulukumba.

²¹ Nazih al-Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World* (London and New York: Routledge, 1991).

²² M. Imdadun Rahmat. *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2005).

Dalam pemetaan salafi menjadi salafi-hijazi,²³ salafi-haraki (salafi-ikhwani),²⁴ dan salafi-jihadi,²⁵ Wahdah Islamiah bisa dikatakan berada di antara salafi-tarbawi dan salafi-haraki. Ia tidak hanya aktif dalam pendidikan dan dakwah dengan ajaran puritanisme Islam yang kaku, tapi juga aktif merespons persoalan politik tanah air maupun perkembangan politik di luar negeri, khususnya negeri-negara Islam. Sering pula terlibat dalam aksi-aksi yang mereka anggap sebagai aksi bela Islam, juga terlibat dalam aksi yang memprotes kebijakan negara. Dalam keterlibatannya merespons kondisi politik, Wahdah Islamiah sering beririsan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Salafi dalam model inilah yang berkembang cukup signifikan di UNHAS.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Kelompok lainn yang berkembang di UNHAS adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kelompok ini tumbuh subur di Fakultas Teknik, MIPA, Peternakan, dan Pertanian dan Kehutanan. Menurut Muhammad Yusuf, ketua Gema Pembebasan UNHAS (2017-2018), HTI atau tepatnya Gema Pembebasan, paling banyak diminati di Fakultas Saintek.²⁶ Sekalipun di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat juga ditemukan, tetapi tidak sekuat di empat fakultas tersebut.

Di UNHAS, mahasiswa pengikut HTI menyebut diri mereka Mahasiswa Gema Pembebasan (GEMAPEM). Gema Pembebasan muncul pertama kali di UNHAS melalui beberapa mahasiswa yang telah masuk di HTI. Gema Pembebasan ini dimaksudkan sebagai organ gerakan yang memiliki kesamaan ideologi dengan HTI, tetapi bergerak di kampus.

Beberapa aktivis Gema Pembebasan menolak disebut sebagai bagian dari HTI, khususnya paska-keluarnya Perppu No.2/2017. Mereka menyatakan bahwa Gema Pembebasan sama sekali tidak ada hubungan secara organisatoris dengan HTI, hanya memiliki kesamaan ideologi.²⁷ Keterangan Yusuf ini berbeda dengan pengakuan beberapa aktivis Gema Pembebasan sebelum munculnya Perppu No.2/2017, meski mereka menyatakan bahwa Gema Pembebasan memiliki struktur sendiri, tetapi mereka berada di bawah bendera HTI.²⁸ Para aktivis HTI juga sering datang memberikan materi di pengaderan atau diundang membawakan diskusi.

HTI mulai masuk di Makassar pada tahun 1995. Masuknya HTI di beberapa kampus di Makassar tidak bisa dilepaskan dari peran LDK. Cabang HTI Makassar diresmikan bersamaan dengan sebuah seminar yang diselenggarakan di UNHAS pada 2000. Seminar yang membincang soal khilafah ini dihadiri sekitar seribu

²³ Salafi-hijazi merujuk pada salafi yang berkiblat pada doktrin ultrakonservatif Wahabisme. Mereka menekankan pada gerakan dakwah dan berkarakter non-politis, tapi sangat intoleran. Baca M. Khalid Syeirazi, *Wasathiyah Islam* (Jakarta: Alif.id, 2020), 109-112.

²⁴ Salafi-haraki merujuk pada salafi yang fokus pada perjuangan mengislamkan sistem politik. Kelompok salafi ini berkiblat pada Ikhwanul Muslimin. Kelompok ini juga biasa disebut kelompok tarbiyah. Lihat ibid.

²⁵ Salafi-jihadi merujuk pada salafi yang ultrakonservatif dan ultrapuritanis dalam pemahaman keislaman serta menggunakan kekerasan atas nama jihad. Lihat ibid.

²⁶ Wawancara Muh. Yusuf (Ketua Gema Pembebasan UNHAS 2017-2018), 27 Januari 2021.

²⁷ Ibid.

²⁸ Syamsurijal. "From Moderatism to Fundamentalism." Syamsurijal, "Jaringan Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Makassar."

orang dari mahasiswa dan masyarakat umum. Pembicara-pembicara yang hadir pada saat itu adalah Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah (Rektor UMI), Prof. Dr. Mattulada (sejarahwan UNHAS), dan Dr. Utsman (aktivis HTI dari Surabaya). Sejak seminar itulah secara resmi HTI mulai masuk di UNHAS.²⁹

Di kampus-kampus, termasuk di UNHAS, HTI membentuk semacam HTI Chapter, kelompok studi atau pun melalui LDK. HTI di kampus-kampus sering menggunakan, dalam istilah mereka, organisasi mantel, yaitu organisasi yang tidak menggunakan nama HTI, tetapi club studi atau Lembaga Dakwah. Lembaga tersebut sengaja dibuat tampak netral dari aliran atau organisasi Islam tertentu, namun sebenarnya berafiliasi ke HTI.³⁰ Sebagaimana mantel, maka organisasi tersebut hanya kulit luarnya saja, isinya tetaplah HTI. Kelak paska-keluarnya Perppu No. 2/2017, organisasi mantel ini tetap bergerak di UNHAS dengan ideologi HTI-nya.

Karena di UNHAS lembaga-lembaga dakwah telah dikuasai salafi, aktivis HTI dalam kampus membentuk organ gerakan yang bernama Gema Pembebasan. Gema Pembebasan inilah yang menggaungkan wacana antikapitalisme, menolak demokrasi, dan menentang nasionalisme. Organ gerakan ini juga aktif merespons isu-isu yang sedang berkembang, yang dianggapnya bagian dari kapitalisme global. Mereka menyikapinya dengan aksi-aksi agitasi, demonstrasi, penyebaran pamflet dan penerbitan buletin. Kadang-kadang aksi Gema Pembebasan berkoalisi dengan organ-organ lain.

Gema Pembebasan ini mulanya muncul di UNHAS dan segera menjadi organisasi yang banyak diminati di Fakultas-fakultas berlatar belakang Sains dan Teknologi (Saintek). Belakangan, Gema Pembebasan diresmikan oleh HTI sebagai sayap resmi HTI yang beroperasi di kampus dengan struktur organisasi sendiri. Gema Pembebasan ini juga akhirnya berkembang di kampus-kampus lain di Makassar bahkan di seluruh Indonesia.³¹

III.2 Kebijakan Deradikalisasi

Wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa paska-keluarnya UU Ormas, di UNHAS tidak ada kebijakan spesifik dalam rangka mengatur atau mencegah perkembangan kelompok-kelompok radikal. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sosial dan Politik, Sukri, menyebut bahwa sebelum keluarnya Perppu, memang ada beberapa kegiatan organisasi Islam ekstra di kampus yang selama ini dianggap bertentangan dengan Pancasila, misalnya HTI. Mereka sering melaksanakan diskusi, bahkan dalam kelas memberikan pengakuan bahwa mereka adalah kader HTI. Saat itu tentu tidak bisa dilarang, karena mereka memang bukan organisasi terlarang. Setelah resmi dilarang, mereka tidak lagi melakukan kegiatan dengan menggunakan simbol-simbol HTI. Terhadap organisasi yang dianggap berafiliasi dengan HTI, kampus juga tidak mengambil kebijakan tertentu.

²⁹ Badruzzaman, "Hizbut Tahrir di Kota Makassar", dalam Abd. Kadir Ahmad, MS (ed.), *Varian Gerakan Keagamaan* (Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, 2007); Syamsurrijal, "Jaringan Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Makassar Sulawesi Selatan"

³⁰ Syamsurrijal, "Jaringan Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Makassar Sulawesi Selatan."

³¹ Ibid.

Kalau mereka hanya meyakini secara pribadi, atau berdiskusi soal ideologi-ideologi tertentu kan tidak bisa dilarang. Nanti setelah nyata-nyata melakukan gerakan untuk, misalnya, mengubah bentuk negara, tentu tidak bisa dibiarkan. Misalnya, orang diskusi soal komunisme sebagai salah satu ideologi dunia, kita tidak bisa melarang, tetapi kalau misalnya sudah menjadi partai, misalnya PKI, itu yang tidak bisa dibiarkan.”³²

Sikap para pimpinan kampus ini karena bersandar pada kebebasan akademik dan apa yang disebutnya sebagai otonomi kampus. Hal itu juga ditegaskan oleh Sukri maupun Farida, dekan Fakultas Hukum.³³ Alasan ini memang menjadi problem tersendiri di dunia kampus, karena pada sisi tertentu kebebasan untuk berdiskusi, berkumpul apalagi jika hanya mendiskusikan pengetahuan dan ideologi tertentu memang tidak bisa dihalangi. Hanya saja jika tidak memperhatikan dengan seksama pula, bahwa beberapa kelompok tertentu sejatinya tidak hanya sekadar berdiskusi dalam konteks akademik, tetapi sebuah proses ideologisasi dan ada upaya membentuk paham keagamaan tertentu, maka hanya akan melempangkan jalan untuk tumbuhnya organisasi radikal di kampus.

Sejauh ini di pihak pimpinan di UNHAS, menurut keterangan Fajrul, memang pernah mengedarkan surat ke tiap fakultas dengan melampirkan surat dari Mendagri berkenaan dengan pelarangan organisasi tertentu. Akan tetapi, tidak memberi instruksi apapun terkait dengan pencegahan kelompok-kelompok radikal. Surat itu sendiri ketika dikonfirmasi ke pihak fakultas, ternyata mereka juga tidak tahu persis apakah pernah ada surat itu atau tidak.³⁴

Di tingkat universitas, pihak kampus memang rutin melakukan pengajian. Menurut penjelasan beberapa pimpinan fakultas, pengajian-pengajian semacam itu juga dimaksudkan untuk menanamkan pemahaman agama yang moderat dan mencegah tumbuhnya paham-paham yang ekstrem. Dalam pengajian kampus yang diundang adalah ustadz dari berbagai kalangan. Salah satunya yang menjadi langganan adalah salah satu dosen UNHAS sendiri Das'ad Latif. Juga sering memanggil Ustaz Abdul Somad dan beberapa dai dari Muhammadiyah, misalnya Prof Arifuddin Ahmad.³⁵ Belum ada data apakah ulama-ulama dari NU pernah diundang atau belum.

Pengajian itu sendiri, sejatinya tidak fokus untuk menanamkan pemahaman moderat. Tema-tema yang dibahas umum saja. Hanya karena dai-dai yang memberikan ceramah dikategorikan sebagai ustaz moderat, maka pengajian itu sendiri dianggap sebagai bagian dari penanaman nilai-nilai moderasi beragama bagi mahasiswa dan civitas akademika di UNHAS.

Proses penanaman nilai-nilai kebangsaan juga dilakukan pada saat penerimaan mahasiswa baru. Pada saat itu diberikan materi-materi yang dianggap sebagai penguatan nilai-nilai Pancasila bagi para mahasiswa baru. Pada saat itu juga para pemateri memberikan semacam himbauan agar bijak dalam memilih organisasi. Seperti disampaikan oleh Farida:

³² Wawancara dengan Sukri (Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sosial & Ilmu Politik UNHAS), 6 Februari 2020.

³³ Ibid.; Wawancara dengan Farida Patinting (Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS), 15 Februari 2020.

³⁴ Wawancara Fajrul (Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), 4 Februari 2020.

³⁵ Wawancara dengan Arifuddin Ahmad, pengurus Muhammadiyah, 9 Maret 2021.

Iya, kita tekankan dalam hal itu (penguatan kebangsaan), kita negara hukum, negara Pancasila, tentu kita tegaskan itu. Bahkan, ada surat pernyataan kepada mahasiswa baru yang isinya seperti itu (komitmen terhadap NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara). Kalau di penerimaan mahasiswa baru kan kita memberikan materi yang terkait dengan prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan dan kaitannya dalam negara hukum yang berdaulatkan (berdasarkan) Pancasila. Kita memang melakukan upaya agar mahasiswa kita tidak ekstrim. Silakan kita berbeda pendapat tapi jangan jadi ekstrimis.³⁶

Apa yang disampaikan oleh Farida ini, senada dengan pimpinan fakultas lainnya, sekaligus sama dalam hal memandang bahwa mahasiswa tidak bisa dibatasi untuk melakukan diskusi apa pun, termasuk dalam melakukan pengaderan. Seperti disampaikan Farida berikut ini:

Di sini sudah lama tidak mengeluarkan ijin. Mungkin secara personal ada mahasiswa kita, secara organisasi tidak ada. Tapi mereka tetap diberi ruang, kami tidak membatasi mereka untuk melakukan kajian sepanjang itu betul-betul sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Kita juga tidak mengekang mereka.³⁷

Menurut dekan fakultas Hukum ini, jika hanya diskusi biasa, mahasiswa, termasuk yang berafiliasi dengan HTI, diperbolehkan diskusi.

Kalau macam kegiatan kajian kecil, tidak perlu minta izin, kecuali kegiatan besar yang bersifat formal, melibatkan pembicara dari luar, kita wajibkan ada ijin dan kadang-kadang kita berdiskusi dengan mereka, kajiannya seperti apa (dan soal apa?). Karena mahasiswa kita kan dijamin kebebasan berbicara, tetapi dalam kebebasan itu ada tanggung jawab.”³⁸

Penjelasan Farida ini menunjukkan bahwa meski HTI dilarang, tetapi kegiatannya tidak otomatis dilarang, dengan catatan tentu saja tidak membawa simbol-simbol HTI atau mengatasnamakan HTI. Hal ini tentu saja memberikan ruang bagi organisasi mantel HTI seperti Gema Pembebasan dan LK Uswah. Karena itulah, sampai saat ini, seperti dijelaskan sebelumnya, organisasi mantel HTI masih aktif.

Merujuk pada pengertian Organisasi Masyarakat sebagaimana disebut dalam Perppu No.2 /2017 menegaskan bahwa: “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Berdasarkan itu, maka sebenarnya bukan hanya HTI yang perlu menjadi perhatian kampus, seluruh organisasi yang haluannya adalah

³⁶ Wawancara dengan Farida Patinting (Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS), 15 Februari 2020.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

mengganti dasar negara mestinya tidak diberikan ruang. Apalagi jika organisasi itu sebenarnya adalah organisasi mantel HTI. Hanya saja persoalan yang terakhir ini, karena memang banyak pejabat kampus yang juga tidak terlalu tahu persis atau tidak terlalu peduli dengan organisasi-organisasi mantel HTI.

Penegasan tersebut bahkan dimuat dalam Pasal 59 ayat 3. Di pasal itu salah satu butirnya adalah ormas dilarang menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Jika ada ormas yang melanggar ketentuan beberapa poin di pasal 59 ayat 3 ini, yang salah satunya seperti disebutkan tadi, maka menurut ketentuan Perppu bisa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Beberapa dosen yang ditengarai bergabung atau terlibat dalam organisasi HTI, sejauh dianggap tidak menyebarkan paham yang mereka yakini ke orang lain, juga tidak diberikan tindakan. Tentang hal ini dijelaskan oleh Sukri sebagai berikut:

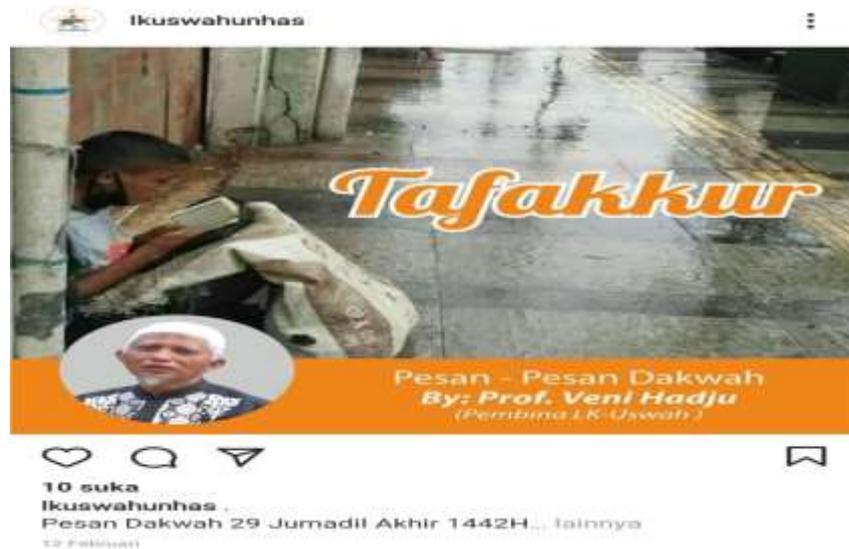
Yang pertama, ini kan akan repot memisahkan apa ini ruang privat atau publik. Kita kan tidak bisa melarang seseorang punya afiliasi dengan organisasi tertentu, sekalipun itu dosen, itu sulit. Tetapi, yang paling mungkin kita mesti memastikan, kalau itu ada, itu hanya menjadi ruang pribadi, tidak untuk *dishare* (sebar). Seperti pemahaman agama yah, silakan konsumsi untuk dirimu sendiri, kalau ada penyimpangan ya jangan *share* ke orang lain. Kan ada regulasi hal-hal yang sifatnya pribadi ya sah-sah saja, tapi kalau itu sudah keluar tentu akan berhadapan dengan regulasi. Ada beberapa nama saya pernah dengar, tapi yah... tidak ada sampai pemecatan karena kan sifatnya sejauh ini pribadi, kecuali menyebarkan, (tentu) bukan lagi berhadapan dengan regulasi UNHAS tetapi hukum negara. Yang kemudian ketika dia menjalani proses hukum, ya ini menjadi alasan UNHAS untuk menerapkan regulasinya juga.³⁹

Beberapa dosen yang selama ini dianggap memiliki afiliasi atau setidaknya punya kedekatan dengan LK Ushwah, organisasi mantel HTI di UNHAS, sampai saat ini masih sering memberikan kajian atau diskusi di lingkaran lembaga itu sendiri. Hal itu bisa dilihat dari beberapa flyer yang disebar oleh LK Uswah mengenai kegiatan diskusi mereka. Salah satunya seperti di bawah ini.

³⁹ Wawancara dengan Sukri (Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sosial & Ilmu Politik UNHAS), 6 Februari 2020.

Gambar 1

Poster Kegiatan LK-Uswah yang melibatkan seorang dosen



Kegiatan tersebut tidak dipersoalkan kampus meski dilakukan oleh LK-Uswah, karena dianggap hanya kajian agama biasa. Sementara seorang dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang jadi pembina sekaligus sering membawakan materi, juga tidak ada persoalan, karena LK Uswah dianggap bukan organisasi terlarang.

Sejauh ini UNHAS memang tidak mengeluarkan kebijakan represif terhadap mahasiswa atau dosen yang dianggap menjadi bagian dari organisasi terlarang seperti HTI. Karena tidak seperti IAIN Kendari yang memecat mahasiswa yang dianggap bagian dari HTI atau UMI Makassar mengeluarkan beberapa aturan tertentu untuk mengontrol kegiatan organisasi ekstra kampus, UNHAS hanya menekankan pada pengawasan. Di samping itu UNHAS berupaya membangun diskursus untuk menguatkan dan menanamkan paham kebangsaan bagi para Mahasiswa. Salah satunya dengan mendirikan Pusat Studi Pancasila.

Adapun organisasi keislaman lainnya yaitu salafi yang tidak masuk kategori terlarang, UNHAS memberikan ruang yang seluas-luasnya. Kelompok-kelompok salafi rata-rata menjadi pengurus LDK, dari tingkat universitas sampai fakultas. Hal ini karena dianggap kelompok-kelompok salafi sebatas medalami ibadah dan mendorong mahasiswa untuk memperbaiki ibadahnya.

Menyikapi permasalahan kelompok-kelompok intoleran dan radikal di kampus, kalangan NU dan Muhammadiyah memiliki pandangan yang berbeda. KH Dr. Afifuddin Haritsah, Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) NU Sulawesi Selatan sekaligus pimpinan pesantren al-Nahdlah Makassar, mendukung penuh jika kampus membuat kebijakan dan program untuk mengantisipasi berkembangnya organisasi Islamis-intoleran, apalagi yang anti Pancasila. Baginya, harus ada kebijakan tegas dari kampus yang bisa memotong dari generasi intoleran ini. Secara lugas, Kiai Afif menginginkan agar kelompok-kelompok ini betul-betul diidentifikasi kemudian diamputasi segala aktivitasnya.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan KH. Afifuddin (Ketua RMI dan Pimpinan Pesantren al-Nahdlah), 8 Maret 2021.

Ceramah-ceramah yang dilakukan sekali seminggu, dianggap tidak efektif. Menurut Kiai Afif, mereka sudah mengalami indoktrinasi, jadi tidak mungkin lagi bisa dipengaruhi hanya dengan ceramah sambil lalu. Ada tahapan yang telah dilalui oleh para kader-kader kelompok Islamis yang telah membuat pandangan keagamaannya berbelok sedemikian rupa. Tidak mudah untuk mengembalikannya.⁴¹ Karena itu, perlu ada pendampingan yang sungguh-sungguh mahasiswa. Kampus juga harus memberi kesempatan pada kelompok-kelompok Islam moderat untuk melakukan pengaderan.⁴²

Sementara itu, Prof. Dr. Arfuddin Ahmad, salah seorang pengurus Muhammadiyah Sulawesi Selatan menyatakan bahwa kita perlu mengetahui akar lahirnya kelompok-kelompok intoleran. Dalam pandangannya, ada tiga hal yang bisa menjadi penyebab menguatnya kelompok semacam ini di kampus. *Pertama*, kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. *Kedua*, tokoh-tokoh atau organisasi Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah dianggap tidak bisa lagi dijadikan rujukan dalam soal kesalehan dalam ibadah. *Ketiga*, pemahaman keagamaan yang skriptualis dan tekstual dari kelompok tertentu yang mempengaruhi mahasiswa.⁴³

Penyebab yang pertama adalah ranah dari pemerintah untuk mengoreksi kebijakannya. Sementara penyebab yang kedua, mengharuskan organisasi NU dan Muhammadiyah untuk kembali kepada khittahnya masing-masing. Selain itu harus mulai memperhatikan soal-soal kesalehan dan ibadah umat Islam. Selanjutnya mengenai persoalan kedua ini, para pengurus di dua organisasi tersebut, termasuk aktivis lembaga-lembaga yang merupakan *underbow*-nya, harus kembali memperhatikan aspek-aspek ibadah. Organisasi yang berafiliasi dengan NU dan Muhammadiyah yang ada di kampus, misalnya PMII dan IMM harus bisa mengelola masjid dan menjadi contoh kesalehan bagi mahasiswa yang lain.⁴⁴

Adapun persoalan ketiga yakni menguatnya paham-paham yang tekstualis di kalangan mahasiswa, menurutnya yang bisa dilakukan adalah memberikan diskursus perbandingan. Mereka tidak harus disingkirkan, tetapi didampingi. Dalam berbagai kegiatan mahasiswa, khususnya LDK, pihak kampus harus memberikan kesempatan kepada ulama-ulama atau akademisi yang berpikiran moderat ikut masuk memberikan materi.⁴⁵

Sekalipun memiliki perbedaan sudut pandang, namun keduanya jelas mendukung upaya-upaya kampus untuk menanggulangi perkembangan kelompok-kelompok islamis ini. Keduanya “menuntut” agar kelompok Muslim moderat diberi kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan kehidupan keislaman di dalam kampus.

Selain itu, beberapa LSM di Makassar saat ini memiliki kepedulian yang cukup tinggi atas perkembangan organisasi Islamis di kampus. Beberapa LSM, membentuk paguyuban yang disebut Aliansi Damai Makassar, Jalin Harmoni dan lain-lain. Salah satu programnya adalah menguatkan toleransi di kampus dengan mem-back up organisasi kemahasiswaan moderat agar mampu mengembangkan toleransi di masing-masing kampusnya.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

⁴³ Wawancara dengan Arifuddin Ahmad (Pengurus Muhammadiyah), 9 Maret 2021.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

Hanya saja, sampai saat ini, LSM tersebut belum bisa menyentuh LDK yang kebanyakan masih dikuasai oleh kelompok Islamis. Mereka juga belum memiliki program yang jelas untuk menguatkan toleransi di kalangan aktivis LDK tersebut.

Demikian halnya dengan organisasi-organisasi underbow NU dan Muhammadiyah, mereka masing-masing telah memiliki program mengenai penguatan moderasi beragama dan pendampingan masjid di sekitar kampus. Beberapa masjid kampus dan masjid sekitar kampus yang dulunya dikelola oleh para mahasiswa binaan kelompok islamis, kini sudah dikelola oleh mahasiswa binaan organisasi underbow NU tersebut.

III.3 Kehidupan Kampus Pasca-UU Ormas

Bagaimana perkembangan kelompok ini paska keluarnya Perppu No.2/2007? Beberapa dosen mensinyalir gerakan kelompok radikal mulai meredup di kampus UNHAS. Setidaknya, ada dua hal yang menjadi dasar. Pandangan beberapa akademisi UNHAS ini bisa dikatakan merupakan cara pandang para pimpinan atau pejabat kampus.

Pertama, yang menjadi fokus perhatian adalah kelompok HTI, khususnya karena HTI inilah yang terang-terangan dibubarkan dan kebetulan pernah berkembang pesat di UNHAS. Karena terlalu fokus pada HTI, mereka kurang memperhatikan kelompok salafi yang mengelola Lembaga Dakwah Kampus atau malah memang tidak menganggap sebagai kelompok yang perlu mendapat perhatian. Padahal Lembaga Dakwah Kampus, tidak selamanya bisa dianggap organisasi yang biasa-biasa saja, atau organisasi yang moderat. Beberapa LDK justru tempat bersarang kelompok Islamis yang berkarakter puritan, eksklusif, intoleran, bahkan radikal.

Kedua, organisasi semacam HTI memiliki beberapa organisasi mantel. HTI bisa tidak terlihat aktivitasnya, tetapi organisasi mantelnya bisa saja masih aktif dengan berbagai kegiatan. Apalagi kegiatan mereka saat ini juga kebanyakan dikomunikasikan bahkan dilaksanakan melalui media online.

Riset pemetaan kelompok-kelompok keagamaan oleh Litbang Agama Makassar menemukan bahwa kelompok-kelompok radikal masih aktif bergerak sekalipun tentu tidak seperti sebelumnya. HTI yang telah dibubarkan setelah keluarnya Perppu No.2/2017 masih aktif dengan berbagai kegiatan. Ada yang bermetamorfosis menjadi organisasi dan lembaga dengan nama yang berbeda, tetapi ada pula yang masih tetap berbendera HTI. Mereka bergerak secara senyap bawah tanah.

Kelompok Salafi

Proses pengaderan dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari pendampingan atau melakukan asistensi terhadap mahasiswa baru dalam hal pengetahuan dasar-dasar Islam, hingga pengaderan formal yang diadakan di luar kampus. Tentu saja hal ini dilakukan tidak langsung atas nama Wahdah Islamiah, tetapi melalui Lembaga Dakwah Kampus di beberapa fakultas dan juga melalui organisasi Mahasiswa Pencinta Masjid.⁴⁶

⁴⁶ Syamsurijal, "From Moderatism to Fundamentalism."

Selain masuk dalam LDK resmi, atau LDK yang telah menjadi bagian dari UKM, kelompok-kelompok salafi juga membentuk LDK yang tidak menjadi bagian dari Lembaga Intrakampus. Salah satunya adalah Lembaga Dakwa Mahasiswa (LDM) al-Aqsho. Model gerakannya tidak jauh berbeda dengan LDK lainnya yang juga berhaluan salafi. LDM al-Aqsho bahkan memiliki akun youtube untuk arena syiarnya.

Seperti organisasi Islam lainnya, salafi menjadikan pula mahasiswa baru sebagai sasaran utama. Untuk mengajak mahasiswa baru bergabung dalam kelompok salafi tertentu, dosen bahkan ikut berpartisipasi. Salah seorang siswa baru menyebutkan bahwa salah seorang dosen membuat semacam whatsapp grup dan melalui itu mencoba memperkenalkan LDK atau paham keagamaan salafi tertentu. Tidak hanya memperkenalkan tapi juga mengajak masuk.⁴⁷ Pola perekutan dan proses ideologisasinya juga nyaris tidak ada yang berubah.

Proses pembelajaran al-Qur'an dilakukan melalui dakwah fardiyah, yakni dakwah yang menjadi kewajiban tiap-tiap individu. Dalam dakwah fardiyah ini, satu orang mahasiswa senior yang merupakan kader dari salafi membimbing tiga sampai lima orang mahasiswa. Yang laki-laki, disebut dengan Ikhwan atau sebagai murabby, membimbing sesama laki-laki dan perempuan (akhwat/murabbiah) mendampingi sesamanya pula.

Dakwah fardiyah ini belum menekankan soal-soal yang biasa diperdebatkan (khilafiah) dalam Islam. Karena itu tahap pertama dari pendampingan terhadap mahasiswa ini disebut sebagai proses rekrutmen dan dakwah yang persuasif. Disebut demikian karena para pendamping belum mempersoalkan tradisi keagamaan yang dilakukan oleh kelompok lain. Kendati telah diberikan penjelasan bahwa hal-hal tersebut tidak boleh, tetapi mereka belum diajarkan untuk menyatakan hal itu ke orang lain.⁴⁸ Lembaga-lembaga dakwah di tingkat fakultas lebih banyak melakukan dakwah fardiyah, yaitu melakukan pendampingan pada kader baru.

Tahapan selanjutnya adalah mengajak mahasiswa untuk ikut *ta'lim syar'i*, mereka mengistilahkan dengan dakwah umum. Istilah *ta'lim syar'i* juga untuk menunjukkan bahwa *ta'lim* ini pelaksanaannya berdasar *syar'i*, misalnya, tidak membaurkan laki-laki dan perempuan.

Ta'lim syar'i adalah pengajian umum dengan tema aqidah dan fikih. Melalui tema-tema aqidah dan fikih itu, ustaz-ustaz mulai menyoroti persoalan aktual yang terjadi dan mulai menanamkan paham salafi yang mereka yakini. Dalam dakwah umum semacam ini paham-paham dari yang mereka anggap sebagai paham salaf mulai diperkenalkan.

Biasanya, setelah aktif mengikuti *ta'lim syar'i* ini, sikap menolak dan menganggap bid'ah paham dan tradisi keberagamaan kelompok lain mulai muncul. Keyakinan atas kebenaran yang disampaikan dalam kelompoknya semakin mengental. Pada tahap ini terjadi semacam indoktrinasi. Pada fase ini seseorang semakin mantap dengan apa yang menjadi ideologi keagamaannya, sekaligus bersikap anti pati terhadap pandangan atau paham kelompok lain yang dianggapnya tidak sesuai dengan pendapat kelompoknya.

⁴⁷ Wawancara Arya Faturrahman (Mahasiswa Baru Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial & Politik UNHAS, 24 Januari 2021.

⁴⁸ Syamsurijal, "From Moderatism to Fundamentalism."

Tahapan selanjutnya adalah proses pengaderan (*tarbiyah*). Tarbiyah ini berjenjang dari tingkat pemula, lanjutan, hingga pembina.⁴⁹ Tahap ini sebenarnya tidak dikhususkan bagi mahasiswa. Namun kalangan aktivis Studi Club Islam atau LDK yang dikuasai oleh kelompok salafi biasanya menjadikan tarbiyah ini sebagai ajang untuk melanjutkan bimbingan bagi mahasiswa yang telah direkrutnya. Lepas dari tahapan ini pandangan keagamaannya biasanya sudah semakin jelas dan tegas. Bisa dibilang, setelah fase *ta'lim syar'i* sebagai sebuah proses indoktrinasi, maka di fase ini seorang mahasiswa telah sampai pada tahap pematangan doktrin.

Para kader salafi yang sudah sampai mengikuti tarbiyah, sejatinya juga mencita-citakan bentuk negara khilafah. Bedanya dengan HTI adalah, bagi kaum salafi, sebelum menuju negara khilafah, terlebih dahulu yang harus diciptakan adalah masyarakat syar'i. Perjuangan Islam harus dilakukan melalui pendidikan dan kebudayaan, hingga akhirnya tercipta masyarakat Islami. Setelah masyarakat Islami tercipta, barulah bisa menuju tahap selanjutnya, yaitu mendirikan negara khilafah.⁵⁰

Proses perekrutan dan model gerakan seperti yang diuraikan di atas sejatinya adalah model yang sudah berlangsung sejak dulu. Proses rekrutmen dan gerakan ini tidak mengalami perubahan mendasar paska- keluarnya Perppu No.2/2017. Seperti dikatakan Thania Novita,⁵¹ masih seperti itu setelah keluarnya Perppu No.2/2017.

Seperti yang dikatakan Muhammad Akbar, ketua LDK Ibn Khaldun Fakultas Sosial dan Politik, secara umum, pembinaan pada kader-kader yang baru masuk dilakukan dengan belajar intensif yang disebut tarbiyah, pertemuan rutin setiap pekan dan materinya terstruktur. Kedua, ada namanya *tahsin*, secara umum disebut perbaikan bacaan al-Qur'an. Kemudian ada kegiatan tambahan yaitu *ta'lim*, kajian, seminar Al Quran, pelatihan *design grafis*, pelatihan khutbah, dan pengurusan jenazah.⁵²

Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Akbar:

Ada namanya dakwah fardiyah atau dakwah perorangan, dengan sistem satu kader dua dampingan, satu pengurus bisa mendekati dua orang calon anggota. Baik pendekatan melalui bidang ilmu masing-masing kemudian disisipkan pengenalan lembaga. Kader ini kita bantu jika ada diskusi mengenai keilmuannya. Di FISIP ada tujuh jurusan dan banyak anggota LDM yang tersebar di jurusan tersebut, sehingga memungkinkan untuk berdiskusi tentang keilmuan masing-masing, kemudian disisipkan pengenalan lembaga.⁵³

Selain proses pengaderan, seperti diuraikan di atas, hingga saat ini kelompok salafi di kampus masih sering pula melakukan seminar keislaman, diskusi di halaman-halaman kampus atau di pelataran gedung tertentu. Model

⁴⁹ Tim, *Selayang Pandang Wahdah Islamiyah* (Makassar: Departemen Informasi dan Komunikasi Wahdah Islamiyah, 2004).

⁵⁰ Wawancara dengan Muhammad Akbar (Ketua LDK Ibn Khaldun), 25 Januari 2021.

⁵¹ Wawancara Thania Novita (Alumni Lembaga Dakwah Mahasiswa Assyariah Fakultas Hukum UNHAS), 24 Januari 2020.

⁵² Wawancara dengan Muhammad Akbar (Ketua LDK Ibn Khaldun), 25 Januari 2021.

⁵³ Ibid.

diskusinya dengan membagi secara ketat yang mana ruang untuk kalangan perempuan dan yang mana tempat diskusi untuk laki-laki.

Pemateri yang diundang, sebagaimana yang dikatakan oleh Thania dan Akbar, rata-rata berasal dari Wahdah Islamiah. Misalnya, Ustadz Zaitun Rasmin, Ketua Umum Wahdah Islamiah dan salah satu pentolan Aksi 212. Selain Zaitun Rasmin, ada Ustadz Yousoffan dan Ustadz Herman Tajang.⁵⁴ Kedua orang terakhir ini adalah tokoh-tokoh salafi di Makassar dan aktif di Wahdah Islamiah. Selain itu, ada juga Ustaz Zulkarnaen, dari jaringan Wahdah Islamiyah yang memiliki reputasi di level nasional.⁵⁵

Dengan demikian, khusus untuk kelompok salafi, tidak ada perubahan signifikan dalam pergerakannya di kampus UNHAS. Kelompok ini berinfiltrasi di LDK, lalu melalui Lembaga ini merancang pendidikan atau ideologisasi paham salafi ke mahasiswa. Infiltrasi kelompok salafi di LDK jelas dari nama-nama pemateri yang mereka undang dalam kegiatan-kegiatan seminar. Selain itu Andi Malik Rahman dengan terang menyebutkan bahwa yang menjadi mentor-mentor mereka adalah dari MPM, sementara MPM ini sendiri untuk menentukan siapa yang menjadi mentor selalu berkoordinasi dengan Wahdah Islamiah.

Kalau pun ada yang sedikit berbeda setelah keluarnya Perppu tersebut, tidak lain intensitas diskusi rutin di pelataran kampus. Setelah Perppu, demikian pengakuan Akbar maupun Thania, diskusi rutin di kampus tidak seintensif dulu lagi. Ada sedikit pembatasan dari pimpinan kampus dalam menggelar acara-acara diskusi. Tetapi menurut Fajrul, salah satu dosen yang juga selama ini mengamati perkembangan gerakan keislaman di UNHAS, berkurangnya diskusi-diskusi di kampus bukan karena ada aturan tegas dari kampus, tetapi karena memang terjadi kelesuan dan kemalasan mahasiswa mengikuti diskusi.⁵⁶

Namun penglihatan Fajrul bisa jadi kurang tepat karena aktivitas mereka beralih melalui online. Pola penyebaran pemahaman salafi dilakukan melalui penyebaran konten-konten kajian keislaman melalui media sosial. Kegiatan kampus, berupa diskusi berkurang, tetapi penyebaran dakwah-dakwah atau diskursus keislaman menurut pemahaman salafi gencar dilakukan melalui Instagram dan Youtube. Selain itu, diskusi-diskusi juga dilakukan melalui media sosial, semacam *line*.⁵⁷ Saat ini, ketika menggunakan zoom semakin populer, mereka juga rutin melakukan diskusi melalui media tersebut. Hal ini diakui oleh seluruh pengurus dari LDK di UNHAS yang sempat diwawancarai. Keaktifan LDK ini mengampanyekan paham-paham salafi melalui media sosial terlihat pada beberapa flayer di akun Instagram mereka, di antaranya seperti di bawah ini:

⁵⁴ Ibid.; Wawancara Thania Novita (Alumni Lembaga Dakwah Mahasiswa Assyariah Fakultas Hukum UNHAS), 24 Januari 2020.

⁵⁵ Wawancara dengan Andi Malik Rachman (Pengurus Lembaga Dakwah Mahasiswa An-Nahl Fakultas Peternakan UNHAS), 25 Januari 2021.

⁵⁶ Wawancara Fajrul (Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), 4 Februari 2020.

⁵⁷ Beberapa akun instagram kelompok salafi antara lain: @ldkmpmunhas; @ldmibnukhaldun; @ldmdarulilmi_febuh, @ldmaladabfibuh. Sedang akun youtube antara lain: MPM Unhas, al-Adab TV FIB-UH, Ibnu Khaldun Official.

Gambar 2:
Penyebaran Konten Digital



Akbar, misalnya menyebutkan, syiar keislaman yang dilakukan di LDM sekarang ini memanfaatkan media sosial, misalnya, line, instagram, fanpage FB dan youtube. Mereka juga melakukan pelatihan yang terkait dengan media online agar mereka bisa menyampaikan gagasan atau syiar dengan menarik dan disukai oleh khalayak, khususnya kalangan mahasiswa. Di antaranya mereka melakukan pelatihan desain grafis dan konten media online.⁵⁸

HTI dan Mantelnya

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, HTI adalah salah satu organisasi yang cukup berkembang di UNHAS. Sebelum keluarnya Perppu No.2/2017, HTI Chapter bersama Gema Pembebasan sangat aktif dengan berbagai kegiatan. Gerakannya berjalan cukup intens. Dakwah tersebut dilakukan dalam tiga tahap, *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan), *tafaaul ma'al ummah* dan *istilaful hukmi*.⁵⁹

Tatsqif (pembinaan dan pengkaderan) adalah tahap yang paling banyak dan paling intensif dilakukan di kampus UNHAS. Model pengkaderannya dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perekrutan calon kader. Proses perekrutan ini dilakukan dengan beberapa cara, yakni:

1. Jaringan interpersonal. Mahasiswa yang sudah menjadi kader HTI mencari calon mahasiswa yang dikenal, terutama sesama alumni sekolah menengah atau hubungan kekerabatan. Cara ini biasa digunakan dalam berbagai organisasi untuk merekrut anggota. Demikian juga, cara ini biasa digunakan untuk merekrut anggota dalam aliran atau sekte keagamaan tertentu. Dalam bahasa Dawson, modus perekrutannya keluarga mencari keluarga, teman merekrut teman, dan tetangga menarik tetangga.⁶⁰ Cara ini bisa efektif dengan

⁵⁸ Wawancara dengan Muhammad Akbar (Ketua LDK Ibn Khaldun), 25 Januari 2021.

⁵⁹ Team, *The Methodology of Hizbut Tahrir for Change* (London: Al-Khilafah Publications, 1999).

⁶⁰ Lorne L. Dawson, "Who Joins New Religious Movements and Why: Twenty Years of Research and What have We Learned?," dalam Lorne L. Dawson (ed.), *Cults and New Religious Movements: A Reader* (USA, UK and Australia: Blackwell Publishing, 2003).

catatan para kader intens mendata jaringan yang memiliki hubungan emosi dengan mereka dan segera melakukan kontak jika diyakini telah lulus di UNHAS.

2. Jaringan siswa yang sebelumnya telah didampingi semasa SMA.
3. Kegiatan seminar atau diskusi. Kegiatan ini sebenarnya memiliki banyak fungsi. Pertama, fungsi pembinaan. Ini disebut dengan *tatsqif jama'i* atau melakukan pembinaan terhadap kader secara umum. Dalam pembinaan model ini, kader diberi pemahaman tentang isu-isu tertentu, baik lokal maupun global dan bagaimana cara HTI meresponsnya. Karena kegiatan ini juga dibuka untuk umum, maka melalui *tatsqif jama'i* ini, HTI juga berinteraksi dengan publik secara umum agar ide-idenya dikenal. Dengan sendirinya, melalui kegiatan ini HTI juga sudah mulai masuk pada tahap kedua dari dakwahnya yakni *tafa'ul maal ummah*, berinteraksi dengan masyarakat. Sekaligus pada saat kegiatan ini pula, aktivis HTI bisanya melakukan pendekatan pada mahasiswa tertentu untuk direkrut menjadi kader.

Setelah proses perekrutan, dimulailah proses pengaderan dan pembinaan. Pengaderan dilakukan dalam sistem yang disebut dengan *daurah*. Para peserta yang baru direkrut dikader untuk memahami pemikiran dari Taqiuddin al-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Pengaderan dan pembinaan kader juga dilakukan dalam bentuk diskusi rutin di kampus dan juga melalui penyelenggaraan seminar.

Di UNHAS yang melakukan hal ini tidak atas nama HTI, tetapi organisasi mantelnya, antara lain melalui forum kajian seperti Humaniora, Lembaga Kajian Uswah dan juga Gema Pembebasan. Di Lembaga Dakwah juga ada tetapi tidak signifikan karena sudah dikuasai oleh Wahdah Islamiah.⁶¹ Perlu dicatat di sini, bahwa HTI telah terbiasa berkamufase dengan berbagai organisasi mantelnya. Sebelum lahirnya Perppu Ormas, HTI menggunakan organisasi mantel dalam berbagai kegiatan agar aktivitas yang digelar dikesankan dilakukan kelompok netral.

Seminar dan diskusi publik yang dilakukan adalah juga bagian dari membina kader, tetapi juga memperkenalkan gagasan pada publik. Biasanya seminar-seminar yang dilakukan mengambil tema-tema yang memang menjadi aspirasi rakyat, misalnya, kenaikan BBM, kelangkaan elpiji, melambungnya harga kebutuhan pokok, dan berbagai isu populis lainnya. Dalam seminar itu HTI tidak melihat persoalan itu secara mikro dan solusi langsung untuk mengatasi masalah. Persoalannya selalu dilarikan pada sistem demokrasi yang tidak bisa menjawab persoalan serta problem liberalisme dan kapitalisme. Solusinya adalah khilafah. Di UNHAS pernah digelar seminar "Selamatkan kekayaan Indonesia Timur, Cegah Disintegrasi Bangsa, dan Bangun Bangsa yang Besar dengan Khilafah". Seminar ini berbicara tentang banyaknya kekayaan yang di Indonesia Timur yang hanya dikuasai dan dikelola oleh segelintir konglomerat. Tahap ini akhirnya sampai pada tahap ketiga, yakni *istilamul hukmi*, yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah.

Gerakan HTI dalam kampus lebih ditekankan pada pengaderan, pembinaan, seminar, diskusi mingguan, propaganda melalui terbitan buletin, selebaran dan aksi-aksi demonstrasi. Hal ini bisa dilihat pada program-program yang dilakukan oleh Gema Pembebasan, antara lain:

- a. Dialog pembebasan tiap pekan;
- b. Diskusi GARIS (Gagasan Strategi Revolusioner), mengangkat isu-isu aktual;

⁶¹ Wawancara Fajrul (Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), 4 Februari 2020.

- c. Dialogika, yaitu diskusi hal-hal yang bersifat strategis;
- d. Kunjungan politik ke lembaga gerakan lain.

Bagaimana gerakan HTI setelah keluarnya Perppu No.2/2017, dan bersamaan pada tahun itu juga organisasi tersebut resmi dibubarkan?

HTI sebagai satu organisasi memang tidak ada lagi di UNHAS. Begitupun Chapter HTI yang masih menggunakan simbol-simbol HTI. Diskusi-diskusi yang mengatasnamakan Perempuan HTI yang biasanya dilaksanakan sekali seminggu juga tidak ada lagi. Sejak resmi dibubarkan, HTI tidak berani lagi menunjukkan simbol-simbolnya di kampus UNHAS. Segala aktivitas yang mengatas namakan HTI setelah resmi dibubarkan tidak diperbolehkan.

Tetapi seperti disebutkan sebelumnya, HTI selalu memiliki organisasi mantel. Di antaranya adalah Gema Pembebasan yang sejak semula memang telah besar di UNHAS. Meski saat ini beberapa aktivis Gema Pembebasan dengan tegas telah menolak dianggap bagian dari HTI, tetapi kini ideologi gerakan dari HTI ada pada organisasi ini. Setidaknya mereka memiliki cita-cita yang sama.

Gambar 3

Lambang HTI dan Lambang Gema Pembebasan



Gema Pembebasan inilah yang sampai saat ini masih ada. Organisasi ini masih memiliki pengurus, bahkan juga memiliki kantor atau sekretariat. Muh. Yusuf menyebutkan bahwa sekretariat mereka pindah-pindah disesuaikan dengan kemampuan menyewa tempat.⁶² Sementara Habibullah, Ketua Gema Pembebasan saat ini mengaku, sebelum merebaknya pandemi, mereka masih memiliki sekretariat, tetapi sekarang karena mahasiswa jarang yang ke Makassar, kuliah kebanyakan *daring*, maka sekretariatnya belum ada lagi yang tetap.⁶³

⁶² Wawancara dengan Muh. Yusuf (Alumni Aktivis GEMA Pembebasan Komisariat UNHAS). 25 Januari 2020.

⁶³ Wawancara dengan Muh. Habibullah (Ketua GEMA Pembebasan Komisariat UNHAS), 31 Januari 2020.

Gambar 4

Sekretariat Gema Pembebasan dan Aktivitas setelah Keluarnya Perppu



28 suka

gpkomisariatunhas Rapat Persiapan Training Pembebasan #1...

Aktivitas Gema Pembebasan masih tetap mirip dengan sebelum keluarnya Perppu No.2/2017. Pola perekrutannya masih tetap mengandalkan strategi interpersonal. Habibullah menyebut strateginya sebagai pendekatan personal.

Kalau pola perekrutan, strateginya secara personal. Kalau yang bersangkutan nyambung frekuensi, kita ajak mereka gabung. Kita melihat dari wawasan, karakter, hingga kesiapan dia, nanti kemudian kita perkenalkan. Sedikit-sedikit (pelan-pelan) dia kami ajak ke acara kami, diperkenalkan sedikit demi sedikit mengenai Gema. Jika mereka nyaman dan setuju, kami ajaklah mereka bergabung.⁶⁴

Cara ini sebenarnya taktik lama. Hanya saja kesulitan mereka sekarang adalah mencari jaringan kader-kader mereka yang ada di SMA atau Madrasah Aliyah. Sebelumnya mereka tidak kesulitan mencari jaringan dari siswa SMA/MA yang masuk ke UNHAS sebab mereka memiliki kader-kader di ROHIS. Sekarang Rohis di SMA/MA telah diawasi dan dibina oleh guru-guru pembina di sekolah masing-masing. Karena itu, pendekatan interpersonal ini hanya dilakukan terhadap kenalan, adik alumni di SMA atau juga terhadap keluarga.

Para kader Gema Pembebasan juga rutin menyambangi mahasiswa-mahasiswa baru yang ada di asrama dan kos. Calon mahasiswa atau mahasiswa yang dianggap kritis terhadap demokrasi, liberalisme dan kapitalisme akan didekati terus menerus. Mahasiswa semacam itu dianggap memiliki kesamaan atau satu frekuensi. Aktivis Gema Pembebasan juga dalam mencoba menggaet para calon kader memang lebih banyak berdiskusi pada soal-soal kapitalisme, demokrasi, HAM dan liberalisme. Sesuatu yang memang sering kali disenangi mahasiswa, apalagi jika bersikap kritis terhadap isu-isu tersebut. Mereka tidak

⁶⁴ Ibid.

langsung memperkenalkan ideologi khilafah. Sebelum keluarnya Perppu No.2/2017, seperti diakui oleh salah satu aktivisnya yang bernama Akmal, pendekatan ke mahasiswa di Asrama sampai mengagendakan diskusi rutin dari asrama ke asrama. Kini hal tersebut tidak dilakukan lagi. Diskusi lebih banyak dilakukan secara personal, dari orang ke orang.

Selain itu, kegiatan-kegiatan diskusi, masih rutin dilakukan. Gema Pembebasan mengistilahkan diskusi rutin mereka sebagai GARIS (Gagasan Strategis Revolusi). Diskusi ini mengangkat isu-isu tertentu, termasuk kebijakan pemerintah. Di antara yang menjadi bahasannya adalah korupsi dan rezim oligarki. Mereka juga masih aktif melakukan kegiatan yang disebut sebagai kunjungan politik dan Fokus Group Discussion (FGD) dengan beberapa himpunan, BEM, dan organisasi pergerakan di UNHAS seperti IMM, HMI, dan KAMMI.⁶⁵

Dari penjelasan beberapa aktivis Gema Pembebasan, sekalipun tidak leluasa seperti dulu, agenda-agenda gerakan tetap berjalan.⁶⁶ Selain itu, proses pengaderan yang disebutnya training pembebasan dalam kampus, sebelum pandemi Covid-19 juga masih berjalan. Kalau dulu biasanya dilakukan dalam kampus minimal tiga kali dalam setahun, kini mereka banyak melakukannya di luar kampus. Pengaderan yang dilakukan di luar kampus ini biasanya dirangkaikan dengan *tadabbur alam*. Dengan melakukan pengaderan di luar kampus, mereka juga menghindari kontrol dan pengawasan pihak kampus.

Yang berbeda saat ini, adalah intensitasnya. Mereka tidak bisa seintensif dulu melakukan kegiatan tersebut karena pihak kampus telah membatasi diskusi mereka. Beberapa orang yang disebut intel kampus oleh aktivis Gema Pembebasan ini, sering mengawasi kegiatan mereka dan menanyakan sedang melaksanakan kegiatan apa.⁶⁷

Tetapi karena Gema Pembebasan adalah organisasi yang tidak dilarang dengan asumsi mereka bukan bagian dari HTI, para aktivis Gema Pembebasan masih bisa leluasa menyebarkan ideologi dan paham-paham mereka kepada mahasiswa yang lain. Apalagi saat ini penyebaran gagasan itu bisa dilakukan melalui media sosial. Mereka juga saat ini banyak memanfaatkan zoom untuk melakukan diskusi. Aktivitas melalui zoom ini tentu saja sulit untuk dihentikan oleh pihak kampus, apalagi jika diskusi itu hanya disebar di kalangan tertentu secara rahasia.

Salah satu kegiatan yang terpantau dari diskusi *streaming* Gema Pembebasan ini adalah Mimbar Pembebasan, "Nestapa 97 tahun Tanpa Khilafah". Kegiatan ini dilakukan oleh Gema Pembebasan Sulawesi Selatan, yang aktivisnya banyak dari mahasiswa UNHAS. Gema Pembebasan Sulawesi Selatan ini mewadahi atau tempat koordinasi bersama komisariat-komisariat Gema Pembebasan di kampus-kampus di seluruh Sulawesi Selatan.

Jika kita mengamati akun-akun instagram Gema Pembebasan, seperti @gpkomisariatunhas dan gp_teknikuh, flyer-flyer yang mereka bentangkan adalah hal-hal yang menunjukkan resistensi mereka terhadap pemerintah dan berbagi kebijakannya. Sesekali menampilkan informasi tentang training pembebasan yang

⁶⁵ Wawancara dengan Muh. Yusuf (Alumni Aktivis GEMA Pembebasan Komisariat UNHAS). 25 Januari 2020.

⁶⁶ Ibid.; Wawancara dengan Muh. Habibullah (Ketua GEMA Pembebasan Komisariat UNHAS), 31 Januari 2020.

⁶⁷ Ibid.

akan diadakan. Ada pula seruan aksi damai membela seorang mahasiswa yang bernama Hikmah Sanggala yang di dikeluarkan dari kampus IAIN Kendari karena menjadi aktivis HTI (aktivis Gema Pembebasan). Mahasiswa ini dikeluarkan berdasarkan SK Rektor Kedari No.0653/2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Mahasiswa IAIN Kendari.

Salah satu organisasi mantel HTI di UNHAS adalah Lembaga Kajian Ukhuwah Mahasiswa Islam UNHAS (LK Uswah).⁶⁸ Kelompok ini aktif sekali melakukan rekrutmen, bahkan dalam satu kali pengaderan bisa merekrut lima puluh samai tujuh puluh mahasiswa. Kelompok ini aktif kajian di kampus dan juga di masjid sekitar kampus, salah satunya di Masjid Ramsis. Kini mereka tidak seaktif dulu lagi dalam kajian-kajian langsung atau yang *offline*.

LK Uswah termasuk Lembaga Kajian yang masih aktif sampai saat ini di UNHAS. Di akun instagramnya, '@Ikuswahunhas', terlihat beberapa postingan mereka yang menunjukkan aktivitas mereka di Unhas. Termasuk kunjungan ke pejabat-pejabat kampus. Dalam postingan mereka, selain tentang kegiatan diskusi yang terkait dengan tema-tema keagamaan, juga menampilkan beberapa dukungan terhadap HTI. Misalnya terlihat pada flyer di bawah ini:

Gambar 5
Dukungan Lembaga Kajian Uswah pada HTI



Dengan demikian, gerakan HTI setelah keluarnya Perppu No.2/2017 di kampus UNHAS tidak serta merta berhenti. Kepiawaian mereka dalam bermetamorfosis dalam bentuk organisasi yang berbeda telah banyak menolong keberlangsungan dari penyebaran ide-ide dan ideologi mereka.

Ada dua strategi yang bisa disimpulkan, yang mereka terapkan hingga dapat tetap eksis di kampus-kampus, termasuk di UNHAS sampai sekarang ini. Pertama, infiltrasi ke dalam Lembaga Dakwah Kampus. Setelah berhasil

⁶⁸ Wawancara Fajrul (Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), 4 Februari 2020.

mempengaruhi aktivis LDK atau studi club tertentu, maka ideologi mereka tanamkan melalui program yang ada pada LDK tersebut. HTI tidak mengubah organisasinya, tetapi isi dari pengaderan, materi dari diskusi diwarnai oleh mereka. Kedua, strategi mantel, yakni HTI membentuk organisasi yang tidak lagi mengatas namakan HTI. Organisasi tersebut terkesan netral dan sepintas isu-isu yang diangkat adalah persoalan yang terjadi di masyarakat. Organisasi tersebut bahkan terkesan kritis karena banyak mengkritisi kapitalisme dan liberalisme. Isu semacam itu digemari oleh mahasiswa gerakan. Dengan dua strategi tersebut, saat ini mereka masih bisa mempropagandakan ideologi mereka ke para mahasiswa. Dengan cara itu pula, pihak kampus tidak bisa membubarkan, karena mereka dianggap bukan HTI.

III.4 Penutup

Perkembangan organisasi Islamis di kampus UNHAS bisa dirunut ke belakang sejak era pasca-Reformasi. Setidaknya, ada dua organisasi Islamis-radikal yang berkembang di kampus tersebut: HTI dengan beberapa organisasi sayapnya dan salafi yang menguasai LDK universitas dan fakultas.

Setelah keluarnya Peperes No.2/2017, organisasi Islamis tersebut tidak serta merta hilang. Kelompok salafi tetap eksis seperti semula dan secara resmi mengelola LDK yang menjadi salah satu organisasi intrakampus di bawah UKM. Kegiatan dan aktivitas kelompok ini juga tidak berubah, kecuali intensitas yang menurun khususnya di masa pandemi ini.

Sementara HTI yang telah dibubarkan, memang sudah tidak ada, tetapi organisasi sayap atau organisasi mantelnya masih eksis. HTI memang tidak menggunakan lagi simbol dan nama HTI, tetapi melakukan penyebaran paham melalui organisasi-organisasi mantel tersebut. Kalaupun organisasi tersebut menegaskan, mereka tidak ada kaitan secara organisasi dengan HTI, tetapi ideologi dan cita-cita tidak berbeda jauh dengan HTI.

Dalam menyikapi keberadaan kelompok-kelompok tersebut di kampus, pihak pejabat kampus tampak kesulitan mengambil kebijakan yang tegas. Terhadap kelompok salafi, UNHAS bisa dikatakan tidak mengambil kebijakan apapun karena kelompok salafi bukan organisasi terlarang. Kelompok ini bahkan "diberi" ruang untuk menguasai LDK yang berarti keberadaannya secara resmi diterima dan diakui. Sedang kepada HTI, pihak kampus mengalami dua kendala. HTI saat ini tidak menggunakan nama dan simbol HTI, tapi bergerak melalui lembaga-lembaga mantelnya yang keberadaannya, menurut pimpinan, tidak bisa dilarang karena bukan sebagai organisasi terlarang. Sedang keberadaan orang-orang yang berideologi HTI pun tidak bisa dikenai pelarangan karena itu bersifat pandangan pribadi.

Kebijakan yang bisa diambil adalah mendirikan Pusat Studi Pancasila yang sampai saat ini belum terlihat jelas fungsinya dalam konteks deradikalisasi kehidupan kampus. Kebijakan yang lain adalah penanaman nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan kepada mahasiswa baru untuk mengantisipasi agar mahasiswa tidak terjebak ke dalam kelompok-kelompok ekstremis.

IV. UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

Di wilayah Malang, Jawa Timur, penyebaran ideologi radikal pada tahun 2014 telah melahirkan kelompok yang menyatakan dukungan dan sumpah setia

(baiat) terhadap jaringan teroris internasional ISIS. Baiat tersebut dilaksanakan di sebuah masjid Dusun Sempu, Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Malang. Di Lokasi acara, kelompok tersebut memasang sebuah poster besar bertuliskan "Sosialisasi dan Deklarasi Anshorul Khilafah" yang kemudian pada sesi akhir acara mereka bersama-sama menyatakan dukungan dan sumpah setia kepada pemimpin ISIS, Abu Bakar Al- Baghdadi.⁶⁹ Secara khusus di lingkungan perguruan tinggi, Direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol Hamli, pada tahun 2018 menyatakan bahwasannya mahasiswa Universitas Brawijaya (UB), Malang telah terpapar paham radikalisme.⁷⁰

Laporan tersebut merupakan gambaran riil atas maraknya penyebaran ideologi ekstremisme di Indonesia. Penyebaran ideologi ekstremisme di perguruan tinggi bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Setidaknya hal itu dapat dilacak melalui pengaruh alumni Timur Tengah di era Orde Baru ketika menguasai masjid Salman ITB. Bermula dari diskusi atau halaqah-halaqah di masjid, penyebaran ideologi ekstremisme semakin berkembang.⁷¹

Sasaran para alumni halaqah masjid Salman ITB adalah kampus-kampus umum yang notabene tidak memiliki tradisi keislaman kuat. Misalnya kampus Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Institute Teknologi Surabaya, dan lainnya. Kampus-kampus tersebut merupakan ladang subur bagi persemaian ideologi fundamentalisme oleh para alumni masjid Salman ITB.

Tidak mengherankan jika di era pasca-Reformasi, persemaian ideologi ekstremisme sangat marak di perguruan tinggi sekular ketimbang di perguruan tinggi Islam. Berbagai macam penelitian dari kampus-kampus tersebut tentang perkembangan gerakan Islam transnasional telah menunjukkan bagaimana kuatnya dominasi kelompok ini di kampus. Universitas Brawijaya Malang adalah salah satu perguruan tinggi negeri di mana kelompok-kelompok radikal radikal berkembang dan menancapkan dominasinya.

IV.1 Kehidupan Organisasi Kemahasiswaan

Persemaian ideologi radikal maupun ekstremis di kampus seperti UB bukan kali pertama terjadi di perguruan tinggi di Indonesia. Sejarah gerakan mahasiswa telah mencatat bahwa sejak era Orde Baru, kampus telah menjadi salah satu bagian dari lahan subur persemaian ideologi radikal dan ekstremisme, meski dengan kadar yang berbeda.

Potensi tersebut sangat terbuka mengingat kampus merupakan tempat yang netral sehingga memungkinkan tersebarnya gagasan radikal dan ekstremis. Hal ini dapat dilihat dari adanya organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra-kampus yang banyak diminati oleh mahasiswa. Sebut saja organisasi ekstra kampus yang berbasis Islam misalnya Pergerakan Mahasiswa Islam

⁶⁹ Tempo. *Sumpah Khilafah di Ladang Tebu, Sekelompok orang di Malang, Solo dan Jakarta secara terbuka Mendukung ISIS*. Internet, (diakses pada 24 Maret 2021).

<<https://majalah.tempo.co/read/nasional/145946/sumpah-khilafah-di-ladang-tebu>>

⁷⁰ Kementerian Dalam Negeri, *BNPT Klaim Data Mahasiswa 'Radikal' Dari Penelitian*. Internet, (diakses pada 22 Maret 2021). <<https://litbang.kemendagri.go.id/website/bnpt-klaim-data-mahasiswa-radikal-dari-penelitian/>>

⁷¹ Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal* (Jakarta: Erlangga, 2004).

Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Ketiga organisasi ekstra tersebut kurang mendapat peminat dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa lebih minat dengan organisasi intrakampus seperti organisasi mahasiswa yang dinaungi oleh jurusan, fakultas, maupun universitas. Maka dari itu, organisasi seperti PMII, HMI, maupun IMM sulit mengembangkan dirinya di perguruan tinggi, lebih-lebih memiliki pengaruh di kampus tersebut.

Selain itu juga, alasan lain yang menyulitkan organisasi seperti PMII, HMI, maupun IMM adalah karena ketiga organisasi tersebut tidak masuk dalam jajaran posisi strategis di kampus seperti ketua eksekutif mahasiswa dan sejenisnya. Struktur Eksekutif Mahasiswa sudah sejak lama dikuasi oleh organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Secara genealogis, ideologi KAMMI merupakan kepanjangan tangan dari Ikhwanul Muslimin di Indonesia. KAMMI hadir untuk mengkader mahasiswa agar memiliki tujuan politik yang berlandaskan syariat Islam.⁷²

Mahasiswa yang memiliki kecenderungan dan girah “memperjuangkan” ideologi Islam, akhirnya memilih untuk membentuk kelompok-kelompok Islam sayap kanan atau yang condong ke arah islamisme. Berkembanglah, misalnya, kelompok salafi di Lembaga Dakwah Kampus, di Masjid Kampus dan masjid-masjid fakultas, serta muncullah Chapter HTI di fakultas-fakultas, khususnya di Fakultas-fakultas Saintek.

Lembaga Dakwah Kampus sebagai Tempat Persemaian Ideologi Radikal

Salah satu lembaga dakwah Islam yang paling banyak diminati dan memiliki pengaruh besar di UB adalah Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Lembaga ini merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang berfokus pada bidang kerohanian di kampus. Di UB, lembaga LDK berkembang di fakultas-fakultas dan memiliki peminat yang cukup banyak jika dibandingkan dengan organisasi mahasiswa Islam lainnya. Hal ini membuat kesempatan persemaian ideologi Islamisme semakin terbuka lebar.

Secara historis, LDK bermula dari masjid Salman ITB. Mahasiswa muda yang turut serta dalam perkembangan awal lembaga ini adalah Soeliaman, Ahmad Sadali, Nukman. Setelah itu terdapat generasi penerus yang berperan besar dalam mengembangkan sayap LDK yaitu Imaduddin Abdurrahim. Melalui Imaduddin, pengkajian Islam di Masjid Salman ITB kemudian berkembang di masjid-masjid kampus di seluruh Indonesia. Imaduddin sendiri menjabat sebagai Ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam, sebuah lembaga otonom di bawah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dari sinilah tonggak sejarah gerakan Lembaga Dakwah Kampus dimulai.⁷³

Seiring berjalannya waktu, kelompok LDK semakin berkembang pesat di perguruan tinggi di Indonesia, terutama di perguruan tinggi umum. Kedisiplinan mereka dalam mempraktikkan ajaran Islam dari sumber buku Ikhwanul Muslimin, terutama konsep Tarbiyah, membuat mereka secara tidak sadar menjadikan konsep tarbiyah sebagai landasan pembinaan. Dengan kata lain, semua marhalah

⁷² Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 44.

⁷³ Eep Abdullah Fatah, *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Demokratisasi Pasca Orde Baru* (Bandung Mizan, 2000), 248.

tarbiyah, dari tabligh, ta'lim, takwin, dan tanfidz harus dilalui sebagai pembinaan. Lama-kelamaan penggunaan istilah ini menjadi populer untuk menyebut kelompok pengajian di kampus.⁷⁴

Secara teologi, LDK dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ideolog Ikhanul Muslimin seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutb dan tokoh lain yang diperkenalkan oleh Imaduddin di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, ideologi IM diposisikan sebagai dasar-dasar ideologi LDK.

Beberapa prinsip pemikiran IM yang disosialisasikan dalam LDK, antara lain; Islam merupakan ajaran yang bersifat sempurna. Islam telah mengajarkan seluruh tatanan kehidupan manusia. Islam tidak memisahkan antara yang sakral dan profane, yang transenden dan yang temporal. Konsep pemahaman ini lazim disebut sebagai Islam kaffah, yaitu wujud pemahaman Islam menyeluruh, menjangkau semua aspek dan dimensi kehidupan; duniawi-ukhrawi, jasmani-ruhani, ubudiyah-mu'amalah, sosial-politik, kultural-struktural dengan jargon *Islam din wa Dawlah*. Pemikiran Islam kaffah semacam ini dapat ditemukan dalam pemikiran tokoh gerakan IM seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, dan Mustafa Masyhur.⁷⁵

Gerakan LDK di UB tersebar di beberapa fakultas dan yang paling dominan adalah fakultas eksakta. Istilah yang digunakan di UB untuk kelompok LDK tingkat fakultas adalah Lembaga Dakwah Fakultas (LDF). Dari LDF inilah program-program LDK di UB dijalankan, mulai dari pengkaderan, mentoring, liqo', pengajian, dan lain sebagainya. Keanggotaan LDF terdiri dari beragam ormas keagamaan, salah satunya HTI. Menurut Tio, dibekukannya LDF Fakultas Peternakan disebabkan karena banyak ditemukan anggota HTI di lembaga tersebut, sehingga pihak kampus mengambil tindakan untuk membubarkan.⁷⁶

Gerakan LDK dapat berkembang dan bertahan di UB disebabkan karena kekuasaan eksekutif mahasiswa dipegang oleh organisasi ekstra kampus KAMMI. KAMMI, sama halnya dengan LDK, merupakan lembaga kemahasiswaan yang secara kultural mengikuti PKS. Kedua organisasi ini dapat bekerjasama untuk mempertahankan pengaruh dominasi di UB, sehingga hal itu menyulitkan bagi organisasi lain seperti PMII, IMM, maupun HMI untuk menguasai kampus. Menurut Faith, hubungan antara KAMMI dan LDK dekat, terutama perihal ideologi. Lebih lanjut Faith menjelaskan bahwa:

Organisasi kemahasiswaan yang mana para anggota dan akitivisnya banyak terlibat dan mempunyai ideologi yang sama, atau minimal dekat, dengan kelompok ekstremis adalah Organisasi KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Para aktivis ini pula yang dalam beberapa tahun terakhir dalam sejarahnya selalui menguasai BEM kampus. Sehingga, hal ini juga berpengaruh pada perkembangan kelompok ekstremis di kampus mengingat bahwa para aktivis ini memiliki power dan pengaruh di lingkungan mahasiswa, maka mereka dengan mudah pula melakukan perekrutan untuk mendapatkan anggota baru.⁷⁷

⁷⁴ Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Mudah Muslim Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2004), 132.

⁷⁵ Rahmat, *Ideologi Politik PKS*, 104.

⁷⁶ Wawancara dengan Tio Sanbuki (Ketua LDF FIB--Generasi Qurani-GENQ), 13 Februari 2021.

⁷⁷ Wawancara dengan Faith (Aktivis PMII dan Gusdurian Malang), 10 Februari 2021.

IV.2 Kebijakan Deradikalisasi

Laporan BNPT yang memasukkan UB sebagai salah satu perguruan tinggi terpapar radikal membuat sejumlah kalangan pejabat kampus seakan tidak percaya. Bahkan pada saat laporan tersebut rilis, pihak rektor menepis anggapan bahwa UB termasuk kampus yang memiliki jumlah anggota maupun partisipan kelompok radikal di Indonesia. Namun pada saat data dibuka oleh Polda Jatim dan BNPT akhirnya pihak rektorat baru memercayai data tersebut.

Sebelum pemerintah mengeluarkan Perppu No. 02/2017, pihak rektorat—dalam hal ini diwakili oleh staff Warek I—memberikan informasi bahwa tidak ada batasan bagi dosen maupun pejabat kampus untuk berafiliasi dengan organisasi Islam tertentu, misalnya seperti HTI. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa:

Pada masa rektor sebelumnya, banyak dekan yang terafiliasi pada kelompok-kelompok ekstremis (HTI) dan menurutnya ini tidak diantisipasi karena memang pada saat itu, organisasi HTI dan ideologinya adalah organisasi legal yang diakui oleh pemerintah. Namun, pasca-Pilkada Jakarta pada tahun 2017 dengan munculnya polarisasi identitas berbasis agama di kalangan masyarakat yang mana peristiwa tersebut menampakkan dengan jelas bahwa kelompok-kelompok ekstremis radikal jelas terlihat sebagai sebuah ancaman serius pada persatuan bangsa Indonesia”.⁷⁸

Gambaran terkait dengan adanya dosen yang terpapar paham ekstremis dapat dibuktikan dengan penyebaran narasi-narasi keagamaan yang mengarah ke paham ekstremis. M. Fadhillah Putra, Wakil Direktur Pascasarjana UB, mengatakan bahwa WhatsApp Group (WAG) menjadi habitat para dosen yang terpengaruh paham ekstremis untuk menyebarkan gagasan dan pandangan keagamaan yang eksklusif-fundamentalis.⁷⁹

Aktivitas dosen dalam menyebarkan dan mengadakan kegiatan yang mengarah pada paham ekstremis mulai menurun ketika Perppu No.2/2017 dikeluarkan oleh pemerintah. Pada dosen yang sebelumnya memiliki afiliasi kelompok keagamaan terkena imbas aturan tersebut. Akan tetapi, gerakan mereka kemudian berpindah ke luar kampus.

Menurut Arief Andy Suwarko, dikeluarkannya Perppu No. 2/2017 tidak membuat jera para dosen. Para dosen yang sebelumnya aktif dalam menyebarkan ideologi ekstremis di kampus kemudian beralih untuk menyebarkan di luar kampus. Lebih lanjut Arief Andy mengatakan bahwa:

Mereka bergerilya dengan mengadakan pengajian-pengajian. Di lingkungan fakultasnya (Fakultas Ilmu Komunikasi) sudah tidak ada lagi kegiatan yang diadakan oleh kelompok ekstremis karena informan telah mengusirnya melalui WAG. Persitiwa tersebut terjadi ketika pada masa tidak lama setelah munculnya Perppu Ormas, sebagian dosen yang berafiliasi dengan kelompok ekstremis masih saja mengadakan pengajian yang dibungkus dalam acara “*mabit*” di lingkungan FILKOM dan mengatasnamakan institusi (FILKOM) juga.⁸⁰

⁷⁸ Wawancara dengan Arief Andy Soebroto (Staff Warek I), 08 Februari 2021.

⁷⁹ Wawancara dengan M. Fadhillah Putra (Wakil Direktur Pascasarjana), 31 Januari 2021.

⁸⁰ Wawancara dengan Arief Andy Soebroto (Staff Warek I), 08 Februari 2021.

Dengan melihat gambaran tentang adanya aktivitas gerakan ekstremis di kampus UB, baik dari pihak dosen dan mahasiswa, pihak rektorat kemudian mengambil kebijakan untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran ideologi ekstremis lebih luas lagi. Akan tetapi, kebijakan dari rektor dalam menanggulangi penyebaran paham ekstremis di UB masih tidak konsisten. M. Fadhillah mengatakan bahwa:

Sampai saat ini belum ada (kebijakan yang secara tegas melarang kelompok radikal di kampus). Seharusnya kebijakan yang diambil oleh Rektor adalah melarang kegiatan kelompok radikal, atau paling tidak dalam kasus penguasaan masjid kampus dan UAKI, rektor seharusnya sudah mengganti orang-orang yang menguasai dua pos strategis tersebut karena kedua pos tersebut selama bertahun-tahun telah mejadi sarang kelompok radikal di kampus. Sayangnya dalam hal ini, rektor tidak mengambil tindakan tegas untuk mengganti mereka, terutama jabatan ketua takmir. Padahal ketua takmir saat ini secara jelas merupakan bagian dari kelompok yang sering menyuarakan Islam radikal di lingkungan kampus.⁸¹

M. Fadhillah mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh rektor dirasa tidak terlalu berdampak signifikan. M. Fadhillah menambahkan bahwa tidak ada kebijakan khusus dari rektor pasca Perppu No.2/2017 dikeluarkan. Hal ini yang membuat adanya kelonggaran dari pihak rektorat setelah Perppu No.2.2017 dikeluarkan oleh pemerintah. Tiadanya kebijakan khusus menyusul dikeluarkannya Perppu No.2/2017 membuat sejumlah aktivitas kelompok ekstremis masih ada sampai saat ini.

Menurut Faisal Aminuddin, sebenarnya pihak rektorat telah menyusun draft peraturan rektor. Namun untuk mengesahkan peraturan tersebut harus melalui persetujuan senat universitas. Sementara, 30% dari total senat universitas adalah dosen-dosen yang notabene lebih dekat dengan kelompok Islamis. Oleh karena itu, draft peraturan rektor masih belum bisa disahkan.⁸²

Meski demikian, masih ada upaya lain yang dilakukan oleh rektorat dalam menanggulangi penyebaran ideologi ekstremisme sekaligus sebagai respon adanya Perppu No.2/2017. Kebijakan ini bersifat informal. Misalnya rektor memanggil beberapa dosen yang menjadi anggota kelompok Islam ekstremis. Rektor memanggil beberapa orang yang dianggap dekat dengan kelompok-kelompok radikal ini untuk bersumpah setia dan komitmen kepada NKRI dengan konsekuensi jika mereka masih terlibat dengan kelompok-kelompok radikal ekstremis, maka jabatan dan kenaikan pangkat mereka yang menjadi pertarungan.

Meskipun demikian, Aminuddin menambahkan bahwa rektor saat ini bisa dan sudah melakukan banyak hal, terutama mengganti pejabat-pejabat kampus yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan dengan figure-figur dari kelompok moderat.

Tapi walaupun begitu, pak Rektor sudah melakukan banyak hal. Mencopot orang-orang yang terindikasi berafiliasi dengan kelompok ekstremis dari

⁸¹ Wawancara dengan M Fadhillah Putra (Wakil Direktur Pascasarjana UB), 31 Januari 2021

⁸² Wawancara dengan Faisal Aminuddin (Staff Rektor dan Ketua Dewan Pengawas Masjid Raden Patah UB), 17 Februari 2021.

jabatan-jabatan strategis. Kalau mereka tidak punya jabatan kan mereka tidak bisa menggunakan fasilitas-fasilitas kampus lagi, misalnya, mushalla atau masjid, untuk kepentingan kelompoknya. Dulu itu, ketika kita masuk masjid kampus, isinya itu bikin emosi saja. Tapi, sekarang tidak bisa. Semua yang diundang oleh Takmir (untuk mengisi kajian atau khutbah), sekarang haru melalui persetujuan rektor. Apalagi gerakan-gerakan politik yang secara terang-terangan anti-NKRI.⁸³

Di sisi lain, informan juga menjelaskan mekanisme kultural lain yang selama ini dilakukan oleh pihak kampus dalam mencegah persebaran ideologi dan gerakan ekstremis radikal di UB adalah dengan cara membatasi agenda kegiatan. Misalnya, ketika HTI ingin mengadakan acara di lingkungan UB, informan dan teman-teman moderat lainnya langsung melapor pada rektor.

Misalnya nih, pada suatu ketika salah satu fakultas (FISIP) mengadakan sebuah acara yang mengundang Ust. Bachtiar Nasir untuk menjadi penceramah. Saya tahu yang mengundang ini wakil dekan tiganya karena memang orangnya agak '*kenceng*'. Saya ya mengatasinya secara informal saja dengan menghubungi Rektor. Pak Rektor kemudian menghubungi dekan dan mengatakan, "Acara ini tidak saya ijin". Nah dekannya kan kemudian nelephon si Wadek ini dan mengatakan, "Pak wakil, saya sebagai dekan tidak mengijinkan". Kan akhirnya si Wakil Dekan ini tidak berani, karena kalau ia menolak berarti kan dia melanggar sumpah jabatannya untuk setia pada pimpinan. Jadinya, kelompok-kelompok radikal tidak bisa masuk kampus kan. Tapi ya begitu, informal mekanismenya; dan ini jadinya kan tergantung rektornya. Kalau rektor dan dekannya keras (tegas) kan ya beres."⁸⁴

Pembatasan yang diterapkan oleh pihak rektorat sejatinya telah menurunkan agenda penyebaran paham ekstremisme di UB. Pasalnya menurut pengakuan dari beberapa informan dalam bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa pembatasan kegiatan tersebut menyulitkan mereka untuk melakukan aktivitas seperti sebelum adanya Perppu No.2/2017. Meski belum maksimal, namun langkah tersebut setidaknya telah berhasil meminimalisasi aktivitas kegiatan kelompok radikal.

Selain pembatasan kegiatan-kegiatan kelompok esktremis melalui LDK maupun LDF, pihak kampus di sisi lain juga seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan keislaman ala kelompok moderat, misalnya, peringatan Hari Santri dan Konser Shalawat.

⁸³ Wawancara dengan M. Faisal Aminuddin (Staff Rektor dan Ketua Dewan Pengawas Masjid Raden Patah UB), 17 Februari 2021.

⁸⁴ Ibid.

Gambar 6:
Kegiatan Islam Moderat



Menurut Andi Suwarko, salah satu langkah yang tidak kalah penting yang dilakukan oleh pihak kampus adalah dengan menghidupkan UKM keagamaan lain yang bernama “Seni Religi”. Secara tidak langsung, UKM Seni Religi ini bisa dikatakan sebagai UKM alternatif yang dibentuk untuk mengambil alih dominasi UAKI sebagai satu-satunya UKM keislama di level kampus. Seni Religi difokuskan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan keislaman yang bernuansa moderat di lingkungan UB. Misalnya, para pengurusnya didorong untuk mengadakan *event* keislaman (seperti lomba) berskala nasional maupun internasional. Acara ini, menurut informan saat ini memang sudah dipersiapkan. Informan juga mencanangkan agar UKM Seni Religi juga membuat program *tahfidz* di setiap fakultas, sehingga mahasiswa UB yang tertarik dengan kegiatan keagamaan bisa terwadahi dan lebih memilih Seni Religi dibandingkan dengan UAKI yang agak susah untuk diambil alih karena dominasi orang-orang di dalamnya yang berafiliasi dengan paham radikal. Pun demikian, Lembaga Dakwah Fakultas juga diharapkan tertarik untuk lebih merapat pada UKM Seni Religi yang mempunyai semangat untuk menyebarkan Islam moderat dibandingkan dengan UAKI.⁸⁵

Kebijakan kampus untuk mempersempit gerakan kelompok-kelompok radikal bukannya tidak dilematis bagi masyarakat sekitar. Menurut Mujid Shovy, ketua MWC NU Lowokwaru, terbitnya Perppu No.2/2017 membuat buah simalakama sendiri. Di satu sisi peraturan tersebut hadir untuk menanggulangi penyebaran ideologi ekstremisme di perguruan tinggi, namun di sisi lain gerakan ekstremisme yang semula terpusat di kampus pada akhirnya melakukan aktivitas kegiatan di luar kampus. Hal ini akan mempersulit pantauan dari kampus itu sendiri.⁸⁶ Buktinya adalah aktivitas kelompok ekstremis mengalihkan kegiatannya di masjid luar kampus, seperti masjid Abu Dzar al Ghiffari, Masjid Utsman bin Affan, dan masjid al Muhajirin.

Sekalipun demikian, menurutnya, aktivitas kelompok ekstremis semakin menurun setelah ada Perppu No. 2/2017 meski tidak terlalu signifikan. Kegiatan mereka yang selama ini tidak ada yang mengontrol, kini membuat pihak-pihak di

⁸⁵ Wawancara dengan Arief Andy Soebroto (Staff Warek I), 08 Februari 2021.

⁸⁶ Wawancara dengan Gus Mujib Shovy (Ketua MWC NU Lowokwaru), 16 Februari 2021.

luar kampus mau tak mau turut serta dalam mengawasi dan mengontrol aktivitas kelompok ekstremis di kampus. Gus Mujib juga menyatakan bahwa sebelumnya banyak masjid NU yang dijadikan basis berkegiatan oleh kelompok ekstremis HTI. Namun saat ini sudah ada kesadaran dan upaya untuk merebut kembali masjid-masjid tersebut. Dengan munculnya kesadaran ini pula, kelompok ekstremis juga agak kesusahan untuk mengadakan kegiatan di masjid-masjid umum (awalnya milik kelompok moderat yang dikuasi oleh merek dan saat ini kembali diambil alih oleh kelompok moderat), belakangan ini, kelompok-kelompok ekstremis mulai membangun basis sendiri di beberapa masjid yang memang dari awalnya berafiliasi dengan kelompoknya.

Misalnya, masjid Al Ghiffari yang berada di sebuah perumahan. Awalnya, masjid ini lebih diwarnai oleh kegiatan-kegiatan kelompok moderat. Namun saat ini sudah jauh berbeda. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid ini lebih bersifat Islamis dan radikal. Menurut informan, hal ini terjadi karena memang letak masjid tersebut berada di lingkungan perumahan, maka agak sulit untuk mengontrolnya.

Gus Mujib juga berkoordinasi dengan pihak ibu-ibu kampung yang sering mengadakan kegiatan keagamaan rutin di lingkungannya dengan mewanti-wanti untuk tidak sembarangan mengundang pembicara untuk mengisi kajian. Informan meminta kelompok kajian ibu-ibu tersebut untuk berkoordinasi dengannya jika ingin mengundang tokoh agama untuk mengisi ceramah.

Gus Mujib dan anggota NU lainnya telah beberapa kali membubarkan kegiatan yang diadakan oleh kelompok HTI. Misalnya, acara HTI di alun-alun Malang yang bertepatan dengan acara *Istighosah Kubro* PWNU di GOR Sidoarjo. Ia dan kelompoknya berbagi tugas, ada yang fokus mengikuti kegiatan istighosah di Sidoarjo dan ada yang mengkondisikan untuk membubarkan acara HTI di Malang. Pun demikian dengan acara HTI yang mengundang Ismail Yusanto di sebuah gedung jalan Nusakambangan yang akhirnya dibubarkan juga.

Dalam upaya untuk membubarkan acara ini, kolega informan tidak mengatasnamakan NU namun menggunakan nama Masyarakat Malang Raya. Hal ini dilakukan biar NU tidak mendapatkan tekanan paska-aksi pembubaran tersebut. Selain itu, acara lain yang pernah dibubarkan juga adalah acara HTI di Hotel Rado pada tahun 2019. Alasan yang seringkali digunakan adalah bahwa masyarakat Malang yang telah hidup damai dan berdampingan tidak mau dibikin rusuh dengan kehadiran kelompok-kelompok ekstremis radikal seperti HTI yang penetrasinya dilakukan melalui kajian-kajian keagamaan.

Selain itu, informan juga seringkali dimintai pertimbangan oleh rektor jika ingin mengangkat pejabat di lingkungan kampus seperti dekan dan sebagainya. Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa ketika rektor mengangkat seorang dekan atas pertimbangan dari informan, dekan yang baru diangkat ini kemudian diminta berbaiat untuk setia dan memperjuangkan kepentingan kelompok Islam moderat; artinya memberantas gerakan kelompok-kelompok ekstremis keagamaan.⁸⁷

⁸⁷ Wawancara dengan Gus Mujib Shovy (Ketua MWC NU Lowokwaru), 16 Februari 2021.

IV.3 Kehidupan Kampus pasca-UU Ormas

Di UB, kelompok LDK telah berhasil menguasai kajian agama baik tingkat fakultas maupun universitas. Berbagai agenda keagamaan pun sering dilakukan mulai dari perekrutan, pelatihan awal hingga akhir, dan pengajian. Kegiatan tersebut sebelum keluarnya Perppu No.2/2017 berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun. Namun ketika Perppu No. 2/2017 keluar terjadi perbedaan meski tidak terlalu signifikan.

Pada kenyataannya, tidak ada perubahan secara signifikan dari adanya Perppu No. 2/2017. Seperti yang diungkapkan oleh Jodi Setiawan, salah seorang ketua LDK UB, yang mengatakan bahwa hingga saat ini kajian-kajian keagamaan di lingkungan UB masih dilakukan. Di antaranya adalah “Kismala”, kajian tematik menjelang maghrib yang biasanya dilakukan setiap hari Senin dan Kamis yang biasanya di waktu sebelum pandemi dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Sedangkan untuk kajian khusus perempuan diwadahi dalam kajian yang bernama “Kiswah”.

Ketika peneliti menanyakan, apakah ada tema khusus yang diangkat dalam kajian tersebut yang mengarah pada pembahasan kelompok tertentu yang dianggap sesat, informan menjelaskan bahwasannya tema-tema seperti itu sejak adanya Perpu Ormas sudah semakin dihindari. Alasannya adalah karena kelompok kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan semakin diawasi oleh pihak rektorat. Mereka kemudian menggunakan tema-tema umum, seperti “Memahami Esensi Ajaran Islam” yang kemudian di dalamnya tidak jarang pula dibahas tentang persoalan akidah yang salah satu tujuannya adalah untuk membentengi umat Muslim dari aliran-aliran yang dianggap sesat.

Ada sensitifitas dari pihak rektorat jika membahas tentang kelompok tertentu. Pihak takmir masjid kampus pun mewanti-wanti agak tidak ada tema yang membahas tema tentang kelompok tertentu. Hal itu terjadi mulai tahun 2017, mas. Kegiatan UAKI mulai lebih dipantau oleh rektorat. Pun demikian pada tahun 2019, pada masa pilpres.⁸⁸

Kegiatan mentoring atau *liqo'* sampai sekarang pun masih berjalan yang mana kegiatan ini ada jenjang tahapannya. Di UAKI sendiri ada empat level kegiatan kaderisasi, Dauroh Tariqiyah (DT) 0 yang lebih fokus pada pengenalan, DT 1 (untuk yang baru menjadi anggota), DT 2 (anggota yang diproyeksikan sebagai pengurus), DT 3 (anggota yang diproyeksikan menjadi mentor).

Sedangkan untuk *liqo'* dilaksanakan untuk anggota yang sudah masuk dalam UAKI. *Liqo'* ini merupakan sebuah kelompok kajian yang dibina oleh seorang mentor/ustad. Selama masa pandemi ini kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara online, kadang melalui zoom atau vidcall WA.⁸⁹

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Fahmi Arrasyid. Ia mengemukakan bahwa kelompok-kelompok ekstremis masih melanjutkan agendanya meskipun dalam kadar intensitas yang berbeda. Mereka mengadakan kegiatannya melalui kajian-kajian agama Lembaga Dakwah, baik di tingkat fakultas maupun universitas, seperti *liqo'* atau mentoring. Karena saat ini masih dalam masa

⁸⁸ Wawancara dengan Jodi Setiawan (Ketua LDK UB/ UAKI-Unit Aktivitas Keagamaan Islam), 10 Februari 2021.

⁸⁹ Ibid.

pandemi, kegiatan tersebut masih dilaksanakan, namun via daring; misalnya melalui google meet, zoom, atau WhatsApp.⁹⁰

Tujuan dari adanya kegiatan-kegiatan tersebut menurut Tio Sanbuki adalah untuk mencetak kader yang berhaluan Islam kaffah. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa:

Kegiatan yang diadakan oleh Syiar ini berfokus untuk membentuk pribadi muslim biar punya pemahaman dan bisa mempraktikkannya sebagai muslim yang baik. Selain itu kajian yang diadakan juga membahas tentang permasalahan kontemporer.⁹¹

Meski demikian, tidak semua LDF di UB masih leluasa berkegiatan pasca dikeluarkannya Perppu No.2/2017. Menurut Tio Sanbuki, dampak yang paling dirasakan atas dikeluarkannya peraturan tersebut ada di LDF Peternakan. Hal ini dikarenakan kebanyakan pengurus di LDF Fakultas Peternakan banyak yang merupakan kader dari organisasi HTI. Sehingga, LDF di Fakultas Peternakan ini dibekukan oleh kampus dan hingga saat ini tidak ada lagi lembaga dakwah fakultas di Fakultas Peternakan. Lebih lanjut, informan mengatakan bahwa LDF Fakultas Peternakan ditengarai berafiliasi kepada kelompok HTI karena mereka pernah mengajukan proposal pendanaan kegiatan yang di kemudian hari terlacak oleh pihak fakultas. Hal inilah yang menyebabkan LDF Fakultas Peternakan di bubarkan. Secara objektif, informan mengatakan bahwa sebagai anggota LDF sendiri juga tidak bisa mengidentifikasi kader-kader yang sebenarnya berafiliasi terhadap kelompok radikal-ekstremis.⁹²

Dampak lain yang diterima oleh LDK adalah keterbatasan melakukan kegiatan. Meskipun pada kenyataannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LDK setelah adanya Perppu No.2/2017 masih berlangsung, namun hal itu semakin dibatasi. Gerak aktivitas LDK telah dimonitori oleh pihak rektorat sehingga mereka tidak leluasa lagi untuk melakukan aktivitas sebagaimana sebelum adanya peraturan tersebut. Hal ini dirasakan oleh Fathiya Ihsani yang mengatakah bahwa:⁹³

Biasanya kita tuh ngadain mentoringnya di daerah kampus gitu kan ya; itu biasa seperti di halaman kampus atau di taman; terbuka aja gitu loh. Nah setelah adanya Perppu itu, kita jadi lebih berhati-hati dalam memilih tempat, gitu ya. Soalnya bisa jadi nanti dibubarkan. Dulu seingat saya pernah ada yang dibubarkan oleh Satpam. Jadi untuk pemilihan tempat harus lebih berhati-hati dan menjaga kerahasiaan.⁹⁴

Fathiya Ihsani juga menambahkan bahwa untuk melakukan kegiatan pasca dikeluarkannya Perppu No.2/2017 adalah dengan bentuk kegiatan yang lebih 'soft'. Caranya adalah dengan menjemput bola, yakni mendatangi dan menyapa mahasiswa untuk diajak berinteraksi dan berdiskusi dengan tema-tema keislaman.

⁹⁰ Wawancara dengan Fahmi Arrasyid (Ketua Lembaga Dakwah Fakultas—An-Nahl 2017-2018), 10 Februari 2021.

⁹¹ Wawancara dengan Tio Sanbuki (Ketua LDF FIB / Generasi Qurani-GENQ), 13 Februari 2021.

⁹² Ibid.

⁹³ Wawancara dengan Fathiya Ihsani (Sekretaris Deperatmen Mentoring UAKI), 23 Februari 2021.

⁹⁴ Ibid.

Namun seiring berjalannya waktu, pengawasan dari pihak kampus semakin redup. Hal ini disebabkan karena semakin kendornya pengawasan yang diberikan oleh pihak kampus terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LDK. Ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh kampus hanya pada saat setelah dikeluarkannya aturan itu, namun ketika dua tahun telah berlalu kampus sudah tidak lagi terlalu banyak mengawasi. Meskipun secara psikologis, dampak yang dialami oleh para pengurus dipandang negatif oleh sebagian mahasiswa, namun hal itu hanya bertahan dua tahun saja pasca dikeluarkannya Perppu No.2/2017.⁹⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ayuna tentang keluasaan berkegiatan semenjak adanya kelonggaran dari kampus. Ayuna mengatakan bahwa:

Kegiatan-kegiatan tersebut masih berjalan seperti biasa. Untuk mentoring masih tetap ada. Untuk pelaksanaan mentoring sekarang sudah leluasa lah. Bisa di lingkungan kampus, di taman-taman kampus. Tidak yang kayak dulu.⁹⁶

Ketika peneliti menanyakan terkait penyelenggaraan kegiatan mentoring di masjid, informan pun menjawab bahwasannya mentoring saat ini sudah bisa dilakukan di masjid juga. Lebih lanjut, informan mengatakan bahwa hal ini terjadi karena memang pelarangan kelompok ekstremis di lingkungan UB sudah tidak terlalu ketat seperti dulu.⁹⁷

Aktivitas lainnya yang masih terlihat adalah masih adanya perekrutan dan kaderisasi yang dilakukan oleh LDK, baik ditingkat fakultas maupun tingkat universitas. Menurut Ayuna Putri Alifia dan Muhammad Syafi'i, upaya perekrutan anggota baru sampai saat ini masih dilakukan. LDK sebagai lembaga UKM kampus memanfaatkan waktu orientasi mahasiswa baru untuk memperkenalkan organisasinya sekaligus berupaya merekrut anggota baru. Secara spesifik, Muhammad Syafi'i lebih lanjut mengatakan bahwa:⁹⁸

Yang paling berpengaruh dalam menyebarkan paham-paham ini ya LDK dan masjid-masjid di sekitar kampus, mas. Karena, masjid-masjid ini memang banyak mengadakan kegiatan kajian-kajian. Di antara masjid itu ya kayak Masjid Al- Muhajirin, Masjid Qolbun Salim, Masjid Abu Dzar Alghiffari, sama Masjid Usman bin Affan. Dan, saya pernah jadi takmir masjid di sana (Masjid Usman bin Affan), mas. Itu memang berafiliasi ke PKS. Masjid-masjid itu bersinergi dengan organisasi-organisasi seideologi (LDK) terus kemudian merambah ke kampus. Keegiatannya memang kecil, mas, tapi rutin. Biasanya ramennya itu pas hari Senin dan Kamis, mas. Pas waktu buka puasa karena mereka menyediakan makanan untuk berbuka. Setiap kajiannya kalau lagi rame biasanya yang ikut bisa lima puluhan orang mungkin ada lah, mas.... Dulu pas saya masih jadi takmir di Masjid Usman bin Affan, kalau lagi buka puasa (Ramadhan) pasti jamaahnya membeludak, karena memang dari LDK kampus juga memberikan informasi lewat media sosialnya terkait masjid-masjid yang menyediakan buka puasa. Dan, sebelum buka di masjid-masjid

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Wawancara dengan Ayuna Putri Alifia (Aktivis Unit Aktifitas Keagamaan Islam / LDK UB), 23 Februari 2021.

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Wawancara dengan Muhammad Syafi'i (Takmir Masjid Kampus), 10 Februari 2021.

itu diadakan kajian-kajian. Di masjid-masjid itu ketika sepuluh hari terakhir puasanya biasanya pengurus masjidnya mengadakan i'tikaf. Mereka yang mengikuti program ini memang full difasilitasi, mulai sahur sampai buka puasa. Mereka yang mengikuti program ini ya tinggal di masjid, mandinya juga di sana.

Cara di atas kemudian didukung dengan adanya persebaran pamflet tentang LDK di media sosial, seperti di Instagram dan membuat video pengenalan yang disebar ke para mahasiswa. Di masa pandemi, cara tersebut masih efektif untuk merekrut anggota baru. Menurut pengakuan Fathiya, pada tahun 2020 jumlah pendaftar masih terhitung cukup banyak yaitu mencapai 140 orang.⁹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa cara rekrutmen via online masih dapat mendatangkan jumlah anggota baru yang cukup banyak.

Selain pada saat sesi pengenalan UKM LDK sebagai momen untuk merekrut anggota baru dan pengenalan di media sosial, LDK di UB juga melakukan pola rekrutmen secara personal. Strategi perekrutan ini disampaikan oleh Jodi yang mengatakan bahwa:¹⁰⁰

Ketika seorang anggota kelompok Isam tertentu yang sekaligus menjadi anggota UAKI mengenal temannya yang mempunyai minat untuk belajar agama, maka orang ini kemudian mendekati yang bersangkutan dan diajak diskusi tema-tema umum keislaman. Kemudian barulah yang bersangkutan diajak mengikuti kegiatan kajian yang diselenggarakan oleh kelompoknya”.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok LDK di atas dapat berjalan apabila sumber pendanaannya stabil. Di LDK UB sumber pendanaan yang diperoleh melalui tiga jalur. Jalur pertama adanya keterlibatan dosen maupun senior sebagai sumber pendaan. Kedua, dari lembaga filantropi dari luar kampus seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSA). Ketiga, *saving* dana kegiatan yang dibiayai oleh kampus melalui LDK. Dari ketiga sumber tersebut menjadikan kegiatan-kegiatan LDK berjalan lancar.

Dari sumber pendanaan yang pertama menunjukkan bahwa dosen dan/atau senior terlibat dalam aktivitas LDK di UB. Dosen dan/atau senior, selain sebagai sumber pendanaan, juga dimintai untuk bertugas mengisi pengajian yang diadakan oleh LDK di UB. Beberapa informan LDK dalam penelitian ini mengakui bahwa dosen dan/atau senior terlibat dalam aktivitas dan kegiatan yang diselenggarakan oleh LDK. Bahkan menurut Bima Arya, ada beberapa dosen yang yang menjadi mentor bagi mahasiswa dan seringkali mengadakan *liqo'* di rumahnya. Ia menambahkan bahwa hal ini dapat memudahkan tersebarnya ideologi radikal di kalangan mahasiswa.¹⁰¹

Sementara itu, sumber pendanaan kedua menunjukkan adanya keterlibatan lembaga dari luar kampus yang memberikan dukungan atas kegiatan-kegiatan LDK di UB. Keterlibatan lembaga luar kampus menunjukkan jaringan LDK tidak hanya bergerak di dalam kampus, melainkan juga di luar kampus. Hal ini memungkinkan adanya dukungan moril dari luar kampus ketika LDK ditekan oleh

⁹⁹ Wawancara dengan Fathiya Ihsani (Sekretaris Deperatmen Mentoring UAKI), 23 Februari 2021.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Jodi Setiawan (Ketua LDK UB / UAKI-Unit Aktivitas Keagamaan Islam), 10 Februari 2021.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bima Arya (Ketua Lembaga Dakwah Fakultas, An Nahl), 10 Februari 2021.

pihak rektorat. Pada akhirnya lembaga luar kampus ini juga menjadi pelabuhan serta mentoring apabila kegiatan-kegiatan di dalam kampus tersendat oleh kebijakan rektorat.

IV.4 Penutup

Kelompok-kelompok radikal di UB berkembang dan menguasai UAKI dan LDK baik di tingkat fakultas maupun universitas. Keberadaan mereka yang menguasai organisasi resmi kemahasiswaan intrakampus membuat mereka leluasa untuk merekrut anggota baru, terutama mahasiswa baru, dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Baik HTI maupun organisasi yang berideologi Ikhwanul Muslimin menjadikan LDK-UAKI sebagai kendaraan untuk menyebarkan ideologinya.

Masjid adalah tempat penting bagi kelompok-kelompok ini. Kelompok-kelompok ini tidak hanya menguasai masjid kampus, tapi juga berjejaring dengan komunitas masjid di luar kampus yang berideologi sama. Jaringan dengan pihak luar ini juga menyangkut tentang pendanaan.

Pasca-UU Ormas, pihak kampus telah melakukan beberapa kebijakan, sekalipun tidak terkesan “sangat mendobrak”. Beberapa kebijakan kampus yang dilakukan adalah mengganti pejabat-pejabat penting di lingkungan kampus dengan orang-orang yang tidak terafiliasi dengan organisasi terlarang. Pengawasan terhadap kegiatan LDK-UAKI juga dilakukan. Yang paling mendapatkan dampaknya adalah HTI yang jelas-jelas telah dideklarasikan sebagai organisasi terlarang. Sementara UAKI yang selama ini dianggap sebagai sarang kelompok radikal hanya sedikit terkena dampak kebijakan pengawasan. Begitu pengawasan mulai longgar, kegiatan kelompok ini berjalan kembali seperti semula. Kebijakan lain yang dilakukan adalah dengan mendirikan UKM baru, yaitu UKM Seni Religi. Pihak UB juga sudah menggandeng ormas keislaman moderat untuk memberi nasehat dalam pengambilan kebijakan moderasi di lingkungan kampus.

Sebagaimana yang disinggung di atas, seterbatas apapun kebijakan yang diambil pihak kampus telah memberi dampak bagi keleluasaan kelompok radikal di kampus. HTI bisa dikatakan secara formal sudah tidak memiliki ruang gerak di kampus. UAKI yang selama ini menjadi tempat berkembangnya ideologi Ikhwanul Muslimin juga mulai terbatas gerakannya, sekalipun ini tergantung pada keketatan pengawasan dari pihak kampus.

Sekalipun demikian, kegiatan kelompok ini tidak dengan sendirinya mati. Mereka mengalihkan gerakannya pada beberapa masjid sekitar kampus yang selama ini memang telah menjadi jaringan ideologis dan gerakannya. Dakwah dan rekrutmen online juga menjadi modus efektif bagi kelompok ini untuk menjaring anggota baru dan menyebarkan ideologinya. Cara-cara yang terakhir ini bisa dikatakan belum bisa dijangkau oleh pemangku kebijakan kampus.

V. INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER SURABAYA

Dua kabar tak sedap terkait dengan ITS dan keterlibatan alumninya dalam kegiatan terorisme membuat Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya periode 2015-2020, Prof. Ir. Joni Hermawan, M.Sc., ES., PhD., buru-buru

mengundang wartawan untuk memberikan klarifikasi. Acara jumpa pers itu dilaksanakan dua hari setelah terjadinya peristiwa pengeboman tiga gereja di Surabaya, dan sehari setelah bom di Sidoarjo meledak.

Minggu pagi, 13 Mei 2018, tiga buah bom meledak di tiga gereja yang berbeda di Kawasan Surabaya. Tiga tempat itu di antaranya Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pentakosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Sawahan. Keesokan harinya, dua tempat lainnya masing-masing kompleks Rumah Susun Wonocolo di Taman, Sidoarjo dan Markas Polrestabes Surabaya juga tak luput dari serangan teror bom. Polisi menembak mati Anton Ferdian dan Budi Satrijo, dua anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang meracik bom dan berencana melakukan bom bunuh diri.

Meski Anton Ferdian dan Budi Satrijo diidentifikasi sebagai alumni ITS, namun Joni Hermana perlu memberikan penjelasan kepada publik bahwa kampusnya tidak ada kaitannya dengan kedua terduga teroris tersebut. Joni Hermana juga mengklarifikasi kabar berikutnya yang menyebutkan bahwa tiga dosen ITS diberhentikan karena keterlibatannya dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).¹⁰²

Bagaimanapun juga, nama ITS terbawa dalam peristiwa yang biasa disebut dengan istilah radikalisme atau terorisme ini. Fealy dalam kajiannya mengenai radikalisme Islam di Indonesia menyebutkan bahwa ciri kelompok radikal Islam ini terletak pada adanya kesamaan keyakinan akan penerapan syariat Islam dan sifat reaktif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sekularisme, materialisme, dan penyimpangan ajaran agama.¹⁰³

Selain alumennya disebut-sebut sebagai pembuat bom teroris, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga merilis data bahwa ada tujuh kampus perguruan tinggi negeri di Indonesia yang sudah terpapar radikalisme, salah satunya adalah ITS.¹⁰⁴ Ini terjadi belum setahun setelah Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Perppu ini adalah perubahan terhadap UU No.17/2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Sebagai pusat pendidikan, Surabaya menjadi tempat tinggal mahasiswa dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, bahkan di antara mereka juga membentuk wadah komunitas tersendiri. Sebagai pusat komersial regional, banyak warga asing (ekspatriat) yang tinggal di daerah Surabaya, terutama di daerah Surabaya Barat.

Begitu juga dengan mahasiswa yang ada di kampus ITS, mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, namun sebagian besar beragama Islam. Di kampus ini, mahasiswa yang beragama Islam dan tergabung dalam organisasi ekstrakampus memulai gerakannya melalui masjid kampus, Namanya masjid Manarul Ilmi. Selain itu, mereka juga bergerak melalui Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Sebagai institusi dakwah kampus, LDK mendapatkan posisi secara legal dan diakui oleh birokrasi Perguruan Tinggi. LDK berorientasi dalam bidang

¹⁰² <https://nasional.tempo.co/read/1089345/its-bantah-pecat-dosen-simpatian-hizbut-tahrir-indonesia>

¹⁰³ Greg Fealy, *Islamic Radicalism in Indonesia : The Faltering Revival ?*. (Southeast Asian Affairs: 2004), hal. 104.

¹⁰⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44357353>

dakwah kampus untuk menegakkan kalimat Allah dengan prinsip *Amr ma'ruf nahi munkar*.¹⁰⁵

Kelompok radikal, ekstremis dan intoleran memusatkan kegiatannya di Masjid Manarul Ilmi kampus ITS. Masjid ini disinyalir menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan yang bermuara pada kaderisasi organisasi mahasiswa ekstrakampus yang diindikasikan mengarah pada gerakan *salafi ikhwani*, yakni salafi yang merupakan kepanjangan tangan dari Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir.¹⁰⁶ Kaderisasi ini sudah berlangsung lama sehingga tidak hanya terjadi di kalangan mahasiswa saja, melainkan juga sampai pada dosen-dosen dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, kecemasan Joni Hermana atas tuduhan BNPT beralasan mengingat banyak alumni ITS yang terlibat dalam proses kaderisasi ini dan berjalan bertahun-tahun.

Kegiatan mereka nyaris dibiarkan oleh pengelola kampus sehingga berkembang pesat bahkan sampai ke departemen-departemen. Mereka dengan mudahnya menguasai lembaga-lembaga dakwah yang ada di tingkat departemen/jurusan. Mereka terdiri atas banyak aliran, yang paling besar adalah kelompok salafi ikhwani atau yang mereka namakan sebagai kelompok tarbiyah. Penamaan kelompok ini mirip dengan apa yang terjadi di Mesir, yakni Ikhwanul Muslimin. Di samping itu juga ada kelompok Gema Pembebasan HTI atau yang banyak disebut sebagai Pemuda HTI yang juga secara agresif mencari anggota. Bahkan, di kalangan dosen dan tenaga kependidikan mereka memiliki pendukung yang fanatik. Sampai-sampai, pimpinan perguruan tinggi sempat mengeluarkan surat teguran dan menonaktifkan jabatan salah satu dekan dan dua orang dosen karena nyata-nyata memberikan dukungan kepada HTI.

Pascapelarangan ormnas HTI, aktivitas mereka di kampus menyusut, lebih-lebih ketika terjadi pergantian kepemimpinan dari Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc., ES., PhD ke Prof. Dr. I. Mochamad Ashari, M. Eng. Pada tahun 2020. Ia melakukan perubahan total terhadap pejabat-pejabat kampus dan menata gerakan Islam di ITS supaya tidak lagi menjadi pusat kaderisasi dan penyebaran paham ekstremis.

Perubahan gerakan Islam ekstrimis di kalangan mahasiswa dan dosen di kampus ITS menarik untuk dicermati. Terutama tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pimpinan kampus untuk menghadang kelompok-kelompok ekstremis masuk dan menabur pengaruhnya di kalangan mahasiswa. Bukan pekerjaan yang mudah mengingat di kampus ini sudah bertahun-tahun kelompok-kelompok ekstrimis ini mencengkeramkan paham salafi kepada mahasiswa dan seluruh civitas akademika di kampus teknik terbesar di wilayah Jawa Timur tersebut.

V.1 Kehidupan Organisasi Kemahasiswaan

Pusat dari gerakan Islam di kampus ITS adalah Masjid Manarul Ilmi (MMI). Masjid yang berdiri megah tepat di depan Gedung Rektorat ITS ini memiliki luas bangunan sebesar 2.458 m². Masjid ini dibangun pada tahun 1979 saat Prof. Mahmud Zaki M.Sc. menjabat sebagai Rektor ITS. Awalnya adalah sebuah musholla, yang kemudian karena tuntutan semakin banyaknya jamaah akhirnya dibesarkan menjadi masjid. Di sinilah, kegiatan keagamaan yang juga menjadi

¹⁰⁵ FSLDK ITS, *Buku Putih FSLDK* (Surabaya: JMMI ITS, 2014), 1-2.

¹⁰⁶ M. Kholid Syeirazi, *Wasathiyah Islam: Anatomi, Narasi dan Kontestasi Gerakan Islam* (Jakarta, Alif.id: 2020), 85.

sarana penyebarluasan paham keagamaan dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

Masjid Manarul Ilmi dipayungi oleh Yayasan Takmir Masjid Manarul Ilmi. Di masjid ini juga menjadi tempat sekertariat lembaga mahasiswa Jamaah Masjid Manarul Ilmi (JMMI) yang SK Kepengurusannya ditanda tangani oleh Wakil Rektor I. JMMI bergerak dalam ranah keislaman sebagai lembaga dakwah kampus yang terbentuk sejak 10 September 1989.¹⁰⁷

Masjid ini memang benar-benar menjadi pusat dari kegiatan-kegiatan keislaman mahasiswa, baik yang bersifat formal maupun hanya sekedar kumpulan-kumpulan atau diskusi yang tidak terjadwal. Kelompok-kelompok mahasiswa Islam ekstrakampus banyak yang memanfaatkan masjid ini sebagai tempat untuk berkegiatan. Lebih-lebih sejak kemunculan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pasca-Reformasi 1998. Masjid ini menjadi tempat merekrut anggota baru dan menjalankan aktivitas organisasi baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Aktivis KAMMI lebih suka disebut sebagai kelompok *tarbiyah*. Meskipun sama-sama beraliran salafi (*salafi ikhwani*), identitas ini sekaligus untuk membedakan mereka dengan kelompok salafi wahabi (*salafi Hijazi*).

Peran sebagai masjid yang menaungi semua kelompok dan golongan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengurus dan anggota JMMI sebagian besar adalah para mahasiswa yang berlatar belakang kelompok tarbiyah. Kelompok lain tidak bisa memanfaatkan penggunaan masjid untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Semua jadwal yang ada di masjid dikendalikan oleh JMMI. Begitu juga dengan pengelolaan dana yang ada di masjid. Bahkan beberapa kali penyelenggaraan kegiatan di masjid disokong oleh organisasi pengumpul dana semacam ACT (Aksi Cepat Tanggap), LMI (Lembaga Manajemen Infaq) dan lembaga-lembaga lain yang meskipun tidak terafiliasi kepada kelompok-kelompok tarbiyah, namun pola perilaku beragamnya mirip dengan kelompok salafi.¹⁰⁸ Mereka sering menyelenggarakan kegiatan di lantai dua masjid Manarul Ilmi. Saat kegiatan, pekik takbir seringkali dikumandangkan.¹⁰⁹

¹⁰⁷ <http://masjid.its.ac.id/>

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ardi Maulidi Navastara (Dosen Departemen Perencanaan Wilayah), 4 Februari 2021.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Syarif Aminullah (Ketua LKKI Departemen Matematika ITS), 23 Februari 2021.

Gambar 7:
Masjid Manarul Ilmi Kampus ITS



JMMI bukanlah organisasi mahasiswa jamaah masjid biasa. Ia memiliki sistem kaderisasi yang berjenjang dan jelas. Selain itu, organisasi ini juga memiliki garis-garis besar program kerja yang selalu dievaluasi usai dilaksanakan. Di sinilah mahasiswa senior dan alumni dilibatkan perannya. Sehingga, jalinan antara pengurus dan alumni terus berlangsung.¹¹⁰ Selain itu, alumni JMMI juga sering memberikan *support* program kepada JMMI.¹¹¹

Dalam kegiatannya, JMMI merancang program-program yang dijalankan dengan tujuan menarik simpati mahasiswa baru. Dalam setahun, JMMI memiliki dua kegiatan besar. Kegiatan pertama adalah SALAM ITS. Kegiatan ini bermaksud memfasilitasi mahasiswa baru untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapnyanya tentang bagaimana kuliah di ITS. Ada beberapa rubrik dalam acara ini yang sengaja disusun untuk membuat mahasiswa baru terus berkomunikasi dengan JMMI. Di antaranya SALAM Dakwah, yakni sebuah rubrik yang berisi tentang pengajian dakwah Islam. Pengisi dari materi ini adalah para mahasiswa pengurus JMMI yang sudah senior. Selain itu juga ada SALAM INAP. Sebuah rubrik yang dirancang untuk memberikan informasi tentang tempat tinggal, kos-kosan dan `rumah kontrakan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa baru. Ada juga SALAM Kuliner yang memberikan pengetahuan seputar tempat-tempat makan di kampus dan sekitarnya. Juga ada rubrik SALAM Jelajah. Sebuah acara yang dibuat untuk mengenalkan lingkungan sekitar tempat tinggal mahasiswa di daerah ITS serta tempat-tempat bersantai dan berlibur. Dan terakhir adalah SALAM Kampus. Acara yang berisi tentang kampus ITS, kegiatan-kegiatan mahasiswa dan proses akademik. *Event* yang kedua adalah Ramadhan in Campus. Acara ini dirancang untuk memberikan kegiatan kepada mahasiswa

¹¹⁰ Wawancara dengan Faiz Syabili Rahman (Mantan Pengurus Bidang kaderisasi JMMI), 23 Februari 2021.

¹¹¹ Wawancara dengan Ardi Maulidi Navastara (Dosen Departemen Perencanaan Wilayah), 4 Februari 2021.

anggota JMMI untuk mengisi bulan Ramadhan dengan ritual-ritual keagamaan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam.¹¹²

Pada perkembangannya, kegiatan SALAM ITS berubah menjadi SALAM Surabaya. Hal itu dilakukan untuk memperluas cakupan yang bukan hanya di kampus ITS saja melainkan juga di kampus-kampus lain di Surabaya, diantaranya di Unitomo Surabaya, UPN Veteran Surabaya, UNESA dan beberapa kampus lain. Perubahan itu juga dilakukan dalam rangka untuk memperkuat silaturahmi antarlembaga dakwah atau remaja masjid di kampus-kampus di Surabaya.¹¹³

Ciri maupun agenda yang diusung oleh kaum Islam radikal dan ekstrimis terlihat mengarahkan pada adanya suatu upaya untuk menciptakan suatu komunitas muslim dengan identitas ideal, sesuai dengan syariat Islam. Menurut Castells, konstruksi identitas akan melibatkan suatu konteks tertentu dan suatu relasi kuasa. Salah satunya adalah *resistance identity*, yakni adanya suatu perlawanan dan resistensi terhadap dominasi, baik itu dominasi negara ataupun kelompok mayoritas.¹¹⁴

Di kampus ITS, organisasi ini membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Jurusan atau yang sekarang dikenal dengan Lembaga Kajian dan Kerohanian Islam (LKKI) yang merupakan jaringan JMMI dalam rangka memperkuat dan membesarkan pengaruhnya di departemen-departemen.

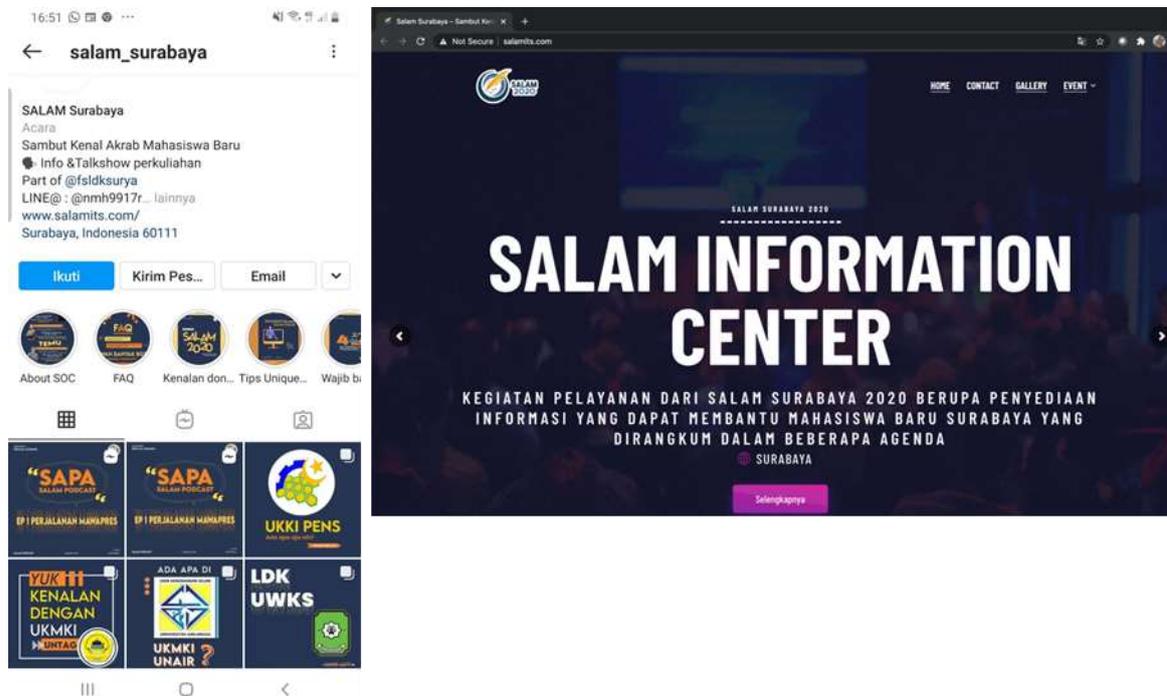
JMMI memiliki berbagai program yang dapat diikuti oleh para mahasiswa. Di antaranya adalah RDK (Ramadhan Di Kampus), Sambut Kenal Akrab Mahasiswa Baru (SALAM) yang diadakan pada masa penerimaan mahasiswa baru, ITS Mengaji, ITS Cinta Subuh, KSSI (Komunitas Shaum Sunnah ITS) yang merupakan acara buka bersama puasa Senin-Kamis, Pengabdian Masyarakat dengan melakukan pembinaan termasuk pengajaran, pemberdayaan, dan katering di empat desa di sekitar kampus ITS, Mentoring Wajib bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah agama islam, Pengembangan dan pendampingan bagi Lembaga Dakwah Jurusan (LDJ) dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK), Pelatihan keislaman, Seminar, Diskusi, Kajian, dan Syiar melalui media elektronik, dan juga Penggalangan dana untuk bencana alam dan isu-isu kemanusiaan. JMMI diharapkan mampu mensyiarkan Islam seluas-luasnya khususnya pada civitas akademika ITS maupun masyarakat sekitar ITS.

¹¹² Wawancara dengan Natasya Shantika (Mahasiswa Departemen Statistika, Pengurus JMMI Bidang Kemitraan), 23 Februari 2021.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Manuel Castells, *The Power of Identity* (Wiley Blackwell: 2010), 20.

Gambar 8:
Promosi Kegiatan JIMMI via Sosmed



Pengurus JMMI lebih banyak berasal dari mahasiswa kelompok tarbiyah. Namun ada juga yang berasal dari kelompok lain, semisal salafi dan HTI. Bahkan ada yang moderat, seperti NU. Seperti diungkapkan mantan pengurus JMMI bidang kaderisasi, Faiz Syafi'i Sabili Rahman. Mahasiswa Departemen dan Perencanaan Wilayah Kota ini mengatakan bahwa JMMI bersifat terbuka.¹¹⁵ Syarif Aminullah, Ketua LKKI Departemen Matematika mengatakan bahwa memang benar pengurus dan anggota JMMI terdiri dari berbagai macam kelompok aliran Islam yang ada di kampus, bahkan juga dari kelompok moderat. Namun yang duduk di jabatan kunci, seperti ketua, sekretaris dan koordinator atau ketua-ketua bidang hampir semuanya berasal dari kelompok tarbiyah. Bahkan, ia mengaku memiliki teman yang *background*-nya NU, namun setelah bergabung dengan JMMI, pemahaman keagamaannya sama dengan kelompok tarbiyah.

JMMI adalah organisasi yang massif dalam melakukan perekrutan anggota di kampus. Selain itu, juga militan. Lebih-lebih dari kalangan perempuan (akhwat). Biasanya mereka mendekati mahasiswa baru atau mahasiswa yang shalat di masjid, kemudian meminta nomor kontakannya. Selanjutnya, mereka akan menghubunginya, bahkan jika perlu didatangi ke kosannya untuk diajak mengikuti kegiatan di masjid. Liqo' yang diselenggarakan di masjid Mnarul Ilmi juga berjenjang. Pelatihannya juga berjenjang. Pada pelatihan ketiga, diberikan materi-materi seperti khilafah, salafisme dan yang mengarah pada radikalisme.¹¹⁶

¹¹⁵ Wawancara dengan Faiz Syabili Rahman (Mantan Pengurus Bidang kaderisasi JMMI), 23 Februari 2021.

¹¹⁶ Wawancara dengan Syarif Aminullah (Ketua LKKI Departemen Matematika ITS), 23 Februari 2021.

Kelompok Tarbiyah

Tidak sulit untuk mengidentifikasi kelompok tarbiyah di kampus ITS. Mereka umumnya menjadi aktivis di Masjid Manarul Ilmi dan bergabung dalam JMMI. Sebelum tahun 2020, pergerakan kelompok tarbiyah di kampus ITS sangat leluasa. Mereka menguasai berbagai lini di organisasi-organisasi lembaga dakwah kampus yang dikenal dengan Lembaga Kajian Kerohanian Islam (LKKI). LKKI ini ada di semua departemen atau jurusan di ITS. Perekrutan anggota dan proses kaderisasi kelompok tarbiyah dilakukan melalui tiga cara. Pertama dengan menguasai LKKI-LKKI yang ada di departemen-departemen. Teknisnya, anggota mereka akan mendukung kader yang diproyeksikan akan menjadi ketua di LKKI. Meski jumlah mereka di masing-masing departemen tidak banyak, namun mereka militan dan fanatik. Mereka memiliki acara rutin untuk bertemu (*liqo'*) yang dijadikan sarana untuk pengajian dan berkoordinasi. Tempatnya bisa di mana saja. Mulai dari masjid, kemudian mushala-mushala yang ada di masing-masing departemen, bahkan hingga di perpustakaan atau tempat lain yang ada di kampus dan luar kampus.

Meski jumlah mahasiswa Muslim di ITS mendominasi, namun menjadi anggota atau aktivis organisasi ekstra kampus ataupun intra kampus berbasis keislaman tidak banyak yang meminati. Lebih-lebih mahasiswa Muslim dari kelompok moderat. Mereka lebih suka bergabung dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang kegiatannya banyak membantu proses belajar mereka secara akademik di kampus. Hal ini dijadikan peluang oleh kelompok tarbiyah untuk merebut dan menguasai organisasi-organisasi internal kampus yang berbasis keislaman seperti LKKI. Sehingga, lembaga dakwah kampus di dalamnya berisi anggota dari kelompok tarbiyah dan mereka yang menjadi aktivis Seksi Kerohanian Islam (ROHIS) di SMA.¹¹⁷ Padahal, di sebagian besar ROHIS yang ada di sekolah-sekolah, proses kaderisasi kelompok tarbiyah sudah terjadi. Para aktivis dari kelompok tarbiyah juga sering bertandang ke SMA asal masing-masing untuk melakukan pembinaan terhadap siswa-siswa anggota ROHIS. Dari sinilah mereka terus menjaga proses kaderisasi hingga sampai di tingkat perguruan tinggi. Dengan bertemunya para aktivis tarbiyah dan mahasiswa mantan pengurus ROHIS di LKKI, di sisi lain anggota LKKI yang lain juga berlatar belakang dari mereka yang minim pengetahuan agama, maka penguasaan LKKI dapat dilakukan dengan mudah.

Hingga tahun 2021, kelompok tarbiyah masih menguasai sebagian besar LKKI di departemen-departemen. Hanya beberapa saja yang posisi ketua dan pengurus hariannya tidak dijabat oleh kelompok tarbiyah. Contohnya adalah LKKI Departemen Matematika. Hal itu terjadi karena keberadaan kelompok tarbiyah di ITS sudah lama melakukan pengkaderan mulai dari tingkat mahasiswa hingga dosen. Sehingga bisa dibilang sudah mengakar. Bahkan, selama tahun 2020, kelompok ini masih “menguasai” masjid Manarul Ilmi dan JMMI. Kelompok ini menutup diri apabila ada mahasiswa yang diindikasikan dari kelompok moderat ingin bergabung dengan JMMI. Melalui kaderisasi yang ketat dan intens, mereka telah berhasil melahirkan alumni-alumni yang memiliki militansi tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Perkumpulan Alumni JMMI. Organisasi ini berbentuk yayasan dan aktif berkomunikasi di antara anggotanya. Sampai saat ini, yayasan

¹¹⁷ Ibid.

ini terus berkegiatan. Tidak saja di ITS melainkan juga di tempat-tempat lain yang dirasa perlu “ditanam” dan dikembangkan kelompok tarbiyah. Alumni-alumninya juga banyak yang menjadi dosen di ITS.¹¹⁸

Proses kaderisasi berlangsung secara terus menerus. Kelompok tarbiyah yang menjadi dosen terus melakukan rekrutmen kepada mahasiswa yang memiliki potensi untuk diajak bergabung dan aktif di kelompok tarbiyah. Caranya bermacam-macam. Dimulai dari pendekatan personal dengan melakukan komunikasi aktif antara mahasiswa yang bersangkutan dengan dosen tersebut. Ajakan untuk mengikuti *liqo'*, hingga memberikan rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa kepada mahasiswa tersebut.¹¹⁹

Dalam melakukan kegiatannya, kelompok ini menggunakan media komunikasi melalui WhatsApp (WA), Instagram dan LINE. Pengajian yang dilaksanakan di kampus biasanya untuk mahasiswa satu departemen saja. Namun tidak menutup kemungkinan mahasiswa dari departemen lain juga ikut bergabung. Sebelum pandemi, penyelenggaraannya biasanya dilaksanakan setelah salat Ashar. Namun selama pandemi berlangsung dan mahasiswa belajar di rumah, pelaksanaan pengajian banyak dilakukan melalui online. Jadwalnya pun kondisional, disesuaikan dengan ketersediaan waktu pemateri/ustadz.¹²⁰ Teknisnya, biasanya mereka menentukan jadwal terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan jadwal pemateri. Setelah itu, di-*broadcast* kepada seluruh anggota grup yang ada di WA, IG atau LINE.

Kelompok tarbiyah memiliki akses yang luar biasa terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di kampus. Para dosen dan tenaga kependidikan yang segolongan memberi kesempatan yang selebar-lebarnya kepada mereka untuk menyelenggarakan acara dengan menggunakan fasilitas kampus yang ada. Seperti diceritakan Ardi Maulidi Navastara, dosen Departemen Perencanaan Kota, bahwa penggunaan ruangan itu salah satu pintu masuknya adalah dari tenaga kependidikan tepatnya yakni salah satu pustakawan. Sang pustakawan menyediakan ruang baca perpustakaan departemen.

Mereka berkumpul di luar dan dari luar. Saya tidak terpikir kalau itu pengajian. Saya kira ada apa. Walaupun itu pengajian saya beripikir itu di luar, meski masih di kawasan kampus, tidak di dalam ruangan. Kumpul-kumpulnya di gazebo di luar. Tapi tiba-tiba menggunakan ruangan di dalam. Dan saya minta tolong dihentikan. Dan kalau saya telusuri ternyata di tenaga kependidikan itu sepertinya paham dengan kegiatan yang dilangsungkan itu. Dalihnya seperti ini, ingin belajar agama. Saya bilang, ya silakan, tapi kita perlu berhati-hati belajar agama itu.

Tidak hanya di masjid, kajian-kajian yang mereka lakukan juga seringkali dilaksanakan di luar masjid. Seperti di rumah kontrakan, atau rumah salah satu dosen yang juga berasal dari kelompok tarbiyah. Mereka juga menyelenggarakan kajian-kajian di masjid perumahan di sekitar kampus ITS. Mereka tahu bahwa

¹¹⁸ Wawancara dengan Iqbal Alvani (Mahasiswa Departemen Kelautan, Ketua JMMI yang baru), 23 Februari 2021.

¹¹⁹ Wawancara dengan Ardi Maulidi Navastara (Dosen Departemen Perencanaan Wilayah), 4 Februari 2021.

¹²⁰ Wawancara dengan Iqbal Alvani (Mahasiswa Departemen Kelautan, Ketua JMMI yang baru), 23 Februari 2021.

mereka tidak bisa melakukan kegiatan di masjid-masjid yang ada di perkampungan di sekitar kampus. Karena masjid-masjid di perkampungan sekitar ITS dipantau terus oleh pengurus MWC NU Sukolilo dan tidak diperkenankan digunakan untuk acara-acara yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok garis keras, termasuk kelompok tarbiyah, HTI, salafi dan sebagainya. Oleh karenanya, masjid-masjid di perumahan menjadi salah satu incaran mereka untuk melakukan kegiatan. Umumnya, kegiatan itu berbentuk pengajian dengan mendatangkan ustadz atau pembicara dari kelompok mereka.¹²¹

Perekrutan anggota dan kaderisasi yang dilakukan oleh kelompok tarbiyah selain menggunakan JMMI juga melalui sistem mentoring. Di ITS, matakuliah agama Islam diberikan oleh dosen di kelas. Namun juga ada tambahan materi di luar kelas. Wakil Rektor I ITS, Prof. Dr. Adi Suprijanto, menjelaskan bahwa mata kuliah agama Islam diberikan dengan dua cara, yakni kurikuler atau di dalam kelas dan ekstrakurikuler atau kegiatan tambahan di luar jam perkuliahan di kelas. Pengajarnya adalah para dosen MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum). Baik perkuliahan di kelas maupun di luar kelas dilaksanakan sama-sama satu semester secara bersamaan. Hal itu dilakukan selain untuk mengajarkan materi agama Islam, juga untuk membina karakter dan perilaku. Untuk kegiatan ini, semua dilibatkan, baik dosen maupun mahasiswa senior. Dosen-dosen bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut.¹²²

Dalam prakteknya, kegiatan ekstrakurikuler ini justru dimanfaatkan oleh kelompok tarbiyah, salafi dan HTI untuk melakukan rekrutmen dan indoktrinasi. Teknisnya, pihak kampus membuka pendaftaran untuk menjadi mentor mahasiswa. Setelah mahasiswa mendaftar kemudian diseleksi. Di saat seleksi inilah ditentukan mahasiswa siapa saja yang bisa menjadi mentor dan yang tidak lolos. Kebanyakan yang lolos jadi mentor adalah dari kelompok tarbiyah, berikutnya adalah dari kelompok HTI dan salafi.

Kegiatan mentoring ini mulai dikendalikan. Meski demikian upaya yang dilakukannya bukan tanpa kendala. Kelompok tarbiyah masih saja berusaha menghalang-halangi. Ia pernah merasa ditelikung karena perubahan jadwal seleksi yang tidak diumumkan. Hanya dari kelompok mereka saja yang diberi tahu perubahan jadwal tersebut.¹²³ Ardi Maulidi Navastara pernah mempertanyakan perihal sistem perekrutan ini.

Jadi mentoring itu dikenal sebagai awal mula kaderisasi dakwah kampus. Kemudian kita ambil alih. Nah di situ di kegiatan mentoring itu kita coba para mentornya itu kita atur walaupun pengaturannya secara alami dari mahasiswa untuk mahasiswa, kita coba masukkan orang-orang kita. Nah, pada waktu kita ingin memasukkan nama-nama orang kita dibutuhkan 200 orang mentor waktu itu, dari pihak JMMI ini, kebetulan mentoring itu dikelola oleh Badan Penyelenggara Mentoring JMMI, dia sudah menyatakan mentornya sudah terpenuhi 200 orang. Saya tanya darimana? Dan kapan perekrutannya? Mereka jawab sudah selesai perekrutannya. Ini

¹²¹ Wawancara dengan Drs. H. Wahyuddin, MEI. (Ketua MWC NU Sukolilo), 23 Februari 2021.

¹²² Wawancara dengan Prof. Adi Suprijanto (Wakil Rektor I ITS), 5 Februari 2021.

¹²³ Wawancara dengan Ardi Maulidi Navastara (Dosen Departemen Perencanaan Wilayah), 4 Februari 2021.

kan kalau saya baca sebagai bentuk-bentuk yang eksklusif dalam proses perekrutan mentor.¹²⁴

Bukan hanya itu, kelompok tarbiyah melalui JMMI leluasa mengakses dana-dana kemahasiswaan karena Wakil Rektor I atau Wakil Rektor yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan juga berasal dari kelompok tarbiyah. Bahkan dana dari Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IKOMA) ITS juga digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan JMMI. Mereka memiliki akses dan kemudahan dalam mengajukan anggaran kegiatan, baik sepengetahuan ataupun tanpa sepengetahuan takmir masjid Manarul Ilmi.

Kegiatan ekstrakurikuler mata kuliah agama Islam oleh mahasiswa disebut mentoring dan wajib diikuti karena merupakan bagian dari perkuliahan agama Islam. Pelaksanaannya seringkali dilakukan di masjid Manarul Ilmi. Namun juga bisa dilaksanakan di tempat lain sesuai dengan kesepakatan antara mentor dan pesertanya. Biasanya, satu mentor menangani 10 sampai 30 mahasiswa, tergantung ketersediaan mentor. Setiap pertemuan berlangsung sekitar 1 jam.¹²⁵

Sistem rekrutmen melalui mentoring ini berlangsung lama dan intensif. Hal itu terjadi karena kaderisasi di tubuh kelompok tarbiyah dilakukan dengan baik dan terencana. Kader-kader tarbiyah sudah menempati jabatan-jabatan strategis di kampus. Bahkan ada yang sudah bergelar guru besar. Selain itu, kelompok ini juga solid dan berupaya untuk saling membantu di antara senior dan junior. Kader yang sudah senior atau yang menjadi dosen mencarikan jalan kader juniornya untuk mendapatkan beasiswa untuk kelancaran studinya. Bahkan, beasiswa yang disediakan bukan hanya untuk studi, melainkan untuk pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga Rumah Kepemimpinan (RK) atau Teknokrat Muda Indonesia (TKI).

Bahkan tidak jarang, beasiswa ini dijadikan sarana untuk menjaring mahasiswa baru supaya tertarik dan bergabung dengan kelompok tarbiyah. Beasiswa itu bukan hanya berasal dari kampus, melainkan juga dari luar kampus. Sebagaimana yang dituturkan Murdjito, M.Sc., pengurus Masjid Manarul Ilmi, ia heran dengan banyaknya beasiswa yang diterima mahasiswa-mahasiswa tarbiyah karena setahunnya beasiswa dari kampus tidak sebanyak itu.¹²⁶

Kelompok tarbiyah juga ikut “bermain” dalam perekrutan tenaga dosen di ITS. Calon dosen yang direkrut jika tidak memenuhi syarat, akan direkayasa agar bisa lolos. Tentunya, bukan sembarang orang yang merekayasa. Ada “orang kuat” di jabatan struktural yang mem-*back up*. Ardi Maulidi menceritakan ada salah satu calon dosen yang berprestasi dan memenuhi kualifikasi akademik dan bukan dari kelompok tarbiyah, namun yang bersangkutan tidak lolos karena “dikalahkan” calon dosen yang sudah disiapkan oleh kelompok tarbiyah.¹²⁷

¹²⁴ Wawancara dengan Ardi Maulidi Navastara (Dosen Departemen Perencanaan Wilayah), 4 Februari 2021.

¹²⁵ Wawancara dengan Syarif Aminullah (Ketua LKKI Departemen Matematika ITS), 23 Februari 2021.

¹²⁶ Wawancara dengan Murdjito, M.Sc. (Pengurus Takmir Masjid Manarul Ilmi ITS), 3 Februari 2021.

¹²⁷ Wawancara dengan Ardi Maulidi Navastara (Dosen Departemen Perencanaan Wilayah), 4 Februari 2021.

Kelompok HTI dan Salafi

Jumlah anggota HTI di kampus ITS tidak banyak. Tidak didapat data yang pasti jumlah mereka. Menurut Adi Suprijanto, jumlahnya semakin berkurang dan kegiatan-kegiatannya mulai hilang dalam kisaran waktu dua tahun terakhir ini. Kegiatan-kegiatan formalnya sudah tidak tampak di kampus. Bisa jadi kegiatan mereka dilakukan secara diam-diam dan terbatas pada anggota mereka saja.

Sebelum adanya Perppu No. 2/2017, mereka sering menyelenggarakan kegiatan secara terbuka. Bahkan memanfaatkan fasilitas kampus. Kelompok HTI secara rutin melaksanakan kegiatan pengajian khusus untuk ibu-ibu dosen pada hari Jum'at siang. Mereka juga melakukan kaderisasi mahasiswi-mahasiswi melalui forum pengajian tersebut.¹²⁸

Anggota HTI dan Salafi di kepengurusan JMMI juga masih ada. Setidaknya itu yang diungkapkan Faiz Sabily Rahman, mantan pengurus JMMI. Meski agak sulit untuk mengenali anggota HTI, namun ia tahu beberapa pengurus JMMI adalah HTI. Sedangkan kelompok salafi sangat mudah ditebak dari penampilannya. Ia tidak mempersoalkan kehadiran kelompok HTI dan Salafi di masjid Manarul Ilmi. Karena, bagi dia, keduanya adalah kelompok yang sama-sama memiliki doktrin kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah.

Salafi kan intinya mempertahankan mana yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits toh, saya rasa emang cukup pakem mereka kalo melihat dari pembicaraan-pembicaraanya itu lumayan cukup *straight*-lah,"¹²⁹

Bagi sebagian dosen ITS, keberadaan HTI tidak perlu dilarang oleh pemerintah. Paham HTI haruslah diperlakukan sama dengan paham-paham yang lain dalam agama Islam. Prof. Daniel M. Rosyid, Ph.D.¹³⁰ berpendapat bahwa kampus adalah sebuah *marketplace* bagi *ideas supplier*. Pemerintah tidak perlu mengatur *ideas supplier* ini karena hanya sekedar wacana. Justru munculnya ekstremisme disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang membiarkan para lulusan SMA berfikir sempit. Mereka mendapatkan indoktrinasi yang dilakukan oleh pemerintah semenjak anak-anak duduk di bangku sekolah. Akibatnya, ketika mereka berkuliah dan berkenalan dengan paham-paham yang bermacam-macam mereka langsung tergelincir ke pemahaman yang radikal.¹³¹

Kelompok HTI di ITS adalah kelompok yang kreatif, mereka memiliki tabloid, buletin dan aktif dalam menyebarkan pahamnya. Menurut Daniel M. Rosyid, diskusi yang dilakukan oleh HTI mencerahkan. Oleh karena itu, ia menilai kader-kader HTI adalah kader yang militan dan menjiwai apa yang mereka perjuangkan.

¹²⁸ Wawancara dengan Prof. Adi Suprijanto (Wakil Rektor I ITS), 5 Februari 2021.

¹²⁹ Wawancara dengan Faiz Syabily Rahman (Mantan Pengurus Bidang kaderisasi JMMI), 23 Februari 2021.

¹³⁰ Prof. Ir. Daniel M. Rosyid, Ph.D. adalah dosen Fakultas Teknologi Kelautan yang pada tahun 1999 pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Kelautan. Tiga bulan kemudian menjabat Pembantu Rektor IV ITS. Pada tahun 2015-2020, ia terpilih menjadi Dekan Fakultas Teknologi Kelautan, namun pada tahun 2017 ia diberhentikan dari jabatannya sebagai dekan dan menjadi dosen biasa. Pemberhentian itu terkait dengan sikap dia yang memposting *hashtag* #HTILayakMenang di medsosnya menjelang putusan sidang gugatan Sidang Gugatan SK Pembubaran HTI di PTUN.

¹³¹ Wawancara dengan Prof. Daniel M. Rosyid, 1 Maret 2021.

Walaupun beberapa pendapat berbeda, kaderisasi mereka cukup berhasil. Mungkin melebihi Muhammadiyah. Muhammadiyah saja tidak seberhasil HTI. Dan dalam hal ini, jadi saya kira sebagai aliran baru dan gerakan baru dia memberi semacam kritik terhadap Muhammadiyah terutama, yang saya cukup dekat. Jadi banyak hal konsep yang Muhammadiyah masih toleran terhadap isu-isu yang sudah jelas itu merusak tapi oleh Muhammadiyah itu masih diterima. Jadi itu yang membuat kita babak belur ya karena itu. Termasuk riba misalkan, soal riba Muhammadiyah itu kan sikapnya ambigu. NU juga begitu.

Cara pikir Daniel ini merupakan tipikal dari kelompok radikal yang meletakkan dirinya sebagai alternatif absah dari suara dan kepentingan Islam karena menganggap bahwa kelompok lain tidak lagi legitimate. Gerakan radikalisme Islam mulai abad ke-20 dipicu oleh dua faktor. Pertama, penguasa lokal (negara) yang dianggap otoriter, despotis, korup, dan pro-Barat. Kelompok Islam mainstream dianggap tidak mampu melakukan kontrol dan condong menyokong kekuasaan. Kedua, kolonialisasi dan penetrasi ideologi Barat dinilai tidak sesuai dengan norma nilai-nilai Islam. Simbol Barat dalam pandangan kelompok radikal Islam dianggap sebagai penyebab dari rusaknya sistem sosial-politik yang merugikan umat Islam.¹³²

Daniel sering diundang berbagai macam kelompok yang ada di kampus, terutama kelompok HMI. Ia juga pernah beberapa kali diundang kelompok HTI dalam acara diskusi dan pengajian. Bahkan dalam kisaran dua tahun ini ia masih diundang menjadi pembicara dalam salah satu diskusi yang dilakukan HTI. Forum-forum yang diselenggarakan HTI menurutnya penting dan berkualitas.

Baik kelompok HTI maupun Salafi keduanya berusaha untuk melakukan kaderisasi dan merekrut anggota dari mahasiswa dan masyarakat sekitar. Untuk keperluan itu, mereka juga menyiapkan tempat yang digunakan untuk pertemuan dan kajian-kajian. Biasanya mereka mencari tempat kos atau kontrakan yang dekat dengan masjid dan dijadikan sebagai pondok. Dengan begitu, mereka bisa mulai memasuki masjid tersebut dan perlahan menguasai ketakmiran dan jamaahnya. Hal yang paling kasat mata adalah ketika usai salat Jum'at, anggota HTI pasti menyebarkan buletin mereka.

KH. Ma'ruf Khozin, ulama muda yang tinggal di pemukiman sekitar kampus ITS bersama dengan pengurus NU di tingkat kecamatan terus melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar gerakan radikalisme ini tidak semakin meluas. Ketua MWC NU Sukolilo Wahyudin sudah meminta kepada semua warga NU, khususnya takmir masjid NU, untuk mewaspadaikan apabila ada aktivitas kelompok HTI ataupun kelompok ekstremis lain yang masuk ke masjid-masjid NU. Meski jumlah mereka tidak banyak, namun aktivitas mereka masih berlangsung. Bahkan pascapelarangan HTI, mereka masih menyebarkan bulletin di masjid-masjid.¹³³

¹³² Sidratahta Muhktar, *Dinamika Politik Islam dalam Dunia yang Berubah* (Yogyakarta: Aynat Publishing, 2014), hal. 71-72.

¹³³ Wawancara dengan Drs. H. Wahyuddin, MEI. (Ketua MWC NU Sukolilo), 23 Februari 2021.

V.2 Kebijakan Deradikalisasi

Langkah yang diambil pihak rektorat dalam rangka meminimalisasi pergerakan dan pengaruh kelompok ekstrimis di ITS mulai membuahkan hasil. Kini, pengajian-pengajian yang diselenggarakan di masjid Manarul Iلمي sudah sepenuhnya diisi oleh ustadz-ustadz maupun ulama dari kalangan moderat. Begitu juga aktivitas yang dijalankan oleh JMMI, meski dibatasi pada persoalan ketakmiran saja. Hal itu membuat iklim yang ada di masjid tersebut menjadi moderat, terbuka dan inklusif.

Acara-acara peringatan hari besar Islam diselenggarakan dengan mengakomodir keinginan dari kelompok-kelompok moderat – yang merupakan kelompok terbesar jumlahnya di ITS, yang selama ini terhambat dengan eksklusifisme yang dilakukan oleh kelompok tarbiyah di masjid. Kegiatan hadrah rutin yang dulunya tidak diperbolehkan diselenggarakan di dalam masjid kini sudah berlangsung rutin di dalam masjid. Begitu juga kegiatan istighasah, *ngaji* kitab kuning dan salat rawatib saat ini sudah benar-benar digawangi oleh kelompok moderat. Peringatan Isra' Mi'raj yang diselenggarakan tahun ini mengundang Gus Miftah, salah satu kyai muda yang saat ini banyak digemari dan selalu menanamkan pentingnya rasa cinta tanah air.

Gambar 9:

Peringatan Isra' Mi'raj di Masjid Manarul Iلمي ITS dengan Penceramah Gus Miftah



JMMI kini memperkenalkan kepada mahasiswa kegiatan-kegiatan yang dekat dengan praktik keislaman mereka selama ini. Apa yang terjadi dengan mereka lambat laun akan sama dengan ketika mereka ada di rumah, yakni tradisi keagamaan yang terbuka, yang menghargai nilai-nilai lokal dan menyejukkan umat. Dengan pola-pola seperti itu maka Iqbal Alvani, Ketua JMMI, yakin bahwa paham-paham radikal akan dengan sendirinya terkikis di kampus.¹³⁴

¹³⁴ Wawancara dengan Iqbal Alvani (Mahasiswa Departemen Kelautan, Ketua JMMI yang baru), 23 Februari 2021.

Gambar 10:
Acara Pembacaan Shalawat Dhiba' di Masjid Manarul Ilmi ITS



Selain keberhasilan merestrukturisasi JMMI, pimpinan ITS juga melakukan perombakan besar-besaran terhadap TPKI dan mengevaluasi pelaksanaan mata kuliah Agama Islam. Selain itu, pihak kampus juga berusaha menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan karakter. Dosen-dosen Pendidikan Agama Islam dikumpulkan dan diberi arahan supaya bekerjasama dengan takmir dalam rangka penanaman Pendidikan karakter kepada mahasiswa.

Melalui TPKI yang baru segala aktivitas ekstrakurikuler agama Islam dipantau, termasuk kegiatan mentoring. Skrining dan seleksi ketat dilakukan untuk menjaring calon mentor yang berasal dari mahasiswa senior yang benar-benar memahami agama Islam secara moderat. TPKI mempersyaratkan para calon mentor itu harus bisa membaca al Qur'an, paham tajwid dan mampu memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat al Qur'an. Hal yang sangat jarang dimiliki oleh mahasiswa dari kelompok tarbiyah. Karena selama ini, kemampuan mengaji mahasiswa kelompok tarbiyah kalah jauh dengan mahasiswa dari kelompok moderat yang umumnya memiliki latar belakang belajar di pesantren.

Termasuk juga kegiatan yang ada di LKKI-LKKI di semua departemen. Semua kegiatan yang akan dilaksanakan juga harus dikonsultasikan dan melibatkan pihak takmir masjid. Dengan demikian, ada yang memantau kegiatan-kegiatan mereka.

Adi Suprijanto adalah dirigen yang ulung dalam mengorkestrasi kekuatan-kekuatan dan sumber daya yang ada di kampus. Upaya menghidupkan moderasi beragama di kampus ITS dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menjalin komunikasi dengan pondok-pondok pesantren yang ada di sekitar kampus dan mengajak pimpinan pesantren untuk ikut serta memberikan pembinaan kepada mahasiswa ITS. Setelah menata sumber daya manusianya, langkah berikutnya adalah menata dan mempersiapkan *content-content* untuk memperkuat pendidikan karakter. Konten-konten toleransi, kebangsaan, Islam yang ramah juga harus dikenal dan diterapkan di ITS. Sehingga tidak hanya organisasinya saja yang berubah melainkan juga *mindset*-nya.

Semua pihak sepakat bahwa pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam menghalau perkembangan gerakan radikalisme di kampus, khususnya ITS. Pimpinan kampus merasa bahwa selama ini pemerintah hanya mengeluarkan Perppu No.2/2017 saja tanpa ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaannya. Menurut Adi Suprijanto, yang terjadi adalah bahwa mereka sempat kebingungan bagaimana operasionalisasi dari Perppu tersebut. Perppu itu tidak secara detail menjelaskan langkah apa saja yang harus dilakukan pihak kampus dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal yang sudah mengakar. Hal ini tentu berbeda dengan kelompok radikal yang baru menancapkan pengaruhnya di kampus dan lebih mudah penanganannya.

Panduan tertulis yang jelas sangat dibutuhkan agar kampus bisa menjalankan fungsi-fungsi sebagai lembaga yang mampu membentengi mahasiswa dan civitas akademika dari pengaruh radikalisme dan ekstremisme. Masyarakat perguruan tinggi berbeda dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Masyarakat kampus sudah terbiasa berpikir kritis dan logis. Oleh karena itu, segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pihak kampus harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan respon yang bakal muncul, termasuk adanya hambatan-hambatan seperti munculnya penolakan.

Adi Suprijanto bercerita bahwa kampusnya pernah dikunjungi anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Saat kunjungan tersebut yang bersangkutan menyarankan agar di kampus dibentuk unit kegiatan mahasiswa yang berfungsi untuk mengawal Pancasila. Dalam pandangan Adi, saran tersebut sangat baik, namun ia menemui kesulitan dalam mencari referensi-referensi untuk pendiriannya.

Oke nggak masalah kita, tapi alangkah baiknya kalo itu tidak lisan tapi satu *guidance* yang memang jelas dari negara. Harus ada ini kayak gitu! Nah kami di bawah tinggal jalan enak kita. Saya sering kali ketika ditanya apa yang dibutuhkan perguruan tinggi? Kita butuh panduan yang jelas, tertulis, supaya kami tidak dibantai dari bawah.

Pernyataan Adi Suprijanto ini agak aneh karena di lingkungan Kementerian Pendidikan ada Permenristek Dikti Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Pada pasal 3 ayat 1 jelas dinyatakan bahwa "Perguruan tinggi dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang secara khusus memiliki fungsi sebagai wadah pembinaan ideologi Pancasila. Ini menunjukkan bahwa kebijakan regulasi yang sangat strategis pasca-UU Ormas belum sepenuhnya ditangkap di level perguruan tinggi.

Permintaan kepada pemerintah untuk membuat peraturan turunan dari Perppu No. 2/207 seperti petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sudah sering disampaikan. Namun belum juga turun. Jika pemerintah sudah menyiapkan perangkat hukum yang operatif di lapangan, maka hal itu akan lebih mudah bagi pihak kampus untuk menjalankannya dan pasti akan diikuti oleh semua perguruan tinggi. Sebab, selama ini yang berhadapan langsung dengan kelompok radikal adalah para pimpinan kampus. Selama ini juga tidak banyak pihak yang mau melakukan pembelaan terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kampus jika ada perlawanan dari kelompok yang menjadi korban kebijakan.

Organisasi kemasyarakatan yang moderat seperti NU dan Muhammadiyah seharusnya juga ambil peran di kampus dalam upaya mencegah berkembangnya radikalisme. Selama ini, seolah-olah ormas-ormas tersebut lebih banyak melihat dari luar saja sehingga dijadikan peluang oleh kelompok-kelompok radikal mengembangkan pahamnya dan merekrut kader.¹³⁵

Dukungan lain yang dibutuhkan adalah sinergitas antara pihak kampus dengan aparat keamanan. Isu-isu radikalisme juga harus dipahami dengan baik oleh pihak kepolisian dan TNI. Sebab, selama ini kampus dan masyarakat seakan-akan dibiarkan sendiri menghadapi munculnya kelompok-kelompok radikal. Aparat kepolisian seharusnya bisa mendeteksi dan mewaspadai lebih awal kehadiran kelompok-kelompok ini di sekitar kampus. Dengan begitu, maka upaya-upaya pencegahan bisa dilakukan lebih awal sebelum menjadi besar.¹³⁶

V.3 Kehidupan Kampus pasca-UU Ormas

Sejak dikeluarkannya Perppu No. 2/2017, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok HTI di kampus ITS banyak berkurang. Atribut-atribut yang mengarah pada kelompok-kelompok HTI juga langsung menghilang. Kegiatan-kegiatan HTI lebih banyak dilaksanakan secara diam-diam dan tertutup hanya untuk anggota mereka saja. Pihak kampus tidak pernah lagi mendapati adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok HTI di kampus. Meski demikian, proses kaderisasi terus berjalan. Wakil Rektor I ITS, Prof. Adi Suprijanto meyakini masih ada anggota HTI yang menjadi pengurus di JMMI dan di lembaga dakwah jurusan. Namun dalam kegiatannya mereka sudah tidak mengundang lagi narasumber atau pemateri yang diindikasikan radikal. Jaringan mereka masih kuat.¹³⁷

Pusat Kajian Halal ITS menjadi pintu masuk dosen-dosen dari kelompok radikal. Penyebabnya karena lembaga ini dianggap tidak begitu menarik bagi kelompok moderat, sehingga dijadikan peluang bagi kelompok radikal untuk melakukan kaderisasi dan mengembangkan pengaruhnya. Bukan hanya di kampus ITS, melainkan juga di daerah-daerah di luar kampus.

Lembaga ini memiliki beberapa program khususnya tentang sosialisasi sertifikasi halal kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di seluruh Jawa Timur. Program inilah yang kemudian dijadikan salah satu ruang bagi kelompok radikal untuk memperluas pengaruhnya bahkan hingga ke pelosok-pelosok. Kepala Pusat Kajian Halal ITS, Prof. Setiyo Gunawan, Ph.D. menceritakan pasca diberlakukannya Perppu No. 2/2017 lembaganya menjadi salah satu tempat bagi kelompok radikal untuk beraktualisasi sekaligus melebarkan pengaruhnya ke luar kampus ITS. Untuk meminimalisasi dampak tersebut, ia berusaha agar setiap program sosialisasi yang dilaksanakan lembaganya tidak hanya dilakukan oleh dosen-dosen ataupun mahasiswa dari kelompok radikal. Ia berusaha agar setiap program sosialisasi tersebut juga diikuti dosen-dosen dan mahasiswa dari kelompok moderat. Selain melakukan sosialisasi, lembaga ini juga melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok usaha kecil. Bisa dipastikan jika dosen-dosen dan mahasiswa yang moderat tidak

¹³⁵ Wawancara dengan Murdjito, M.Sc. (Pengurus Takmir Masjid Manarul Ilmi ITS), 3 Februari 2021.

¹³⁶ Wawancara dengan Drs. H. Wahyuddin, MEI. (Ketua MWC NU Sukolilo), 23 Februari 2021.

¹³⁷ Wawancara dengan Prof. Adi Suprijanto (Wakil Rektor I ITS), 5 Februari 2021.

diikuti, maka yang terjadi adalah kelompok radikal akan leluasa mengarahkan kelompok-kelompok usaha yang didampingi kepada pemahaman yang mereka anut selama ini. Hal itu juga dilakukan agar program-program sosialisasi dan pembinaan yang ada di lembaganya tidak dimanfaatkan sepihak untuk kepentingan komunitas-komunitas kelompok radikal. Dengan upaya itu, ia justru bisa memantau dan mengetahui komunitas-komunitas mana saja yang yang dituju oleh mereka. Selain itu, ia juga bisa memanfaatkan jaringan kelompok-kelompok ekstremis ini yang ada di luar negeri mengingat mereka memiliki jaringan yang kuat dengan kelompok usaha dan politik di luar negeri.¹³⁸

Bagi Setiyo, justru keberadaan mereka di lembaganya akan memperkuat jaringan dan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program. Kehadiran mereka di lembaga kajian halal juga meringankan kerjanya karena umumnya UKM-UKM yang mereka bina atau yang berasal dari komunitas mereka rata-rata sudah *established*, berbeda dengan UKM yang bukan dari kelompok mereka yang umumnya masih merintis atau baru memulai usaha.

Ia tidak merasa khawatir lembaganya akan dikuasai oleh kelompok ekstrimis karena semua yang terlibat umumnya adalah dosen, bukan mahasiswa baru. Dengan cara itu, ia berharap proses kaderisasi di tubuh kelompok ekstrimis terputus. Karena tidak ada mahasiswa baru yang dilibatkan. Sedangkan ruang gerak dosen-dosen dari kelompok mereka juga dibatasi dan dipantau.

Kegiatan kelompok HTI, salafi dan kelompok lain yang diindikasikan ekstremis dan intoleran juga bergeser dilaksanakan di luar kampus, atau di daerah perumahan di sekitar kampus. KH. Ma'ruf Khozin, menceritakan bahwa aliran Islam yang berkembang di daerahnya benar-benar komplit, mulai NU, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, hingga MTA (Majelis Tafsir Al-Qur'an). Mereka yang bukan NU dan Muhammadiyah umumnya adalah para mahasiswa atau pendatang. Paling banyak adalah mahasiswa ITS. Tapi ada juga mahasiswa dari kampus-kampus yang lain, seperti Universitas Hang Tuah, Universitas WR Soepratman, Unitomo dan Untag. Ia sering berkeliling ke masjid-masjid di kawasan yang banyak rumah kos-kosannya dan memberi buku-buku kepada takmir masjid sebagai bahan bacaan para jama'ahnya.¹³⁹

Perumahan-perumahan yang sering dijadikan sasaran untuk dakwah kelompok HTI dan Salafi adalah perumahan kelas menengah ke atas. Seperti perumahan Marina. Ia pernah menjumpai jamaah warga perumahan yang sedang salat di masjid perkampungan.

Ada seorang pimpinan yang bergerak di bidang telekomunikasi milik pemerintah, BUMN. Orang ini tinggal di perumahan, dia kenal saya, itu kemudian bapak ini kalo shalat dhuhur, sholat ashar, maghrib, isya' itu di perumahan tapi kalo subuh keluar cari Masjid di kampung. Katanya saya rindu masa kecil, kami kecil di kampung ada (do'a) qunutnya, di perumahan ini ngga ada, ustadz-ustadznya katanya salafi. Kalo subuh itu mencari tempat seperti kita, jadi gitu di perumahan. Nah di perumahan satunya lagi

¹³⁸ Wawancara dengan Prof. Setiyo Gunawan, Ph.D. (Kepala Pusat Kajian Halal ITS), 23 Februari 2021.

¹³⁹ KH Ma'ruf Khozin adalah Ketua Aswaja NU Center Jawa Timur. Sebuah lembaga yang dibentuk khusus oleh Nahdlatul Ulama untuk menangkal berkembangnya radikalisme, ekstermisme dan salafisme. Ia juga salah seorang da'i yang aktif memberi ceramah di berbagai masjid terutama di Kota Surabaya.

itu juga sama, bahkan di perumahan yang satunya ini, ada teman meminta saya untuk mengimbangi kajiannya. Di sini sudah ada kajian salafi sudah lama.¹⁴⁰

Aktivitas kegiatan JMMI tetap berjalan. Bahkan, JMMI sempat mengundang salah satu narasumber pengajian yang diindikasikan pendukung HTI. Polisi mengetahui informasi tersebut dan mencegah agar pengajian tersebut tidak dilanjutkan.

Selain diterbitkannya Perppu No. 2/2017, kondisi pandemi yang sudah berlangsung setahun juga menjadi penyebab berkurangnya kegiatan-kegiatan kelompok ekstrimis yang ada di kampus. Ditambah lagi, pada tahun 2019, rector ITS berganti dari Prof. Joni Hermana, Ph.D. ke Prof. Dr. Mochammad Ashari, M.Eng. Rektor baru kemudian mengganti hampir semua pejabat akademik ITS. Mulai dari Wakil Rektor, Dekan, Kepala Departemen dan pejabat-pejabat yang lain. Rektor baru menempatkan orang-orang moderat di posisi-posisi strategis sehingga memunculkan harapan baru terkait dengan kehidupan keagamaan di ITS. Kebijakan ini juga menyasar ke organisasi-organisasi kemahasiswaan intrakampus.

Bisa dikatakan bahwa perubahan mendasar adalah menata kembali pejabat-pejabat yang memiliki akses langsung terhadap penggunaan sarana dan prasarana yang ada di kampus. Kemudian mengoordinasikan dosen-dosen dari kelompok moderat untuk bersama-sama mempromosikan moderasi beragama di kampus. Selain itu juga berupaya meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air segenap civitas akademika ITS. Di tengah situasi seperti ini apa yang dicita-citakan oleh rektor baru bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak tantangan yang menghadang khususnya dari para dosen dari kelompok-kelompok radikal yang sudah lama mengakar dan solid.

Wakil Rektor yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan, Prof Dr. Adi Suprijanto menyebutkan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah mereformasi Tim Pembina Kerohanian Islam (TPKI). Sebelumnya, TPKI diisi oleh orang-orang dari kelompok tarbiyah, HTI dan salafi. Namun semenjak ia menjabat, dilakukan penataan sehingga orang-orang dari kelompok moderat bisa masuk mengisi posisi ini. Karena TPKI adalah lembaga yang menjadi pusat dari kebijakan kegiatan-kegiatan keislaman yang ada di kampus. Termasuk juga memberikan rekomendasi atas permohonan dana yang diajukan oleh mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan keagamaan Islam di kampus. TPKI diarahkan agar memiliki garis-garis besar program dan kegiatan yang menimbulkan kecintaan kepada NKRI. Selain itu, guna memutus rantai kaderisasi dan rekrutmen mahasiswa oleh kelompok ekstrimis, pihaknya memutus hubungan antara JMMI dengan lembaga dakwah jurusan atau LKKI di semua departemen. Pihak rektorat mengeluarkan SK yang isinya menunjuk dan mengganti pengurus JMMI yang lama dengan yang baru. Seluruh pengurus yang lama diskriming. Jika terindikasi kelompok ekstrimis maka akan diganti dengan mahasiswa dari kelompok moderat. JMMI juga difungsikan hanya untuk mengurus ketakmiran saja, mengurus peribadatan yang ada di masjid Manarul Ilmi, bukan mengurus kemahasiswaan

¹⁴⁰ Wawancara dengan KH Ma'ruf Khozin, 23 Februari 2021.

yang ada di departemen-departemen. Dengan begitu, posisi JMMI akhirnya di bawah TPKI dan Takmir MMI.¹⁴¹

Pihak rektorat berusaha agar nilai-nilai kebangsaan tampak dalam kegiatan-kegiatan keislaman yang ada di kampus ITS. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang memunculkan kesan dan menyuburkan radikalisme dihapus. Begitu juga dengan di bidang akademik, para pengajar diminta untuk ikut serta menanamkan rasa cinta tanah air dan nilai-nilai kebangsaan kepada mahasiswanya. Untuk keperluan itu, pihak kampus sampai mengadakan *Ngaji Kebangsaan* yang mendatangkan penceramah-penceramah yang bisa membangkitkan nasionalisme di kalangan mahasiswa dan dosen-dosen, seperti ulama yang juga budayawan KH. Agus Sunyoto, Prof. Nadirsyah Hosen. Sedangkan untuk pengajian rutin salah satu pematerinya adalah ulama muda moderat KH. Makruf Khozin. Daftar penceramah dan khotib Jum'at di masjid Manarul Ilmi juga tidak luput dari evaluasi. Penceramah dan khotib yang dianggap radikal diganti dengan mereka yang moderat. Bahkan Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi, Prof. Agus Zainal Arifin, Ph.D. juga turun langsung mengasuh salah satu pengajian rutin di masjid tersebut,¹⁴²

Perubahan besar-besaran itu banyak ditentang oleh dosen-dosen hingga mahasiswa dari kelompok radikal khususnya kelompok tarbiyah. Kritik dan *nyinyiran* banyak dilontarkan ketika Masjid Manarul Ilmi mulai bisa dijadikan tempat kegiatan mahasiswa kelompok moderat seperti menyelenggarakan kesenian Islami hadrah dan tarian sufi. Mereka menilai hal-hal yang dilakukan kelompok moderat adalah perbuatan bid'ah dan syirik. Yang mengagetkan bagi Ardi Maulidi bahwa kabar tersebut sampai di telinga para alumni JMMI, bahkan hal itu sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial milik JMMI. Namun ia dan kelompok moderat berusaha mengimbangi bahwa masjid Manarul Ilmi bukanlah masjid milik satu golongan saja melainkan juga berwarna-warna dan harus dihargai.¹⁴³

Penggantian kepengurusan JMMI oleh Takmir Masjid Manarul Ilmi juga membuat berang aktifis kelompok tarbiyah. Selain kaget, mereka juga menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pihak takmir dan TPKI terhadap JMMI sudah melakukan intervensi terlalu jauh. Ia menyebutnya bukan pergantian, tapi repositioning JMMI. JMMI yang awalnya memiliki binaan di departemen-departemen melalui LKKI kini difungsikan menjadi semacam remaja masjid yang hanya mengurus masjid saja. Bahkan untuk mengundang pemateri atau penceramah untuk kegiatan pengajian harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada takmir masjid dan TPKI. Pengurus parpol atau orang-orang yang berafiliasi pada parpol tertentu atau yang dianggap radikal oleh pihak takmir dan TPKI tidak boleh diundang menjadi penceramah. Tentu saja hal ini menurutnya sebuah pengekan terhadap aktivitas JMMI.

Jadi semua dikontrol oleh pembina, jadi pembina yang dulu hanya memberikan saran atau bagaimana itu tiba-tiba sangat terjun langsung gitu, apa yaa...intervensi gitu, semisal, mulai dari bentuk kegiatan bahkan

¹⁴¹ Wawancara dengan Prof. Adi Suprijanto (Wakil Rektor I ITS), 5 Februari 2021.

¹⁴² Wawancara dengan Murdjito, M.Sc. (Pengurus Takmir Masjid Manarul Ilmi ITS), 3 Februari 2021.

¹⁴³ Wawancara dengan Ardi Maulidi Navastara (Dosen Departemen Perencanaan Wilayah), 4 Februari 2021.

sampai mengundang pembicara pun benar-benar dikekang. Yang saya sesalkan adalah...ini akan masuk dalam alasan lain yaa yang masih spekulatif gitu, yang mana rasa-rasanya kok semuanya menjurus ke satu kelompok.¹⁴⁴

Perubahan fungsi JMMI membuat kelompok tarbiyah juga merasa tidak nyaman. Selama ini, JMMI telah mendesain program-program kegiatan yang sesuai dengan selera anak muda Islam masa kini dan itu semua berubah. Bagi mahasiswa yang berasal dari SMA umum dengan ilmu agama yang minim, JMMI adalah wadah yang menyenangkan untuk beraktualisasi. JMMI mampu memberikan tawaran yang menarik bagi mereka untuk belajar memahami Islam dengan cara-cara yang modern. Selain memiliki program keislaman, JMMI yang dulu juga memiliki program sosial yang bertujuan untuk mengasah empati mahasiswa. Seperti yang diungkapkan Natasya Shantika, mantan pengurus JMMI, bahwa kegiatan JMMI yang sekarang terkesan kaku dan tidak mengasikkan.

Itu ya pak saya ingat-ingat dari sektor saya kemitraan ada kegiatan namanya study banding LDK kita di JMMI untuk menjadi LDK yang lebih maju, misalnya masjid Salman ITB itu benar-benar kayak maju. Karena berhasil untuk menggaet semua mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi layanannya tidak cuma untuk teman ITB, tapi untuk masyarakat seluruh Indonesia. Selain studi banding dengan LKKI lebih maju kita juga ada studi banding ke LDK ke mitra binaan. LDK binaan itu ada di kampus mana saja contohnya ada kampus yang tua dan kampus yang tua itu merupakan kampus mitra binaan di JMMI.... Kita juga ada pelatihan, kan ada materi nah kita itu dikasih materi caranya kita ini bisa berkontribusi dengan membuat project-project sosial untuk menjawab masalah masyarakat di sekitar kita.”

Perubahan besar-besaran yang dilakukan terhadap TPKI dan JMMI serta penataan pada jabatan-jabatan struktural oleh kelompok moderat juga menimbulkan kasak-kusuk di kalangan dosen-dosen kelompok radikal. Restrukturisasi itu dianggap sebagai upaya mengkambinghitamkan HTI. Kasak-kusuk itu sempat terdengar oleh Prof. Daniel M. Rosyid, bahkan kabar yang beredar menurut kasak-kusuk tersebut bahwa PKS dijadikan musuh dan HTI menjadi olok-olokan.¹⁴⁵

Meski perubahan dilakukan secara besar-besaran namun pimpinan kampus harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Sebab, salah sedikit saja dalam melangkah justru akan menjadi senjata makan tuan, lebih-lebih dengan adanya media sosial. Kebijakan perubahan yang mendasar terhadap struktur jabatan dan organisasi pasti juga akan ada pihak-pihak yang merasa disingkirkan dan dirugikan. Oleh karena itu, setiap Langkah harus dipikirkan matang-matang dan harus memiliki landasan hukumnya.

Meski demikian, ada pekerjaan yang belum selesai, yakni memutus jaringan kaderisasi kelompok ekstrimis yang ada di departemen-departemen

¹⁴⁴ Wawancara dengan Faiz Syabili Rahman (Mantan Pengurus Bidang kaderisasi JMMI), 23 Februari 2021.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Prof. Daniel M. Rosyid, 1 Maret 2021.

melalui LKKI. Saat ini, tidak semua pengurus LKKI diisi oleh mahasiswa dari kelompok moderat. Sebagian besar masih “dikuasai” kelompok tarbiyah dan salafi.

V.4 Penutup

Ada beberapa kelompok radikal yang berkembang dengan subur di kampus ITS semenjak Reformasi. Mereka diantaranya adalah kelompok tarbiyah, kelompok HTI dan Salafi. Kelompok tarbiyah yang juga bisa disebut salafi ikhwani menguasai lembaga-lembaga dakwah kampus di ITS. Hampir semua lembaga dakwah jurusan atau yang disebut Lembaga Kajian Kerohanian Islam (LKKI) diisi pengurus yang berasal dari kelompok tarbiyah. Mereka juga memiliki dukungan yang kuat dari para senior dan alumni, di antaranya adalah para dosen, tenaga kependidikan dan para pejabat kampus sehingga bisa leluasa mengakses sarana dan prasarana kampus untuk dijadikan tempat kegiatan, termasuk pembiayaan dan beasiswa.

Banyak pihak yang tidak menyadari bahwa Perppu No. 2/2017 telah disahkan oleh Presiden dan menjadi perangkat untuk menghalau paham-paham radikal masuk ke kampus, termasuk di ITS. Pergantian kepemimpinan di kampus ITS menjadi titik balik mendominasinya gerakan kelompok moderat. Perubahan-perubahan di struktur jabatan yang terkait dengan urusan kemahasiswaan sarana prasarana menjadi pintu masuk untuk menggeser peran kelompok tarbiyah dan kelompok kanan lainnya dalam menanamkan nilai-nilai keislaman di kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Kebijakan lain yang tidak kalah penting adalah merombak sistem pengajaran pendidikan Islam. Termasuk melakukan perubahan terhadap lembaga mahasiswa yang mengelola kegiatan-kegiatan keislaman.

Kelompok moderat di kampus ITS dan di luar kampus sekitar ITS mulai memberi perhatian dan terlibat dalam melakukan moderasi kehidupan keagamaan di ITS. Sinergi dan komunikasi secara intensif perlu dibangun agar segala perkembangan gerakan bisa dipantau dan segera diambil langkah-langkah antisipatif. Sekalipun demikian, dukungan dari negara dan pihak-pihak lain untuk semakin menguatkan pihak pimpinan dalam mengambil kebijakan tegas terhadap kelompok-kelompok radikal.

VI. KESIMPULAN

Dari paparan di atas, bisa disimpulkan bahwa:

1. Secara umum, di ketiga kampus yang menjadi wilayah studi ini, kelompok radikal yang teridentifikasi adalah salafi, ikhwani, dan HTI. Kehidupan organisasi radikal, terutama di kalangan mahasiswa, selama ini telah terintegrasi sedemikian rupa ke dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan intra-kampus, di mana Lembaga Dakwah Kampus atau Unit Kegiatan Islam atau dengan nama lain menjadi kendaraan efektif bagi rekrutmen anggota baru dan penyebaran ideologinya. Masjid menjadi tempat penting dari pergerakan kelompok ini.
2. Kelompok ini, sekalipun bergerak melalui organisasi kemahasiswaan intra-kampus, namun sesungguhnya memiliki jaringan gerakan dan pendanaan dengan kelompok di luar kampus, terutama dengan kelompok yang memiliki ideologi yang sama.

3. Pasca-UU Ormas, dunia kampus telah melakukan kebijakan tertentu dalam menangkal perkembangan kelompok radikal. Kebijakan itu antara lain: mengganti orang-orang yang dinilai radikal dari pos-pos jabatan struktural dengan orang-orang yang lebih moderat; Mereformasi sistem pendidikan keislaman; Melakukan pengawasan terhadap kegiatan kelompok-kelompok radikal; Menanamkan nilai-nilai nasionalisme (Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika); dan Melarang HTI dari dunia kampus.
4. Sekalipun demikian, ada kegamangan terkait dengan kebijakan deradikalisasi atau moderasi yang dilakukan pihak kampus. Kegamangan itu setidaknya dikarenakan tiga hal: kebebasan mimbar akademik dunia kampus; dominasi yang terlalu dalam dan massif kelompok radikal di dalam organisasi kemahasiswaan intrakampus; dan kurangnya dukungan baik dari negara maupun kelompok moderat ketika pimpinan kampus mendapat serangan dari publik terkait dengan kebijakannya terhadap kelompok-kelompok radikal di kampus.
5. Dampak dari kebijakan bisa dibagi menjadi dua. Bagi organisasi yang secara formal dilarang, seperti HTI, kebijakan pihak kampus membuat HTI bisa dikatakan sepenuhnya telah hilang. Namun, berbagai organisasi mantel HTI tetap bergerak di dalam kampus tanpa embel-embel identitas HTI. Namun bagi kelompok-kelompok radikal yang tidak dilarang, kebijakan kampus hanya berdampak pada ketidakeleluasaan kegiatan yang sepenuhnya tergantung pada keketatan atau kelonggaran pengawasan.
6. Baik bagi HTI maupun kelompok radikal lain, kegiatannya kini banyak menggunakan media online. Sekalipun ini bukan hal baru, namun cara ini kini lebih menjadi favorit karena dirasa aman dan tidak bisa dijangkau oleh pemangku kebijakan kampus. Di samping itu, masjid-masjid "kanan" yang selama ini telah menjadi jaringan ideologis dan gerakannya juga menjadi tempat baru saat wilayah kampus mulai agak terbatas bagi kelompok ini.

Daftar Pustaka

- al-Ayubi, Nazih. *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World* (London and New York: Routledge, 1991).
- al-Ashmawi, Said. *Against Islamic Extremism: the Writings of Muhammad Said al-Ashmawi* (Florida: University Press of Florida, 1998).
- Amstrong, Karen. "What is Fundamentalism," dalam Makalah Seminar *Intolerance and Fundamnetalism*, 26 Januari 2005. Berman, Sheri. "Islamism, Revolution, and Civil Society," dalam *Perspectives on Politics* (2003).
- Badruzzaman. "Hizbut Tahrir di Kota Makassar", dalam Abd. Kadir Ahmad, MS (ed.), *Varian Gerakan Keagamaan* (Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, 2007).
- Castells, Manuel. *The Power of Identity* (Wiley Blackwell: 2010).
- Dawson, Lorne L. "Who Joins New Religious Movements and Why: Twenty Years of Research and What have We Learned?," dalam Lorne L. Dawson (ed.), *Cults and New Religious Movements: A Reader* (USA, UK and Australia: Blackwell Publishing, 2003).
- El Fadl, Khaled Abou. *The Great Theft, Wrestling Islam From the Extremist* (San Fransisco: Harper San Fransisco, 2005).

- Farouki, Taji. "Islamists and Threat of Jihad: Hizb al-Tahrir and al-Muhajiroun on Israel and Jews," dalam *Middle Eastern Studies*, 36: 4 (Oktober 2000).
- Fealy, Greg. *Islamic Radicalism in Indonesia : The Faltering Revival ?* (Southeast Asian Affairs: 2004).
- Fealy, Greg dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2007).
- FSLDK ITS, *Buku Putih FSLDK* (Surabaya: JMMI ITS, 2014).
- Hamid, Wardiah. "Eksistensi Komunitas Salafi di Makassar," dalam *Jurnal Pusaka*, Vol. 2, No. 1 (2014).
- Heghammer, Thomas. "Jihadis-Salafis or Revolutionaries?" dalam Roel Metjer (ed), *Global Salafism: Islam's New Religion Movement* (London: Hurst & Co Publisher, 2009).
- <https://nasional.tempo.co/read/1089345/its-bantah-pecat-dosen-simpatisan-hizbut-tahrir-indonesia>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44357353>.
- <http://masjid.its.ac.id/>
- Jansen JG, Jihanes. *The Neglected Duty: The Creed of Sadat's Assassins and Islamic Resurgence in the Middle East* (New York: Macmillan Publishing Company, 1986).
- Juergensmeyer, Mark. *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2000).
- Kementerian Dalam Negeri, *BNPT Klaim Data Mahasiswa 'Radikal' Dari Penelitian*. Internet, (diakses pada 22 Maret 2021). <<https://litbang.kemendagri.go.id/website/bnpt-klaim-data-mahasiswa-radikal-dari-penelitian/>>
- Makmuralto, Ato. *Lembaga Dakwah Kampus Keindonesiaan; Kiprah dan Pemikiran LKIMB UNM* (Makassar: LKIMB UNM, 2016).
- Marsudi, Imam dkk. *Menangkal Radikalisme di Kampus* (Surabaya: Pusat Pembinaan Ideologi LPPM UNESA, 2019).
- Muhktar, Sidratahta. *Dinamika Politik Islam dalam Dunia yang Berubah* (Yogyakarta: Aynat Publishing, 2014).
- Rahmat, M. Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2005).
- Rahmat, Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal*, (Jakarta: Erlangga, 2004).
- , *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: LKiS, 2009).
- . "From Moderatism to Fundamentalism: Portrait of Shifting the Religious Understanding of Makassar Islamic Students," dalam *JICSA*, Volume 07, Number 01 (June 2018).
- . "Jaringan Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Makassar Sulawesi Selatan," dalam Syafii Mufid (ed), *Perkembangan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat-Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011).
- Rink, Anselm & Kunaal Sharma "The Determinants of Religious Radicalization: Evidence from Kenya," *Journal of Conflict Resoution*, vol. 62, number 6 (2018).
- Syeirazi, M. Khalid. *Wasathiyah Islam* (Jakarta: Alif.id, 2020).

- Saeed, Abdullah. "Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempts at a Classification", *The Muslim World*, Vol. 97 (Juli 2007).
- Team, *The Methodology of Hizbut Tahrir for Change* (London: Al-Khilafah Publications, 1999). Fatah, Eep Abdullah. *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Demokratisasi Pasca Orde Baru* (Bandung Mizan, 2000).
- Tempo. *Sumpah Khilafah di Ladang Tebu, Sekelompok orang di Malang, Solo dan Jakarta secara terbuka Mendukung ISIS*. Internet, (diakses pada 24 Maret 2021). <<https://majalah.tempo.co/read/nasional/145946/sumpah-khilafah-di-ladang-tebu>>
- Tim, *Selayang Pandang Wahdah Islamiyah* (Makassar: Departemen Informasi dan Komunikasi Wahdah Islamiyah, 2004).
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019). Syamsurijal. *Laporan Penelitian Pergeseran Paham Keagamaan Mahasiswa Muslim di Makassar* (Makassar: Litbang Agama Makassar, 2015).
- Furkon, Aay Muhammad. *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Mudah Muslim Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2004).

PERJANJIAN KERJA SAMA

No. : 046/806/INFID/1/2021

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan merupakan kesepakatan antara:

Nama : Sugeng Bahagijo
Jabatan : Direktur Eksekutif
Lembaga : INFID
Alamat : Jl. Jatipadang Raya Kavling 3 No. 105, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**, dengan

Nama : Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag
Jabatan : Pengajar
Lembaga : UIN Sunan Ampel
Alamat : Star Safira Regency B3/22 Suko, Sukodono, Sidoarjo
Telefon : 081359279589

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. Dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dan mengadakan perjanjian dalam kegiatan penelitian "Peta Gerakan Penyebaran Ekstremisme Pasca Berlakunya Perppu No. 2 Tahun 2017"

Pasal 1

Jenis Pekerjaan

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menjadi *Senior Researcher* dalam kegiatan penelitian "Peta Gerakan Penyebaran Ekstremisme Pasca Berlakunya Perppu No. 2 Tahun 2017"
- (2) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 1. Bersama dengan *Team Leader* melaksanakan penelitian "Peta Gerakan Penyebaran Ekstremisme Pasca Berlakunya Perppu No. 2 Tahun 2017"
 2. Turut membantu *Team Leader* menyiapkan desain riset, membuat dan melaksanakan presentasi proses dan hasil penelitian "Peta Gerakan Penyebaran Ekstremisme Pasca Berlakunya Perppu No. 2 Tahun 2017"
 3. Melaksanakan penelitian literatur dan penelitian lapangan "Peta Gerakan Penyebaran Ekstremisme Pasca Berlakunya Perppu No. 2 Tahun 2017"
 4. Membuat laporan hasil penelitian lapangan untuk diserahkan kepada *Team Leader*.

5. Berkoordinasi dengan INFID untuk seluruh pelaksanaan penelitian “Peta Gerakan Penyebaran Ekstremisme Pasca Berlakunya Perppu No. 2 Tahun 2017”

Pasal 2 **Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan jenis pekerjaan yang dimaksud pada Pasal 1 adalah bekerja selama 27 hari dalam durasi 5 Januari - 30 April 2021.

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan hasil laporan dari **PIHAK KEDUA** beserta dengan lampiran-lampirannya sesuai dengan kesepakatan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan laporan yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk elektronik dan fisik.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan honor dan biaya kegiatan sebesar **Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)**. Pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin pembayaran:
 1. Pembayaran termin 1 (satu) Rp 8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) dilakukan setelah tanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama.
 2. Pembayaran termin 2 (dua) Rp 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dilakukan setelah draft satu laporan diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 3. Pembayaran termin 3 (tiga) Rp 8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) dilakukan setelah laporan final diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pembayaran honor dan biaya penelitian dilakukan ke **Bank Mandiri KCP Ponorogo** No. rekening **114-00-0681842-8** atas nama **Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag.**

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak menerima honor seperti yang tersebut pada Pasal 3 ayat (3) yaitu sebesar **Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)** yang diterima dalam 3 (tiga) termin pembayaran.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan kewajiban yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu sebagaimana uraian tugas dan pekerjaan yang telah disepakati.

Pasal 5 **Pajak**

PIHAK PERTAMA sebagai Wajib Pajak Badan wajib melakukan pemotongan pajak atas honor yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 2.5% (dua setengah persen) jika memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3% (tiga persen) bila tidak memiliki NPWP.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
- (2) Jika penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak dapat dicapai maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 7
Penutup

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai dan dibuat rangkap dua dengan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam menjalin kerja sama.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini berakhir masa berlakunya setelah **PARA PIHAK** memenuhi semua kewajiban dan menerima haknya masing-masing seperti diatur dalam pasal-pasal di Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dan untuk itu akan dibuat Addendum

Jakarta, 5 Januari 2021
PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



Sugeng Bahagijo
Direktur Eksekutif INFID

Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag
Pengajar UIN Sunan Ampel

Jakarta, 2 September 2021

SURAT KETERANGAN

707/SK/INFID/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugeng Bahagijo
Jabatan : Direktur Eksekutif INFID

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag
Jabatan : Ketua Jurusan Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya dan Peneliti

adalah benar sebagai **Koordinator Penelitian dan Senior Reseracher** dalam kegiatan penelitian INFID sepanjang tahun 2019 – 2021 dengan rincian berikut:

1. Ketua Penelitian dalam kegiatan “*The Role of Moderate Islam Organization in Preventing Violent Extremism: Study case of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah*”, tahun 2019.
2. Peneliti dalam kegiatan “*Develop Research Instrument for Intolerance and Radicalism In State Universities*”, tahun 2019.
3. Koordinator Penelitian dalam kegiatan “*Survei Persepsi dan Sikap Generasi Muda terhadap Radikalisasi dan Ekstremisme Kekerasan*”, tahun 2020.
4. *Senior Researcher* dalam kegiatan penelitian “*Peta Gerakan Penyebaran Ekstremisme Pasca Berlakunya Perppu No. 2 Tahun 2017*”, tahun 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Sugeng Bahagijo



Sugeng Bahagijo
Direktur Eksekutif INFID